

6

CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola
Perusahaan





DASAR-DASAR DAN PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Implementation Basis and Guidance

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan mengacu pada dasar-dasar dan pedoman peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007");
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU 8/1995");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("POJK 21/2015");
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("SEOJK 32/2015").

In terms of implementation Corporate Governance, the Company refers to the basis and guidance to laws and regulations as follows:

1. Laws of the Republic Indonesia No. 40 of 2007 on the Limited Liability Companies ("Law 40/2007");
2. Laws of the Republic Indonesia No. 8 of 1995 on the Capital Market ("Law 8/1995");
3. Regulation of Financial Services Authority No. 21/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines of Public Companies ("POJK 21/2015");
4. Circular Letter of Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 on the Corporate Governance Guidelines of Public Companies ("SEOJK 32/2015").

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) merupakan suatu tatanan yang mengatur pengelolaan perusahaan yang berperan penting untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi serta sosial yang baik terutama bagi para Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan dan Perseroan.

Sebagai perusahaan publik yang bergerak dibidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, Perseroan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan layanan yang dimiliki serta melakukan perbaikan di dalam Perseroan sendiri. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Perseroan memandang sangat penting penerapan suatu Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG"), hal ini untuk menjaga kesinambungan kegiatan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam Perseroan, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perseroan tetapi menjadi bagian dari budaya Perseroan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja Perseroan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah Perseroan untuk kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, termasuk pula para pengguna jasa Perseroan.

Implementation of Corporate Governance

Corporate Governance is a guidance to regulate the management of company has a significant role to generate a good economic and social values especially to Shareholders, Stakeholders and the Company.

As a public company which engaged its business in telecommunications network and service provider, the Company strives to continuously improve the quality and develop its services and to make improvements within the Company itself. In order to achieve this, the Company considers the importance to implementing a Good Corporate Governance ("GCG"), in order to maintain the continuity of Company's business activities in the future. Given the consistent and persistent GCG implementation supported by integrity and high commitment as well as active participations of all of the Company's organs, the Company is expecting that GCG will not only become an obligation but also a part of the Company's culture to achieve business sustainability and security in the longer term, improve performance, and in the end give an added value for the Company for the interests of its Shareholders and Stakeholders, as well as the Company's service users.

Dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), untuk menciptakan kinerja yang baik, Perseroan melaksanakan seluruh kegiatan dengan menganut Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan penerapan TARIF, sebagai 5 (lima) pilar dasar dari GCG, yaitu:

1. Keterbukaan;
2. Akuntabilitas;
3. Pertanggungjawaban
4. Independensi; dan
5. Kesetaraan dan Kewajaran

Penerapan 5 (lima) pilar dasar tersebut diyakini oleh Perseroan sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Perseroan, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha Perseroan secara menyeluruh. Keseimbangan operasional usaha yang akan dicapai meliputi segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal, sehingga kepentingan Perseroan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan akan mencapai titik ekuilibrium.

Keterbukaan

Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan secara rutin kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, serta memastikan bahwa informasi tersedia tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.

Perseroan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin yang diwajibkan bagi perusahaan publik, antara lain laporan keuangan interim, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan tahunan, dan laporan insidental, yang antara lain terkait dengan aksi korporasi, transaksi afiliasi, maupun transaksi material, seluruhnya baik dalam paparan publik maupun melalui media cetak maupun media elektronik. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana berupa akses bagi khalayak umum untuk memperoleh laporan tahunan Perseroan melalui website resmi www.linknet.co.id.

In the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principle, to create a good performance to perform its business the Company has followed the General Guidance of Good Corporate Governance stipulated by the National Committee for Governance Policies (KNKG) under the implementation of 5 (five) fundamental pillars called TARIF, which are

1. Transparency;
2. Accountability;
3. Responsibility;
4. Independency; and
5. Fairness.

The Company believes that the implementation of the 5 (five) fundamental pillars is reliable instruments in regulating all business aspects conducted by the Company, the Board of Commissioners, the Board of Directors and all of employee can create a thorough balance in the Company's business operational. The balance in business operational covers all interests, both individual and collective interests and internal and external interests, so that the interests of the Company, the Shareholders, and Stakeholders will achieve an equilibrium point.

Transparency

As a public company, the Company continuously tries to maintain objectivity in performing its business by providing material and relevant information routinely to Shareholders and Stakeholders and ensure that the information is available in time, proper, clear, accurate and accessible.

The Company continuously delivers routine reports obliged on public company, such as the interim financial reports, the midyear financial reports, the annual audited financial reports, the annual reports and incidental reports, including reports related to corporate actions, affiliated transactions or material transactions, which all of them delivered both through the public exposes or through printed and electronic mass media. Besides, the Company also provides an access for the public to obtain the Company's annual reports by the official website www.linknet.co.id.

Akuntabilitas

Penerapan pilar akuntabilitas oleh Perseroan sebagai perusahaan publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan agar pengelolaan Perseroan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Perseroan tanpa mengesampingkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Selain menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam Perseroan, untuk menjaga akuntabilitasnya Perseroan juga memastikan bahwa semua bagian dalam Perseroan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam kegiatan usaha Perseroan.

Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun di luar Perseroan, untuk pengembangan kompetensinya. Tidak hanya berhenti disana, hasil pengembangan tersebut juga wajib diterapkan dan disebarluaskan bagi karyawan lainnya agar selalu ada peningkatan dan penyempurnaan dalam setiap aspek dalam Perseroan. Penerapan sistem oleh Perseroan sehubungan dengan penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya.

Tidak hanya menekankan pada kompetensi masing-masing karyawan, sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya. Perseroan juga telah memiliki komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Perseroan, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi, untuk memastikan bahwa setiap bagian di dalam Perseroan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Accountability

The implementation of accountability pillar by the Company as a public company is a form of the Company's responsibility to Shareholders and Stakeholders so that the Company's management is conducted appropriately, measurable and in accordance with the Company's interests without ignoring the interests of Shareholders and Stakeholders.

In addition to set the clarity on the functions, implementation and responsibilities of each organs, the Company also ensure that all organs in the Company and employees have the proper competence in line with their respective duties, responsibilities and role in the Company's business activities so that the Company can maintain its accountability.

The Company gives a chance for every employee to take part in training programs and seminars, both inside and outside the Company, for the development of their competence. Furthermore, they are also asked to implement knowledge they obtained and disburse it to other employees for improvement and perfection in all aspects in the Company. The implementation of system by the Company in connection to appreciation to employees having accomplishments and sanctions to employees disobeying regulations it provides an opportunity for the Company to objectively examine the accountability.

Not only to emphasizes the competence of each employee, the system of giving appreciation to employees with certain achievements and sanctions to disobedient employees gives a chance to the Company to objectively test its accountability. The Company has also a committee and a working unit overseeing and controlling its internal affairs. The committee and working unit are directly responsible to the Board of Commissioners and the Board of Directors to ensure that all organs in the Company perform their own roles and functions properly.

“PERSEROAN SENANTIASA BERUPAYA AGAR EKSISTENSI BISNISNYA TIDAK HANYA MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PARA PENGGUNA JASA PERSEROAN, NAMUN JUGA UNTUK MASYARAKAT YANG ADA DI SEKITAR TEMPAT KEGIATAN USAHANYA”

“The Company is continuously in efforts to make its business existence give benefit not only to its subscribers by also overall society living near the location of its business activities”

Pertanggungjawaban

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali Perseroan. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pelanggan Perseroan yang dapat menikmati layanan secara nyaman, tetapi juga bagi Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu upaya Perseroan untuk penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah dengan memiliki Sekretaris Perusahaan yang bekerjasama dengan Divisi Corporate Legal dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

Perseroan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pengguna jasa Perseroan, namun juga untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usahanya. Manfaat Perseroan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan tidak hanya berupa penyediaan lapangan kerja, namun juga dengan berbagai program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Dengan demikian diharapkan bahwa Perseroan dapat memperoleh pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Independensi

Perseroan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan *output* yang optimal bagi kepentingan Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan dan para karyawannya. Sebagai contoh, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat memiliki pendapat yang independen untuk pengambilan keputusan, tentunya tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperoleh pendapat atau saran yang independen dari konsultan hukum, sumber daya manusia dan konsultan independen lainnya.

Sebagai wujud independensi, Perseroan telah menunjuk beberapa pihak independen yang memiliki reputasi baik untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan peran yang maksimal bagi Komite Audit Perseroan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Responsibility

Every company performing business activities has responsibilities to run their business activities in line with the regulations, including the Company. The benefits of obeying law and regulations will be experienced both by the Company's subscribers that will be able to enjoy the services comfortably and the Company itself for being able to perform its business activities easily and to reach long term sustainability. As part of attempts in the implementation of careful principle, the Company has a Corporate Secretary and in cooperation with the Legal Corporate Division to ensure that the Company's compliance to the Articles of Association, the Company Regulations and other regulations in the capital market.

The Company is continuously in efforts to make its business existence give benefit not only to its subscribers by also overall society living near the location of its business activities. The benefits of the Company's existence for the society living near its business activities include not only on the creation of employment but also on various Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Thus, the Company is expecting to have an acknowledgement as a good corporate citizen.

Independency

The Company continuously ensures that the Company's management is conducted independently, non-dominant to each other, independent from certain interest and the conflict of interest. Thus, the decision making process is always objective and is expected to be able to give optimal output for the interests of Shareholders, Stakeholders and employees. As an example, the Board of Directors and the Board of Commissioners may have independent opinions on the decision making process, without lessening possibilities to have options or suggestions from the legal consultant, human resources consultants or other independent consultants.

As the realization of its independence, the Company has appointed several independent parties who have a good reputation to sit in the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as has given a maximum role for the Company's Audit Committee in conducting supervision on the Company's business activities.

Kesetaraan dan Kewajaran

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh Perseroan untuk setiap pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan. Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan Stakeholders kepada Perseroan.

Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh Perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya untuk Perseroan. Perkembangan karir masing-masing karyawan Perseroan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar.

Fairness

The Company applies the fairness principle for every party having interests to the Company. The Company always gives a fair chance to every party to be able to access the Company's information in accordance to the transparency principle in respective positions as well as in line with the benefits and contributions given by the capital market authority, the capital market community and the Stakeholders to the Company.

The Company also applies the fairness principle for each individual, who is competent, has a will and is highly dedicated, to work for the Company. The Company gives no distinction to career development of its employees based on their tribes, religions, races, groups, genders and physical conditions. The Company always maintains and pays attentions on the balance of employees' rights and obligations fairly.

PENERAPAN PRINSIP GCG SESUAI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

The Implementation of GCG Principles According to Financial Services Authority's Corporate Governance Guidelines for Public Company

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai lembaga pemerintah yang menaungi pasar modal telah mengeluarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai rujukan untuk perusahaan terbuka dalam menjalankan tata kelola perusahaannya yang tertuang dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015. Bagaimanapun perbedaan kemampuan emiten atau perusahaan publik dalam menerapkan tata kelola bergantung pada sektor, jenis industri, ukuran dan kompleksitas perusahaan. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dilakukan melalui pendekatan "Memenuhi atau Dijelaskan". Dengan pendekatan "Memenuhi atau Dijelaskan", perusahaan terbuka direkomendasikan melaksanakan rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal perusahaan terbuka belum melaksanakan rekomendasi tersebut, perusahaan terbuka wajib menjelaskan alasannya dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Sehingga dalam penerapan prinsip GCG yang disesuaikan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dari OJK, Perseroan telah melakukan penerapan yang maksimal sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Financial Services Authority ("OJK") as a government institution that oversees the capital market has issued Corporate Governance Guidelines for Public Company as a reference in carrying out its corporate governance as stated in OJK Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015. However, differences in the capabilities of issuers or public companies in implementing corporate governance depend on the sector, industry type, size and complexity of the company. The implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Company conducted by way of "Comply or Explained" method. By "Comply or Explained" method, public company is recommended to implement the recommendation of aspects and principle of good corporate governance. In the event the public company has not implement the recommendation, a public company shall explain the reason and alternative of the implementation (if any). Therefore, in the application of GCG principles in accordance with OJK's Corporate Governance Guidelines for Public Company, the Company has implemented the maximum implementation as shown in the following table:

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan Implementation
Aspek A : Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Aspect A : Listed Company Relationships with Shareholders in securing Shareholder Rights.		
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Technical methods of procedures for open and closed voting that prioritize independence and interest of the shareholders	Perseroan telah memiliki prosedur teknis pengumpulan suara yang terdapat dalam tata tertib RUPS. Keterangan : Memenuhi The Company already has technical procedures for voting set out in the procedures for the GMS. Remark : Comply
Principle 1 Improving the value of General Meeting of Shareholders (GMS)	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Sebagian besar anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan, kecuali yang berdomisili di Amerika, dan Singapura. Keterangan : Memenuhi
	Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attend the Annual GMS	Most of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attended the Annual GMS, except for them which residing in USA, and Singapore. Remark : Comply
	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit 1 (satu) tahun.	Perseroan telah menyediakan Ringkasan Risalah RUPS dalam website Perseroan untuk 3 tahun terakhir pada bagian Tata Kelola Perusahaan. Keterangan : Memenuhi
	A summary of minutes of GMS is available at the Website at least 1 year.	The Company provide Summary of Minutes of GMS at the Company's Website for lasted 3 year under the Corporate Governance section. Remark : Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	Memiliki suatu kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor.	Perseroan memiliki kebijakan komunikasi kepada Pemegang Saham atau Investor melalui <i>One on One Meeting, Earnings Call, Public Expose, Conference</i> dan <i>Investor Summit</i> . Keterangan : Memenuhi
Principle 2 Improving the Public Listed Company Communication Quality with Shareholders or Investors	To have a policy on communications between Public Company and Shareholders and Investors	The Company has a policy on communications with Shareholders or Investors through One on One Meeting, Earnings Call, Public Expose, Conference and Investor Summit. Remark : Comply
	Mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dalam Situs Web	Perseroan telah menyediakan bahan dari setiap <i>Earnings Call, Conference</i> dan materi presentasi dengan investor di website Perseroan, khususnya pada bagian "Hubungan Investor", untuk memberikan kesetaraan pada Pemegang Saham atau Investor atas pelaksanaan komunikasi dengan Perseroan. Keterangan : Memenuhi
	Post the policy on communications of a Public Company at the website	The Company has made available materials of each Earnings Call, Conference and materials of presentation to investors at the Company's website, especially on the "Investor Relation" section, to provide equality for Shareholders and Investors regarding the implementation of Communications with the Company. Remark : Comply

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan Implementation
Aspek B : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B : Functions and Roles of the Board of Commissioners		
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
Principle 3 Strengthen the Membership and Composition of Board of Commissioners	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka</p> <p>Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the company's Conditions.</p> <p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the required variety of skills, knowledge and experience.</p>	<p>Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 POJK No.33/POJK.04/2014 yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang.</p> <p>Keterangan : Memenuhi</p> <p>The Company has complied with the provision applicable to the Company as Public Company as set out in Article 20 of POJK No.33/POJK.04/2014 that the number of members of the Board of Commissioners must be more than 2 (two) persons.</p> <p>Remark : Comply</p> <p>Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah dipilih dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, pengalaman serta kondisi dan kompleksitas bisnis Perseroan.</p> <p>Keterangan : Memenuhi</p> <p>At the Shareholders' discretion, members of the Board of Commissioners have been appointed by taking into account a variety of skills, knowledges, experiences and the Company's business conditions and complexity..</p> <p>Remark : Comply</p>
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<p>Perseroan belum memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Keterangan : Dijelaskan.</p>
Principle 4 Improving the Quality of Duty and Responsibility of Board of Commissioners	The Board of Commissioners has its self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	<p>The Company does not have its self-assessment policy for the Board of Commissioners. The assessment is conducted by the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the Nomination and Remuneration Charter which has been determined by all members of the Board of Commissioners.</p> <p>Remark : Explained</p>
	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>), diungkapkan melalui laporan tahunan.	<p>Perseroan belum memiliki kebijakan penilaian sendiri sehingga tidak terdapat kebijakan penilaian sendiri yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>Keterangan: Dijelaskan</p>
	The self-assessment policy is reported in an Annual Report.	<p>The Company does not have any self-assessment policy yet, therefore there is no self-assessment policy reported in the Annual Report.</p> <p>Remark: Explained.</p>
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan.	<p>Setiap Dewan Komisaris yang diangkat wajib memenuhi setiap persyaratan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan menandatangani Surat Pernyataan atas hal tersebut. Apabila Dewan Komisaris terlibat kejadian keuangan yang merupakan pelanggaran dari Surat Pernyataan maka RUPS berhak memberhentikan sewaktu-waktu Dewan Komisaris tersebut dengan atau tanpa diperlukannya surat pengunduran diri.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
	The Board of Commissioners has a policy of resignation in the event of involvement in any financial crimes.	<p>Every member of the Board of Commissioners shall meet any requirements as set out in the Articles of Association and shall sign the statement letter for such requirements. If there is any involvement in any financial crimes which is a violation of the statement letter, then the GMS shall have the right to dismiss such member of the Board of Commissioners with or without the resignation letter.</p> <p>Remark: Comply</p>

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan Implementation
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan sukses dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Merujuk pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, salah satu tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi kinerja dan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi. Keterangan : Memenuhi
	The Board of Commissioners or the Nomination and Remuneration Committee sets out a provision of succession in the Nomination Process of a member of the Board of Directors.	Referring to the Nomination and Remuneration Committee Charter, one of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee is to provide recommendations to the Board of Commissioners on performance evaluation and proposals of qualified candidates as members of the Board of Directors. Remark : Comply
	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah dipilih dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, pengalaman serta kondisi dan kompleksitas bisnis Perseroan. Keterangan : Memenuhi
	Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the required variety of skills, knowledge and experience.	The Company has complied with the provision applicable to the Company as Public Company as set out in Article 20 of POJK No.33/POJK.04/2014 that the number of members of the Board of Commissioners must be more than 2 (two) persons. Remark : Comply
Aspek C : Fungsi dan Peran Direksi Aspect C : Functions and Roles of the Board of Directors		
Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi Principle 5 Strengthening Membership and Compositions of Directors	Penentuan Jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 POJK No.33/POJK.04/2014 yaitu jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang. Keterangan : Memenuhi
	Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the Company's conditions and effectiveness in decision making.	The Company has complied with the provision applicable to the Company as Public Company as set out in Article 2 of POJK No.33/POJK.04/2014 that the number of members of the Board of Directors must be more than 2 (two) persons. Remark : Comply
	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, Direksi Perseroan telah dipilih dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, pengalaman serta kondisi dan kompleksitas bisnis Perseroan. Keterangan : Memenuhi
	Determination of the Composition of members of the Board of Directors takes into account a variety of skills, knowledges and experiences as required.	At the Shareholders' discretion, members of the Board of Directors of the Company have been appointed by taking into account a variety of skills, knowledges, experiences and the Company's conditions and business complexity. Remark : Comply
	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dalam Perseroan adalah Direktur Keuangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang akuntansi dan keuangan sebagaimana dapat dilihat dalam riwayat jabatan dan pendidikan Direksi pada bagian profil Direksi. Keterangan : Memenuhi
	Members of the Board of Directors in charge of accounting and finance have skills and/or knowledge in accounting.	The member of the Board of Directors in charge of accounting and finance in the Company is the Finance Director who has sufficient accounting and financial knowledge and experience as can be seen in the position and education history of the Board of Directors under the section of Profiles of the Board of Directors. Remark : Comply

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan Implementation
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of Implementing Task and Responsibility of Board of Directors.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has its self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Perseroan belum memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk Direksi. Penilaian dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Keterangan : Dijelaskan The Company does not have its self-assessment policy for the Board of Directors. The assessment is conducted by the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the Nominatioin and Remuneration Committee Charter. Remark : Explained
	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Self-Assessment policy is reported in an Annual Report.	Perseroan belum memiliki kebijakan penilaian sendiri sehingga tidak terdapat kebijakan penilaian sendiri yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Keterangan : Dijelaskan The Company does not have any self-assessment policy yet, that therefore there is no self-assessment policy reported in the Annual Report. Remark : Explained
	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri apabila terlibat dalam kejadian keuangan.	Setiap Direksi yang diangkat wajib memenuhi setiap persyaratan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan menandatangani Surat Pernyataan atas hal tersebut. Apabila Direksi terlibat kejadian keuangan yang merupakan pelanggaran dari Surat Pernyataan maka RUPS berhak memberhentikan sewaktu-waktu Direksi tersebut dengan atau tanpa diperlukannya surat pengunduran diri. Keterangan : Memenuhi
	The Board of Directors has a policy of resignation in the event of involvement in any financial crimes.	Every member of the Board of Directors shall meet any requirements as set out in the Articles of Association and shall sign the statement letter for such requirements. If there is any involvement in any financial crimes which is a violation of the statement letter, then the GMS shall have the right to dismiss such member of the Board of Directors with or without the resignation letter. Remark : Comply
Aspek D : Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D : Stakeholder Participation		
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 Improving Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation	Memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . To have a Policy to prevent Insider Trading.	Kami memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> berdasarkan Pasal 4.2 Surat Keputusan Direksi No. SK-021/LN/HR/VII/15 tentang Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional ("Kode Etik"). Seluruh karyawan diwajibkan untuk menandatangani dan mematuhi Kode Etik. Keterangan : Memenuhi We had policy to prevent Insider Trading based on the Article 4.2 of the Resolution of the Board of Directors concerning Code of Ethics and Professional Responsibility No. SK-021/LN/HR/VII/15 ("Code of Ethics"). All employees shall sign and comply with the Code of Ethics. Remark : Comply
	Memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> . To have a Policy of Anti Corruption and Anti Fraud.	Kami memiliki kebijakan tentang integritas, benturan kepentingan, penerimaan dan pemberian hadiah dalam Kode Etik yang berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan. Keterangan : Memenuhi We had policy regarding integrity, conflict of interest, receiving and sending gifts in the Code of Ethics applicable to all employees. Remark : Comply

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan Implementation
	Memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Perseroan melalui Divisi <i>Supply Chain Management</i> telah melakukan seleksi vendor dan pemasok serta memiliki kebijakan procurement yang berpedoman kepada Policy No. 32 tanggal 1 Agustus 2014. Keterangan : Memenuhi
	To have a Policy on the Selection and Capacity Building of Suppliers and Vendors.	The Company via the Supply Chain Management Division has selected vendor and supplier and had procurement policy based on Policy No. 32 dated August 1, 2014. Remark : Comply
	Memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor.	Kami memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditor kami melalui Unit <i>Corporate Finance</i> yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditor kami. Keterangan : Dijelaskan
	To have a Policy on the Fulfillment of Creditors' rights.	We have a policy to fulfill the rights of our creditors through the Corporate Finance Unit that sets out and manages the rights of our creditors. Remark : Explained
	Memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>	Kami memiliki kebijakan pengaduan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) dimana Perseroan menjamin dan memastikan adanya perlindungan kerahasiaan pelapor, baik karyawan maupun pihak ketiga yang menyampaikan keluhan atau laporan dugaan tindak pelanggaran. Keterangan : Memenuhi
	To Have a Policy on the Whistleblowing system	We had policy on the whistleblowing system which the Company guarantees and ensures the protection of identity of the whistleblowers, whether the employees or third parties filing any complaints or reports of alleged violations. Remark : Comply
	Memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Perseroan belum memiliki kebijakan untuk pemberian insentif jangka panjang bagi Direksi dan Karyawan. Perseroan hanya memberikan tunjangan-tunjangan dan manfaat-manfaat bagi Direksi dan Karyawan yang berhak atas hal tersebut. Keterangan : Dijelaskan
	To have a policy on the granting of long-term incentives to the Board of Directors and Employees.	The Company does not yet have a policy to provide long-term incentive for Directors and Employees. The Company only provides allowances and benefits to the entitled Directors and Employees. Remark : Explained
Aspek E : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Aspect E : Improving Information Transparency		
Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	Manfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Kami menggunakan berbagai media sosial sebagai media keterbukaan informasi dan promosi produk. Perseroan juga memiliki aplikasi MyFirstMedia sebagai media keterbukaan informasi dan komunikasi kepada pelanggannya. Keterangan : Memenuhi
Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure	To use information technology more widely other than a website as a medium of information disclosure.	We are using several social media as a medium of information disclosure and product promotion. The Company also have MyFirstMedia application as a medium of information disclosure and communication with their customers. Remark : Comply
	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Kami mengungkapkan siapa pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan dengan kepemilikan 5% atau lebih dalam Laporan Tahunan kami di bagian Komposisi Kepemilikan Saham. Keterangan : Memenuhi

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penerapan Implementation
	The Annual Reports of Public Companies disclose the most current beneficial owners of the Company's shareholding, at least 5% other than major shareholders and Controllers.	We disclose the most current beneficial owners of the Company's shareholding with 5% or more shareholding in our Annual report under the section of Composition of Shareholding. Remark : Comply

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Structure

Struktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, Perseroan juga memiliki organ pendukung lain yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan, Hubungan Investor, Unit Audit Internal dan dalam penerapan tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit bersama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Hubungan Investor. Berikut ini adalah struktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan:

The Company's structure of Corporate Governance consists of the main organ are General Meeting of Shareholders ("GMS"), the Board of Commissioners and the Board of Directors. Otherwise, the Company also has supporting organ are Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Secretary, Investor Relation, Internal Audit Unit, and in the implementation of corporate governance, the Board of Commissioners assisted by the Audit Committee, together with the Nomination and Remuneration Committee to be responsible to the Board of Commissioners in carrying out supervisory functions. While in carrying out the management function of the Company, the Board of Directors were assisted by the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit and Investor Relation. The following are the Company's structure of Corporate Governance:

RUPS

RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perseroan. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perseroan dimata masyarakat dan para Pemegang Saham.

Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan.

GMS

GMS holds the highest power and authority in the Company. The authority of the GMS includes appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approving the amendment of the Articles of Association, approving the annual report and determining the form and amount of remuneration of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

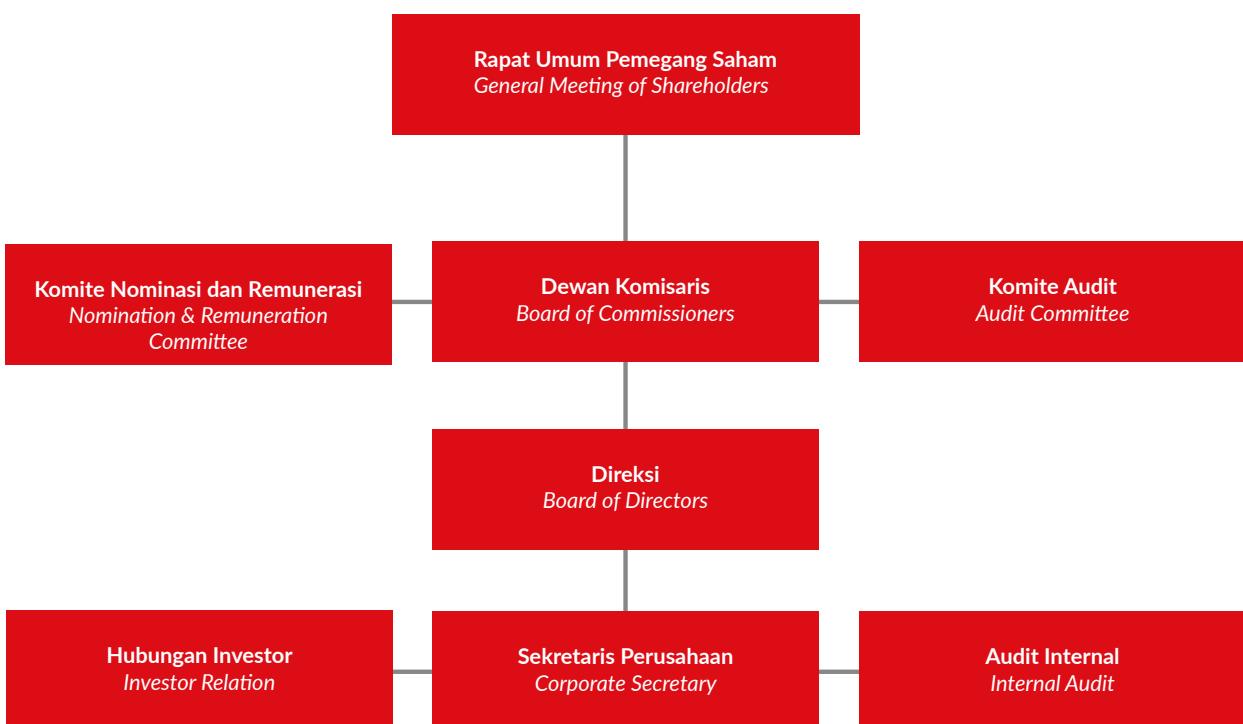
The Board of Commissioners

The Board of Commissioners is the Company's organ that represent Shareholders to perform the supervisory function on the implementation of the Company's policies and strategies conducted by the Board of Directors and to give directions/suggestions to the Board of Directors regarding the Company's management under a goodwill, carefulness and responsibility as well as to perform a function of strengthening the company's image to the public and Shareholders.

The Board of Directors

The Board of Directors is the Company's organ who is fully responsible on the Company's management by always taking notice the interests of the Shareholders and Stakeholders.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

RUPS merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. RUPS baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") maupun RUPS lainnya yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"). RUPS merupakan tempat bagi para Pemegang Saham untuk menggunakan hak, menjalankan wewenang, mengemukakan pendapat, memberikan suara serta mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan dan pengelolaan Perseroan.

GMS is an organ of the Company which has authority that not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits as stipulated in the applicable laws and regulations and the Articles of Association. GMS, the Annual General Meeting of the Shareholders ("AGMS") or other GMS called Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"). GMS is a forum for the Shareholders to exercise their rights, authorities, express opinions, give votings and decision making relating to the activities and management of the Company.

Wewenang RUPS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, RUPS memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku bersangkutan;
- Memberikan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan;
- Mengesahkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku, perhitungan laba rugi untuk tahun buku tersebut;
- Melakukan penunjukan atau memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk periode tahun berjalan;
- Mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menentukan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menyetujui penambahan modal dasar dan atau modal disetor dan ditempatkan;
- Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Memberikan persetujuan kegiatan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan;
- Memberikan persetujuan atas pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- Memberikan persetujuan atas aksi korporasi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyetujui transaksi material dan benturan kepentingan berdasarkan batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

GMS Authority

According to the Company's Articles of Association, GMS has the following authority:

- To approve the annual report and supervisory report of the Board of Commissioners for the fiscal year;
- To approve of the Company's profit;
- To ratify the Company's financial statements consist of the balance sheet of the end fiscal year, the calculation of profit and loss of the fiscal year;
- To appoint or give authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant for the following period;
- To appoint and/or dismiss the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners;
- Determine remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners;
- To approve additional authorised capital and/or issued and paid up capital;
- To ratify the amendment of Articles of Association;
- To approve the transactions of merger, consolidation, acquisition, disjunction, application of bankruptcy, extention period or liquidation of the Company's establishmment;
- Give approval to the transfer, disposal of rights or to make a debt guarantee in whole or in part with more than value 50% of the Company's net worth in one or more transactions, whether in relation to each other or not;
- To approve the Company's corporate actions under the prevailing laws and regulations;
- To approve the material transaction and conflicts of interest based on the authority limits as set forth in the laws and regulations.



Ketentuan Umum Dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Ketentuan umum penyelenggaraan RUPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK 10/2017").

Mekanisme penggunaan hak suara oleh para pemegang saham dalam RUPST ataupun RUPSLB telah diatur sedemikian rupa sehingga pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya secara langsung maupun melalui kuasanya.

RUPST diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPST, Dewan Komisaris dan Direksi mempresentasikan dan melaporkan hal-hal berikut:

1. Laporan Tahunan;
2. Rekomendasi penggunaan laba bersih Perseroan;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berjalan;
4. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS demi kepentingan Perseroan.

The General Provisions and Procedures for Holding General Meeting of Shareholders

General rule for holding a GMS refers to the Regulation of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) Number 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2018 on Planning and Holding a General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 32/2014") as amended in the Regulation of the Financial Services Authority No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 ("POJK 10/2017").

The mechanism of use of votes by the shareholders in AGMS and EGMS has been arranged in such a way that the shareholders can use their vote directly or through their representative.

AGMS is held at the latest 6 (six) months after the end of financial year. In the AGMS, Board of Commissioners and members of Board of Directors presenting the following:

1. Annual Report;
2. Recommendation on the use of net profit of the Company;
3. Appointment of Public Accountant Firm to perform audit on Company financial reporting for the current financial year;
4. Determination of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
5. Other matters that require approval from the shareholders in the GMS for the interest of the Company.

Tahapan Pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut :

Generally, the stages of convening a GMS are as follows:

Waktu Time	Kegiatan Activities
H-44	<p>Surat Pemberitahuan (Agenda) kepada OJK disampaikan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p> <p>Letter of notification (Agenda) to OJK within 5 working days prior to GMS Announcement, excluding the GMS announcement date.</p>
H-37	<p>Iklan Pengumuman RUPS Perseroan membuat pengumuman akan diadakannya RUPS melalui surat kabar, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan yang terbit sedikitnya 14 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan).</p> <p>GMS Announcement The Company must make an announcement on the plan to hold GMS via newspaper, IDX's website and the Company's website that is published at least 14 days prior to circulating the invitation of GMS (excluding the announcement date and the invitation date).</p>
H-29	Batas waktu penyampaian usulan Agenda RUPS oleh pemegang saham. Deadline to submit proposal of GMS agenda by shareholders.
H-23	Recording date para pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS. Recording Date of those who have the right to attend GMS.
H-22	<p>Iklan Pemanggilan RUPS Perseroan mengumumkan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham melalui surat kabar, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan yang terbit sedikitnya 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS)</p> <p>GMS Invitation The Company announces the GMS invitation to shareholders by putting an advert in newspaper, IDX's website and the Company's website that is published at least 21 days prior to the convening date of GMS (excluding the invitation date and the GMS date).</p>
H	RUPS GMS
H+2	<p>Pengumuman Hasil/Ringkasan Risalah RUPS Perseroan mengumumkan hasil ringkasan/risalah RUPS kepada masyarakat melalui surat kabar, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS. Perseroan menyampaikan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diumumkan.</p> <p>Announcement of GMS Result/GMS Minutes Summary. The Company announces the GMS result/GMS minutes summary to public by putting an advert in newspaper, IDX's website and the Company's website, not later than 2 working days after the GMS. The proof of announcement of the GMS result/GMS minutes summary must be submitted to OJK not later than 2 working days after the announcement is made.</p>
H+30	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK Submission of GMS Minutes to OJK

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham dan Proses Pengambilan Keputusan

Sebelum RUPS dimulai, para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham dibacakan tata tertib RUPS yang di dalamnya termuat proses pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemimpin/Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang sampai dengan 1 hari kerja sebelum pemanggilan rapat sampai dengan pukul 16.15 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan. Prosedurnya sebagai berikut:
 - Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan;
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon untuk mengangkat tangan dan Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami setelah diisi;
 - Pada formulir tersebut harus ditulis;
 - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya.
 - Jumlah Saham yang dimiliki dan pertanyaan yang akan diajukan.
6. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.
7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
8. Pengambilan Keputusan
 - Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - Mereka yang TIDAK SETUJU akan diminta mengangkat tangan;
 - Mereka yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;

The Order of General Meeting of Shareholders and the Decision Making Process

Before the GMS starts, the rules of GMS are read out to the Shareholders and proxies of Shareholders in which the following decision making process is contained:

1. The Meeting is held in Indonesian Language and chaired by a member of Company's Board of Commissioners.
2. The Leader/Chairman of the Meeting shall be entitled to ask those present to prove that they are authorized to attend this Meeting.
3. Those entitled to be present or represented in the Meeting shall be the Company's Shareholders up to 1 working day before the invitation meeting until 16.15 Western Indonesian Time, its names are recorded in the Company's Shareholder Register and in the Account Holder Register in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI (Indonesia Central Securities Depository).
4. All agenda of the Meeting was discussed uninterruptedly.
5. After discussing about the agenda of the Meeting, the Shareholders or its Proxies shall be given an opportunity to ask questions, give opinions, proposals, or suggestions related to the Meeting agenda discussed. The procedure is as follows:
 - Only Shareholders or its legitimate proxies may ask questions;
 - Shareholders or its Proxies that will ask questions are requested to raise their hands and our staff will hand out a form with questions that will have to be answered and handed back to our staff upon completion.
 - In the form, the followings should be written:
 - Name of individual or the institution represented.
 - Total shares owned and the question that will be asked.
6. The Chairman of the Meeting or a member of the Board of Directors appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to the questions.
7. Only the legitimate Shareholders or Proxies shall be entitled to vote.
8. Decision making:
 - Decision making is made by deliberations to achieve a consensus, if there are Shareholders or their Proxies who do not agree, the decisions will be taken by voting.
 - If voting is conducted, the voting shall be conducted orally by raising hands with the following Procedure:
 - Those who OBJECTION will be asked to raise their hands;
 - Those who are ABSTAIN will be asked to raise their hands;

- Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
9. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
10. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
11. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
12. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

- Those who do not raise their hands in the first stage and second stage shall be deemed to have given their approval to the proposal, therefore they are not going to be asked to raise their hand.

According to the provision of Article 14 paragraph 8 of Company's Articles of Association, ABSTAIN votes are deemed to be giving the same votes as the majority of Shareholders that give votes in the Meeting.

- The Chairman of the Meeting will ask the Notary to count the votes and announce the result of the voting.
 - For the Proxies who are given the authority by the Shareholders to issue OBJECTION votes or ABSTAIN votes, but during the decision making by the Chairman of the Meeting did not raise the hands to issue OBJECTION votes or ABSTAIN votes, they will be deemed to have agreed with the proposal.
9. One Share shall entitle the holder to issue one vote; if a Shareholder has more than one share, he/she will be asked to issue one vote only and the vote shall represent the total amount of his/her shares.
10. For Shareholders or their Proxies who come after registration is closed by the Stock Administration Bureau, though the Meeting is not opened the Shareholders or their Proxies shall not have the right to ask questions and shall not vote.
11. A minutes of meeting shall be drawn up for anything discussed and decided in this Meeting and it will be made in the form of a Deed of Minutes of Meeting drawn up by the Notary.
12. The Deed of Minutes of Meeting shall be a legal evidence for all Shareholders and third parties.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019

Annual General Meeting of Shareholders 2019

Pelaksanaan RUPST Tahun 2019 (RUPST 2019)

Perseroan mengadakan RUPST 2019 untuk tahun buku 2018 pada 26 April 2019, bertempat di Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPST 2019 memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan RUPST 2019

Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana dan agenda RUPST 2019 kepada OJK melalui surat No. SB-021/CSL-LN/RUPS/III/19 tanggal 13 Maret 2019.

2. Pengumuman RUPST 2019

Mengumumkan rencana RUPST 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Harian Investor Daily dan disampaikan kepada OJK melalui surat No. SB-027/CSL-LN/RUPS/III/19 tanggal 20 Maret 2019. Selain itu, diumumkan juga melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

3. Pemanggilan RUPST 2019

Mengumumkan rencana RUPST 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Harian Investor Daily dan disampaikan kepada OJK melalui surat No. SB-034/CSL-LN/RUPS/IV/19 tanggal 4 April 2019. Selain itu, diumumkan juga melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

4. Pengumuman Hasil/Ringkasan Risalah RUPST 2019

Mengumumkan ringkasan risalah RUPST 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Harian Investor Daily dan disampaikan kepada OJK melalui surat No. SB-047/CSL-LN/RUPS/IV/19 dan surat No. SB-048/CSL-LN/RUPS/IV/19 tanggal 30 April 2019. Selain itu, diumumkan juga melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

5. Penyampaian Risalah RUPST 2019

Menyampaikan Risalah RUPST 2019 kepada OJK melalui surat No. SB-071/CSL-LN/RUPS/V/19 tanggal 24 Mei 2019.

2019 AGMS Implementation (AGMS 2019)

The Company's AGMS 2019 for 2018 fiscal year held on April 26, 2019, at Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta.

Pursuant to the provision of Article 12 of Company's Articles of Association, the provisions of Article 81, Article 82 and Article 83 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017 on the Plan and Organizing of General Meetings of Shareholders of Public Companies, in AGMS 2019, the stages as follows:

1. AGMS 2019 Notice

Submit a notification on the AGMS 2019 plan and agenda to OJK by letter No. SB-021/CSL-LN/RUPS/III/19 dated March 13, 2019.

2. AGMS 2019 Announcement

Announcement of the AGMS 2019 plan through daily Indonesian language nationwide newspaper, Investor Daily and submitted to OJK by letter No. SB-027/CSL-LN/RUPS/III/19 dated March 20, 2019. In addition, it also announce in Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website.

3. AGMS 2019 Invitation

Announcement of the AGMS 2019 invitation through daily Indonesian language nationwide newspaper, Investor Daily and submitted to OJK by letter No. SB-034/CSL-LN/RUPS/IV/19 dated April 4, 2019. In addition, it also announce in the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website.

4. Announcement of The Result/Summary Minutes of the AGMS 2019

Announcement of the AGMS 2019 summary result through daily Indonesian language nation wide newspaper, Investor Daily and submitted to OJK by letter No. SB-047/CSL-LN/RUPS/IV/19 and letter No. SB-048/CSL-LN/RUPS/IV/19 dated April 30, 2019. In addition, it also announce in the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website.

5. Submission of the Minutes of the AGMS 2019

Submit the minutes of the AGMS 2019 to OJK by letter No. SB-071/CSL-LN/RUPS/V/19 dated May 24, 2019.

Agenda RUPST Tahun 2019

Pada RUPST 2019 terdapat 5 (lima) agenda rapat, sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kehadiran Manajemen Perseroan dalam RUPST 2019

The Company's Management Attendance in AGMS 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Manajemen Perseroan Company's Management
1. Bapak Ali Chendra Presiden Komisaris Mr. Ali Chendra President Commissioner	1. Bapak Marlo Budiman Presiden Direktur Mr. Marlo Budiman President Director	1. Bapak Agus Setiono Mr. Agus Setiono 2. Bapak Victor Indajang Mr. Victor Indajang 3. Bapak Sutrisno Budidharma Mr. Sutrisno Budidharma 4. Bapak Edward Sanusi Mr. Edward Sanusi 5. Ibu Ferliana Suminto Ms. Ferliana Suminto 6. Ibu Santiwati Basuki Ms. Santiwati Basuki 7. Ibu Fellianty Widjaja Ms. Fellianty Widjaja
2. Bapak Bintan Regen Saragih Komisaris Independen Mr. Bintan Regen Saragih Independent Commissioner	2. Bapak Henry Jani Liando Direktur Mr. Henry Jani Liando Director	

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institution and Professional

Notaris - Ibu Rini Yulianti, S.H	Notaris berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat berita acara dan membuat akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan RUPST 2019.
Notary - Ms. Rini Yulianti, S.H	Notary has duties as a party which responsible for preparing the minutes and deeds in connection with AGMS 2019.
Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia - Bapak Soeroto	BAE berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST 2019, melakukan penghitungan atas kuorum kehadiran dan kuorum atas setiap keputusan yang diambil dalam RUPST 2019.
Stock Administration Bureau PT Sharestar Indonesia - Mr. Soeroto	BAE has duties as a party which responsible to verified the Shareholders are entitled to attend the AGMS 2019, calculates the quorum of attendance and quorum for any decision taken in the AGMS 2019.
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan - Bapak Tjun Tjun	KAP berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang dimintakan pertanggungjawabannya pada RUPST 2019.
Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners - Mr. Tjun Tjun	KAP has duties as a party which responsible to the audit of the Company's Annual Financial Report which asked for the accountability in the AGMS 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pada RUPST 2019 dipimpin oleh Bapak Ali Chendra selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

RUPST 2019 dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya sebanyak 2.453.661.113 saham yang mewakili 84,359% dari 2.908.594.184 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 3.042.649.384 saham dengan jumlah saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak 134.055.200 saham.

Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat

Sewaktu membicarakan setiap agenda, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap agenda yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Sistem Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Perhitungan suara dan kuorum dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dimana masing-masing pemegang saham memiliki barcode kartu suara sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya yang kemudian dipindai secara elektronik oleh Biro Administrasi Efek dalam rangka penghitungan suara. Perhitungan suara dan kuorum disaksikan dan divalidasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pursuant to the provision of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a Member of Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. AGMS 2019 led by Mr. Ali Chendra as the Company's President Commissioner.

Shareholder Attendance Quorum

AGMS 2019 attended by the Shareholders and/or their proxies representing 2,453,661,113 shares or 84.359% of 2,908,594,184 shares which resulted from a reduction of the total number of shares issued or placed by the Company of 3,042,649,384 shares with total treasury stock of 134,055,200 shares.

Opportunity for Question and Opinion

Opportunity was granted to the shareholders and representatives of the shareholders to make inquiries or to express their opinions in respect of the subject matter of each agenda before held a vote on the matter of the agenda, however no question was raised nor any opinion expressed.

Resolution Making and Voting System

Resolution making mechanism shall based on the mutual for consensus. If mutual consensus failed to be reached, the resolution is taken by voting orally by asking to the shareholders and representatives of shareholders to raise their hands for those who voted for objection and abstain, whereas those who vote for affirmative were not asked to raise their hands. Abstained votes are considered giving the same voting as that of the majority shareholders who vote.

The vote and quorum count shall be assisted by the Stock Administration Bureau where each shareholder owns a barcode voting card in accordance with the portion of respective shares ownership which is then scanned by the Stock Administration Bureau in the voting counting session. The vote and quorum counting are witnessed and validated by a Notary appointed by the Company.

Keputusan Rapat

Tabel berikut merupakan hasil keputusan RUPST 2019, hasil voting dari total kehadiran, dan realisasi hasil keputusan:

The Resolution the Meeting

The following table is a result of the resolution of the AGMS 2019, the voting results of the total attendance, and the realization of the resolution:

AGENDA 1 | FIRST AGENDA

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Voting

Setuju : 2.453.661.113 saham.

Tidak Setuju : 0 saham.

Abstain : 47.500 saham.

Keputusan

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Realisasi

Langsung berlaku.

Approval of the Company's Annual Report for the year ended on December 31, 2018, and Approval on the Annual Accounts consist of Balance Sheet, Profit and Loss of the Company for the year ended on December 31, 2018, and to release and discharge (*acquit et de charge*) all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Voting Results

Affirmative : 2,453,661,113 shares.

Objection : 0 share.

Abstain : 47,500 shares.

Resolution

1. Accept and approve of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the book year ended on December 31, 2018, as well as work plans and the development of the Company.
2. Approval on the Annual Accounts consist of the Statement of Financial Position, Income Statement and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows and Notes to the Financial Statements of the Company for the book year ended on December 31, 2018, as well as the approval for full release and repaid in full (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the action and monitoring measures that have been carried out for the book year ended on December 31, 2018, as long as the action are reflected in the annual report and financial statements of the company.

Realization

Directly applies

AGENDA 2 | SECOND AGENDA

Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Hasil Voting

Setuju : 2.453.661.113 saham.

Tidak Setuju : 0 saham.

Abstain : 47.500 saham.

Keputusan

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp788.916.541.173,- (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas ratus lima ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai berikut:

- Menyetujui menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Menyetujui menetapkan pembagian dividen sebesar Rp673.863.259.191,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Mei 2019 pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar Rp.232,03 (dua ratus tiga puluh dua koma nol tiga rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 7 Mei 2019;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Mei 2019;
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 9 Mei 2019;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Mei 2019.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 29 Mei 2019.

Decision on Income Loss of the Company for year ended on December 31, 2018.

Voting Results

Affirmative : 2,453,661,113 shares.

Objection : 0 share.

Abstain : 47,500 shares.

Resolution

Approve to utilize the Current Year Net Profit for the financial year ended December 31, 2018 amounted Rp788,916,541,173,- (seven hundred eighty eight billion, nine hundred sixteen million five hundred forty one thousand one hundred seventy three rupiah) as follows:

- Approve to establish a provision for the reserve fund of the Company in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law amounting to Rp100,000,000,- (one hundred million rupiah).
- Approve to declare the final dividend amounting to Rp673,863,259,191,- (six hundred seventy three billion, eight hundred sixty three million, two hundred fifty nine thousand, one hundred ninety one rupiah), will be distributed to shareholders in the form of cash dividends, whose name is recorded on the Company's Shareholder Register on May 9, 2019 at 16.15 Western Indonesia Time ("Recording Date"), or amounting to Rp232.03 (two hundred thirty two point zero three rupiah) per share as of the date of this meeting, with due regard to the regulations of the Indonesia Stock Exchange on trading on the Indonesia Stock Exchange, with a note that for the Company's shares are in collective custody, the following provisions shall apply :
 - Cum Dividend at the Regular and Negotiation Market on May 7, 2019;
 - Ex Dividend at the Regular and Negotiation Market on May 8, 2019;
 - Cum Dividend at the Cash Market on May 9, 2019.
 - Ex Dividend at the Cash Market on May 10, 2019.

Payment of cash dividends to the shareholders who are entitled to be held at the latest on May 29, 2019.

3. Menyetujui menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.114.953.282.522,- (seratus empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi

Keputusan mengenai dana cadangan dan laba yang ditahan langsung berlaku. Pembagian dividen dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019.

3. Approve to declare the remainder of the current year's net profit for the financial year ended December 31, 2018 amounting to Rp114,953,282,522 (one hundred fourteen billion, nine hundred fifty three million, two hundred eighty two thousand, five hundred twenty two rupiah) be recorded as profit to be retained by the Company or retained earnings.
4. Approve to delegate the authority to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in connection with the dividend distribution in accordance with the applicable laws and regulations.

Realization

Resolution and the reserve fund and retained earnings directly applies. Dividend was distributed on May 29, 2019.

AGENDA 3 | THIRD AGENDA

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

Hasil Voting

Setuju : 2.392.418.769 saham.
Tidak Setuju : 61.242.344 saham.
Abstain : 47.500 saham.

Keputusan

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Realisasi

Telah ditindaklanjuti dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan surat Perseroan kepada OJK No. SB-066/CSL-LN/OJK/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

Appointment of Public Accountant Firm to audit Company's financial books for the 2019 financial year and delegation of authority to the Board of Directors of the Company in determining its honorarium other requirement on its appointment.

Voting Results

Affirmative : 2,392,418,769 shares.
Objection : 61,242,344 shares.
Abstain : 47,500 shares.

Resolution

1. Approve to appoint the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner as the public accounting firm registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) to audit the Statement of Financial Position, Income Statement and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows and Notes to the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2019 and authorize the Board of Directors to determine the remuneration of the Public Accounting Firm and other terms of appointment.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint another public accounting firm that will audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2019, in the case of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner can not perform their duties for any reason. The appointment of such other public accounting firm shall comply with the terms and conditions under applicable regulations.

Realization

Has been followed up with the appointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner in accordance with the Company's letter to OJK No. SB-066/CSL-LN/OJK/V/2019 dated May 13, 2019.

FIRSTMEDIA X

GA PERNAH KETINGGALAN TONTONAN FAVORITMU. KAPANPUN, DIMANAPUN

DOWNLOAD SEKARANG

CUSTOMER SERVICE 1500 595

A JOURNEY OF TOGETHERNESS

www.firstmedia.com

[FirstMediaWorld](#) [@FirstMediaCare](#) [@FirstMediaWorld](#) [Chat: +62 21 259 9606](#)

PREFACE
Pendahuluan

FINANCIAL &
PERFORMANCE
HIGHLIGHT
Ikhtisar Kinerja Keuangan
& Performa Usaha

MANAGEMENT
REPORT
Laporan
Manajemen

COMPANY
PROFILE
Profil
Perusahaan

MANAGEMENT
DISCUSSION AND
ANALYSIS
Analisa Dan
Pembahasan Manajemen

CORPORATE
GOVERNANCE
Tata Kelola
Perusahaan

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

CROSS REFERENCES
SEJIK 30-2016
Referensi Sjiang
SEOJK 30-2016

AGENDA 4 | FOURTH AGENDA

Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Voting

Setuju : 2.327.076.857 saham.
Tidak Setuju : 126.584.256 saham.
Abstain : 47.500 saham.

Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Henry Riady dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Bapak Suvir Varma dari jabatannya selaku Direktur Independen dan Bapak Ali Chendra dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Poon Sui Meng (Desmond Poon) selaku Direktur Perseroan, Bapak Suvir Varma selaku Komisaris Perseroan dan menetapkan Bapak Jonathan Limbong Parapak yang semula Komisaris Independen menjadi Presiden Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Determination of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and their honorarium, allowance, salary, and/or other remuneration.

Voting Result

Affirmative : 2,327,076,857 shares.
Objection : 126,584,256 shares.
Abstain : 47,500 shares.

Resolution

1. Approve the resignation of Mr. Henry Riady from his position as Director of the Company, Mr. Suvir Varma from his position as Independent Director and Mr. Ali Chendra from his position as President Commissioner, effective from the closing date of this Meeting and give the exemption and repayment (*acquit et de charge*) for management in 2018 until the closing of this Meeting, to the extent these actions are reflected in the Company's financial statements.
2. Approve the appointment of Mr. Poon Sui Meng (Desmond Poon) as Director of the Company, Mr. Suvir Varma as Commissioner of the Company, and determined Mr. Jonathan Limbong Parapak previously as Independent Commissioner become President Commissioner of the Company starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year of 2019 that would be held on 2020.
3. in relation to the resolution stated in number 1 and 2 above, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for financial year of 2019 that would be held on 2020 are as follows:

Direksi

Board of Directors

Presiden Direktur President Director	Marlo Budiman
--	---------------

Direktur Director	Henry Jani Liando
---------------------	-------------------

Direktur Director	Wonbae Lee
---------------------	------------

Direktur Director	Andy Nugroho Purwohardono
---------------------	---------------------------

Direktur Director	Poon Sui Meng (Desmond Poon)
---------------------	------------------------------

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	Jonathan Limbong Parapak
--	--------------------------

Komisaris Independen Independent Commissioner	Bintan Regen Saragih
---	----------------------

Komisaris Commissioner	Sigit Prasetya
--------------------------	----------------

Komisaris Commissioner	Suvir Varma
--------------------------	-------------

Komisaris Commisioner	Edward Daniel Horowitz
-------------------------	------------------------



4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Realisasi

Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris langsung berlaku dan penetapan jumlah honorarium Direksi dan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti.

4. Giving authority and power of attorney with right of substitution to Board of Directors of the Company and/or Mr. Marlo Budiman and/or Mr. Andy Nugroho Purwohardono to take any necessary action in connection with the above mentioned resolution, including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and report to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws, to register the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company Register and to submit as well as sign all the application and or necessary documents without being excluded in accordance with the prevailing laws.
5. Approve to give authority to the Company's President Commissioner to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company.

Realization

Determination of the Board of Directors and the Board of Commissioners directly applies and determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners has been followed up.

CROSS REFERENCES SEOJK 30-2016 Referensi Sijang SEOJK 30-2016	CORPORATE GOVERNANCE Tata Kelola Perusahaan	COMPANY PROFILE Profil Perusahaan	MANAGEMENT REPORT Laporan Manajemen	FINANCIAL & PERFORMANCE HIGHLIGHT Ikhtisar Kinerja Keuangan & Performa Usaha	PREFACE Pendahuluan
					MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS Analisa Dan Pembahasan Manajemen

AGENDA 5 | FIFTH AGENDA

Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Voting

Setuju : 1.932.171.458 saham.

Tidak Setuju : 521.489.655 saham.

Abstain : 2.979.779 saham.

Keputusan

- Menyetujui untuk menyesuaikan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2017, sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3

- Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta aktivitas *call centre*.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Kegiatan Usaha Utama,yaitu:
 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel.
 - Internet Service Provider* (Jasa Akses Internet).
 - Jasa Sistem Komunikasi.
 - Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
 - Jasa Multimedia Lainnya.
 - Kegiatan Usaha Penunjang,yaitu:
 - Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya.
 - Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
 - Aktivitas *Call Centre*.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya meminta persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi

Langsung berlaku setelah disetujui perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Approval of plans to amend the Company's Articles of Association

Voting Results

Affirmative : 1,932,171,458 shares.

Objection : 521,489,655 shares.

Abstain : 2,979,779 shares.

Resolution

- Approval to adjust the Company's business activities code based on the KBLI 2017 and therefore approve to the changes in Article 3 of the Company's Article of Association as follows:

Purposes, Objectives And Business Activities Article 3

- The purposes and objectives of the Company are strives in the business of telecommunication activities by cable, internet service provider, communication system services, network access point services, other multimedia services, telephony value added services, internet telephony service for public, other management consultancy activities and call centre activities.
- In order to achieve the purposes and objectives abovementioned, the Company may engage in the business as follows:
 - Main Business Activities are:
 - Telecommunication activities with Cable.
 - Internet Service Provider.
 - Communication System Service.
 - Network Access Point Services.
 - Other Multimedia Services.
 - Supporting Business Activities are:
 - Telephony Value Added Services.
 - Internet Telephony Services for Public.
 - Other Management Consultancy Services.
 - Call Centre Activities.
- Approval to the granting of authority and proxy with the substitution rights to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Marlo Budiman and/or Mr. Andy Nugroho Purwohardono to perform all actions related to the changes of the Company's Article of Association, including but not limited to restates the decision in Notarial deed, and seek an approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the regulations applicable legislation, and to file and sign all requests and or other necessary documents without being excluded in accordance with the applicable laws and regulations.

Realization

Directly applies after the changes of the Articles of Association obtained an approval the Ministry of Law and Human Rights.

CATCHPLAY

FIRST SQUAD | FIRST MEDIA

SENSASI BIOSKOP DI RUMAH

NONTON UNLIMITED BLOCKBUSTER MOVIES TANPA BUFFERING & TAKUT KUOTA HABIS



EKSKLUSIF BAGI PELANGGAN FIRST MEDIA & CATCHPLAY

(Paket Supreme, Maxima, Ultimate & Infinite)

DAPATKAN GRATIS
1 TIKET NONTON FILM
SINGLE RENTAL DENGAN
LOGIN KE CATCHPLAY*

*Dapat pertama kali login

COMING SOON MOVIE ON CATCHPLAY


*Syarat dan ketentuan berlaku

CUSTOMER SERVICE:

1500 595

www.firstmedia.com

FirstMediaWorld @FirstMediaWorld | @FirstMediaCare @FirstMediaWorld

PREFACE
Pendahuluan

FINANCIAL &
PERFORMANCE
HIGHLIGHT
Ikhtisar Kinerja Keuangan
& Performa Usaha

MANAGEMENT
REPORT
Laporan
Manajemen

COMPANY
PROFILE
Profil
Perusahaan

MANAGEMENT
DISCUSSION AND
ANALYSIS
Analisa Dan
Pembahasan Manajemen

CORPORATE
GOVERNANCE
Tata Kelola
Perusahaan

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

CROSS REFERENCES
SEOJK 30-2016
Referensi Sijang
SEOJK 30-2016

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2019

Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019

Pelaksanaan RUPSLB Tahun 2019 (RUPSLB 2019)

Perseroan mengadakan RUPSLB 2019 pada 29 Agustus 2019, bertempat di Ruang Monas 1, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPSLB 2019 memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan RUPSLB 2019

Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana dan agenda RUPSLB 2019 kepada OJK melalui surat No. SB-090/CSL-LN/RUPS/VII/19 tanggal 16 Juli 2019.

2. Pengumuman RUPSLB 2019

Mengumumkan rencana RUPSLB 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Harian Investor Daily dan disampaikan kepada OJK melalui surat No. SB-094/CSL-LN/RUPS/VII/19 tanggal 23 Juli 2019. Selain itu, diumumkan juga melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

3. Pemanggilan RUPSLB 2019

Mengumumkan rencana RUPSLB 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Harian Investor Daily dan disampaikan kepada OJK melalui surat SB-100/CSL-LN/RUPS/VIII/19 tanggal 7 Agustus 2019. Selain itu, diumumkan juga melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

4. Pengumuman Hasil/Ringkasan Risalah RUPSLB 2019

Mengumumkan ringkasan risalah RUPSLB 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Harian Investor Daily dan disampaikan kepada OJK melalui surat No. SB-123/CSL-LN/RUPS/IX/19 dan surat No. SB-124/CSL-LN/RUPS/IX/19 tanggal 2 September 2019. Selain itu, diumumkan juga melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

5. Penyampaian Risalah RUPSLB 2019

Menyampaikan Risalah RUPSLB 2019 kepada OJK melalui surat No. SB-135/CSL-LN/RUPS/IX/19 tanggal 27 September 2019.

2019 EGMS Implementation (EGMS 2019)

The Company's EGMS 2019 held on August 29, 2019, at Ruang Monas 1, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta.

Pursuant to the provision of Article 12 of Company's Articles of Association, the provisions of Article 81, Article 82 and Article 83 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017 on the Plan and Organizing of General Meetings of Shareholders of Public Companies, in EGMS 2019, the stages as follows:

1. EGMS 2019 Notice

Submit a notification on the EGMS 2019 plan and agenda to OJK by letter No. SB-090/CSL-LN/RUPS/VII/19 dated July 16, 2019.

2. EGMS 2019 Announcement

Announcement of the EGMS 2019 plan through daily Indonesian language nationwide newspaper, Investor Daily and submitted to OJK by letter No. SB-094/CSL-LN/RUPS/VII/19 dated July 23, 2019. In addition, it also announce in Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website.

3. EGMS 2019 Invitation

Announcement of the EGMS 2019 invitation through daily Indonesian language nationwide newspaper, Investor Daily and submitted to OJK by letter No. SB-100/CSL-LN/RUPS/VIII/19 dated August 7, 2019. In addition, it also announce in the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website.

4. Announcement of The Result/Summary Minutes of the EGMS 2019

Announcement of the EGMS 2019 summary result through daily Indonesian language nation wide newspaper, Investor Daily and submitted to OJK by letter No. SB-123/CSL-LN/RUPS/IX/19 and letter No. SB-124/CSL-LN/RUPS/IX/19 dated September 2, 2019. In addition, it also announce in the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website.

5. Submission of the Minutes of the EGMS 2019

Submit the minutes of the EGMS 2019 to OJK by letter No. SB-135/CSL-LN/RUPS/IX/19 dated September 27, 2019.



Agenda RUPSLB 2019

Agenda RUPSLB 2019 terdapat 3 (tiga) agenda rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha Perseroan;
2. Persetujuan atas pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*saham Treasury*).
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda of the EGMS 2019

In the EGMS 2019 there are 3 (three) agendas, as follows:

1. Approval of the Company's plan to expand the Company's business activities;
2. Approval of the reduction in the Company's issued and paid up capital by means of withdrawal from shares that have been repurchased by the Company (Treasury Stock).
3. Approval of the Company's plan to buyback the Company's shares in accordance with the applicable laws and regulations.

Kehadiran Manajemen Perseroan dalam RUPSLB 2019
The Company's Management Attendance in EGMS 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Manajemen Perseroan Company's Management
Bapak Bintan Regen Saragih Komisaris Independen	Bapak Marlo Budiman. Presiden Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Agus Setiono Mr. Agus Setiono 2. Bapak Victor Indajang Mr. Victor Indajang 3. Bapak Agung Satyawiguna Mr. Agung Satyawiguna 4. Bapak Johannes Mr. Johannes 5. Bapak Lim Benni Mr. Lim Benni 6. Ibu Ferliana Suminto Ms. Ferliana Suminto 7. Ibu Fellianty Widjaja Ms. Fellianty Widjaja
Mr. Bintan Regen Saragih Independent Commissioner	Mr. Marlo Budiman President Director	

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institution and Professional

Notaris - Ibu Rini Yulianti, S.H.
Notary - Ms. Rini Yulianti, S.H.

Notaris berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat berita acara dan membuat akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan RUPSLB 2019.
 Notary has duties as a party which responsible for preparing the minutes and deeds in connection with EGMS 2019.

Biro Administrasi Efek
 PT Sharestar Indonesia - Bapak Soeroto

BAE berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB 2019, melakukan penghitungan atas kuorum kehadiran dan kuorum atas setiap keputusan yang diambil dalam RUPSLB 2019

Stock Administration Bureau
 PT Sharestar Indonesia - Mr. Soeroto

BAE has duties as a party which responsible to verified the Shareholders are entitled to attend the EGMS 2019, calculates the quorum of attendance and quorum for any decision taken in the EGMS 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pada RUPSLB 2019 dipimpin oleh Bapak Bintan Regen Saragih selaku Komisaris Independen Perseroan.

Pursuant to the provision of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a Member of Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. EGMS 2019 led by Mr. Bintan Regen Saragih as the Company's Independent Commissioner.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB 2019 dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya sebanyak 2.560.020.757 saham yang mewakili 89,1252% dari 2.872.387.184 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 2.911.741.084 saham dengan jumlah saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak 39.353.900 saham.

Shareholder Attendance Quorum

EGMS 2019 attended by the Shareholders and/or their proxies representing 2,560,020,757 shares or 89.1252% of 2,872,387,184 shares which resulted from a reduction of the total number of shares issued or placed by the Company of 2,911,741,084 shares with total treasury stock of 39,353,900 shares.

Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat

Sewaktu membicarakan setiap agenda, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap agenda yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Ada seorang pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 700 saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Rapat Kedua dan Ketiga, dimana pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.

Opportunity for Question and Opinion

Opportunity was granted to the shareholders and representatives of the shareholders to make inquiries or to express their opinions in respect of the subject matter of each agenda before held a vote on the matter of the agenda. There was one shareholder with the ownership of 700 shares that raised question in Second and Third Agenda of the Meeting, which the questions have been well answered by the Board of Directors of the Company.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Sistem Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Resolution Making and Voting System

Resolution making mechanism shall based on the mutual for consensus. If mutual consensus failed to be reached, the resolution is taken by voting orally by asking to the shareholders and representatives of shareholders to raise their hands for those who voted for objection and abstain, whereas those who vote for affirmative were not asked to raise their hands. Abstained votes are considered giving the same voting as that of the majority shareholders who vote.

Perhitungan suara dan kuorum dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dimana masing-masing pemegang saham memiliki barcode kartu suara sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya yang kemudian dipindai secara elektronik oleh Biro Administrasi Efek dalam rangka penghitungan suara. Perhitungan suara dan kuorum disaksikan dan divalidasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan.

Keputusan Rapat

Tabel berikut merupakan hasil keputusan RUPSLB 2019, hasil voting dari total kehadiran, dan realisasi hasil keputusan:

The vote and quorum count shall be assisted by the Stock Administration Bureau where each shareholder owns a barcode voting card in accordance with the portion of respective shares ownership which is then scanned by the Stock Administration Bureau in the voting counting session. The vote and quorum counting are witnessed and validated by a Notary appointed by the Company.

The Resolution the Meeting

The following table is a result of the resolution of the EGMS 2019, the voting results of the total attendance, and the realization of the resolution:

AGENDA 1 | FIRST AGENDA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha Perseroan.

Hasil Voting

Suara Setuju: 2.445.190.100 saham.
 Suara Tidak Setuju: 114.830.657 saham.
 Suara Abstain: 703.700 saham.

Keputusan

- Menyetujui rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha Perseroan dan menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3

- Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas *call centre*, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar berbagai macam barang, instalasi telekomunikasi, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya dan aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - Kegiatan Usaha Utama,yaitu:
 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel.
 - Internet Service Provider* (Jasa Akses Internet).
 - Jasa Sistem Komunikasi.
 - Jasa Interkoneksi Internet (NAP).
 - Jasa Multimedia Lainnya.

Approval of the Company's plan to adding the Company's business activities.

Voting Results

Affirmative: 2,445,190,100 shares.
 Objection: 114,830,657 shares.
 Abstain: 703,700 shares.

Resolution

- Approve the Company's plan to expand Company's business activities and therefore approve the changes in Article 3 of the Company's Article of Association as follows:

Purposes, Objectives And Business Activities Article 3

- The purposes and objectives of the Company are strives in the business of telecommunication activities by cable, internet service provider, communication system services, network access point services (NAP), other multimedia services, telephony value added services, internet telephony services for public (ITKP), management consultancy activities, call center activities, wholesale on a fee or contract basis, wholesale of computer and computer equipment, wholesale of software, wholesale of telecommunication equipment, wholesale of various goods, telecommunication installation, other computer programming activities, computer consultancy activities and other computer facilities management and other computer service and information technology activities.
- In order to achieve the purposes and objectives above mentioned, the Company may engage in the business as follows:
 - Main Business Activities are:
 - Telecommunication activities with Cable.
 - Internet Service Provider.
 - Communication System Service.
 - Network Access Point Services (NAP).
 - Other Multimedia Services.

2. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:
 - Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya.
 - Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
 - Aktivitas Call Centre.
 - Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau kontrak.
 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.
 - Perdagangan Besar Piranti Lunak.
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.
 - Instalasi Telekomunikasi.
 - Aktivitas Pemrograman Komputer lainnya.
 - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya.
 - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya meminta persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
2. Supporting Business Activities are:
 - Telephony Value Added Services.
 - Internet Telephony Services for Public.
 - Other Management Consultancy Services.
 - Call Centre Activities.
 - Wholesale on a fee or contract basis.
 - Wholesale of computers and computer equipment,
 - Wholesale of software,
 - Wholesale of telecommunications equipment,
 - Wholesale of various goods,
 - Telecommunications installations,
 - Other computer programming activities.
 - Computer consultancy activities and others computer facilities management.
 - Other computer services and information technology activities.
2. Giving authority and power of attorney with right of substitution to Board of Directors of the Company and/or Mr. Marlo Budiman to take any necessary action in connection with the above mentioned resolution, including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and report to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws, to register the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company Register and to submit as well as sign all the application and or necessary documents without being excluded in accordance with the prevailing laws.

Realisasi

Langsung berlaku setelah disetujui perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Realization

Directly applies after the changes of the Articles of Association obtained an approval the Ministry of Law and Human Rights.

AGENDA 2 | SECOND AGENDA

Persetujuan atas pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (saham *treasury*).

Hasil Voting

Suara Setuju : 2.444.059.300 saham.
 Suara Tidak Setuju : 115.961.457 saham.
 Suara Abstain : 703.700 saham.

Keputusan

- Menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (saham *treasury*) sejumlah 48.545.600 (empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus) saham sehingga untuk selanjutnya modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sejumlah 2.863.195.484 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) saham dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL Pasal 4

- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 35,61% (tiga puluh lima koma enam satu persen) atau sejumlah 2.863.195.484 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 286.319.548.400,- (dua ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya meminta persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Realisasi

Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Approval the reduction of issued and paid-up capital of the Company by share withdrawal which derives from the buyback shares of the Company (treasury stock).

Voting Results

Affirmative : 2,444,059,300 shares.
 Objection : 115,961,457 shares.
 Abstain : 703,700 shares.

Resolution

- Approve the reduction of issued and paid-up capital of the Company by share withdrawal which derives from the buyback shares of the Company (treasury stock) with an amount of 48,545,600 (forty eight million five hundred forty five thousand six hundred) shares, therefore the issued and paid-up capital of the Company will become 2,863,195,484 (two billion eight hundred sixty three million one hundred ninety five thousand four hundred eighty four) shares and approve the change of Article 4 point 2 of the Article of Association of the Company become as follows:

CAPITAL Article 4

- From the authorized capital, it has been issued and paid-up for 35.61% (thirty five point six one percent) or with an amount of 2,863,195,484 (two billion eight hundred sixty three million one hundred ninety five thousand four hundred eighty four) shares with a nominal value of Rp 286,319,548,400,- (two hundred eighty six billion three hundred nineteen million five hundred forty eight thousand four hundred Rupiah) by the shareholders with the details and nominal stated in the section before the end of this deed.
- Giving authority and power of attorney with right of substitution to Board of Directors of the Company and/or Mr. Marlo Budiman to take any necessary action in connection with the above mentioned resolution, including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and report to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws, to register the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company Register and to submit as well as sign all the application and or necessary documents without being excluded in accordance with the prevailing laws.

Realization

Effective after obtaining approval from the Ministry of Law and Human Rights.

AGENDA 3 | THIRD AGENDA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Voting

Suara Setuju : 2.560.020.757 saham.

Suara Tidak Setuju : 0 saham.

Suara Abstain : 0 saham.

Keputusan

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 211.173.546 (dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam) saham atau mewakili 7,38% (tujuh koma tiga delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah dilakukannya pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (Saham Treasury), termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Realisasi

Pembelian kembali saham akan dilaksanakan setelah pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Approval of the Company's plan to buyback the Company's shares in accordance with the applicable laws and regulations.

Voting Results

Affirmative : 2,560,020,757 shares.

Objection: 0 share.

Abstain: 0 share.

Resolution

1. Approve the shares buyback of the Company with a maximum amount of 211,173,546 (two hundred eleven million one hundred seventy three thousand five hundred forty six) shares or 7.38% (seven point three eight percent) from the issued and paid-up capital of the Company after the reduction of issued and paid-up capital of the Company by share withdrawal which derives from the buyback shares of the Company, including the other matters relating to the shares buyback of the Company.
2. To grant authority and proxy to the Board of Directors and/or Commissioners to perform all actions necessary in connection with the implementation of the shares buyback of the Company.

Realization

Share buyback will be executed after the deduction of issued and paid up capital of the Company approved by the Ministry of Law and Human Rights.

FIRST
MEDIA

TV GUIDE

INDONESIA'S PREMIER ENTERTAINMENT
AND TV GUIDE MAGAZINE



06

2019

PREFACE
Pendahuluan

FINANCIAL &
PERFORMANCE
HIGHLIGHT
Ikhtisar Kinerja Keuangan
& Performa Usaha

MANAGEMENT
REPORT
Laporan
Manajemen

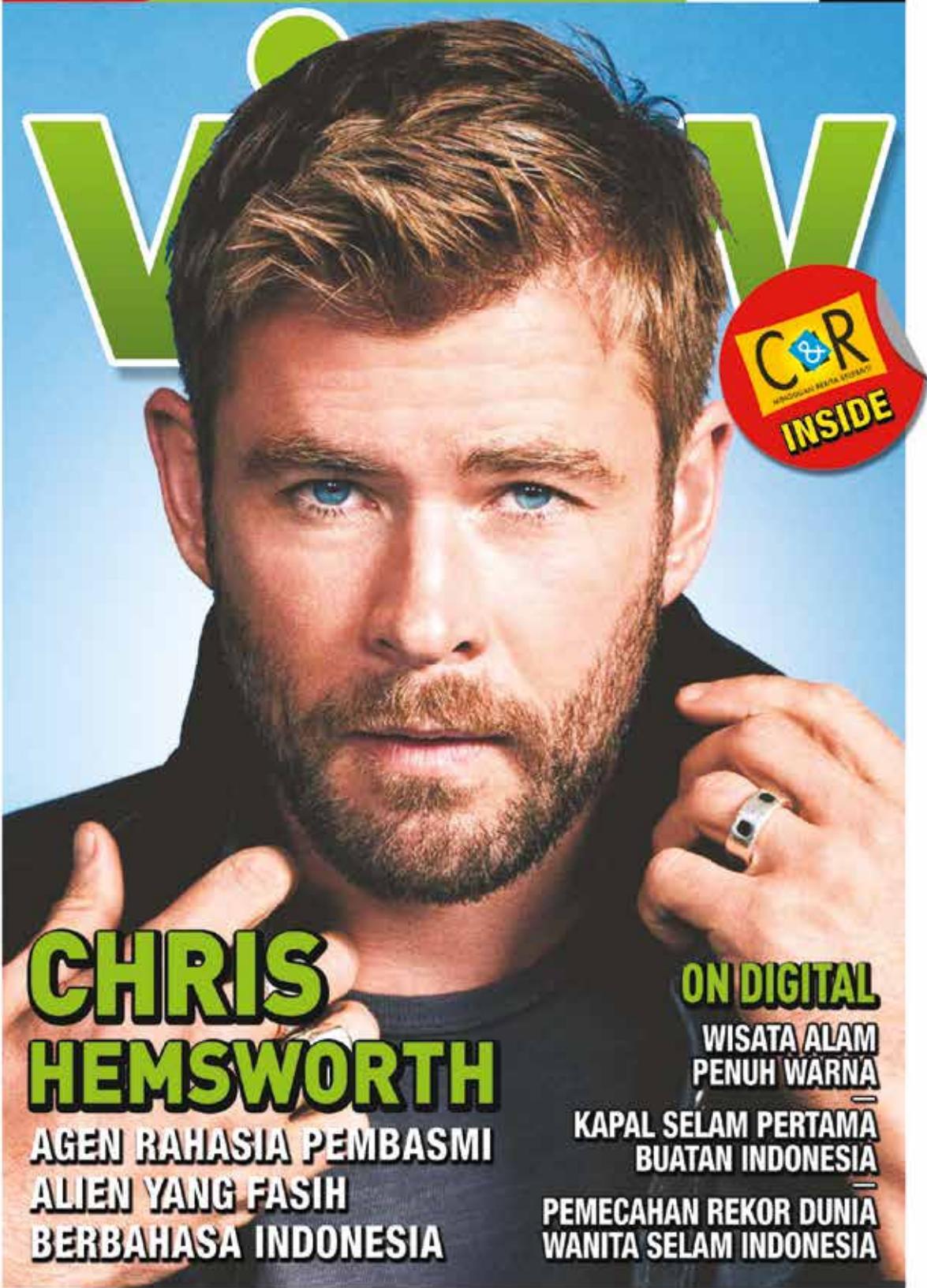
COMPANY
PROFILE
Profil
Perusahaan

MANAGEMENT
DISCUSSION AND
ANALYSIS
Analisa Dan
Pembahasan Manajemen

CORPORATE
GOVERNANCE
Tata Kelola
Perusahaan

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

CROSS REFERENCES
SEJIK 30-2016
Referensi Sjang
SEOJK 30-2016



CHRIS HEMSWORTH

AGEN RAHASIA PEMBASMI ALIEN YANG FASIH BERBAHASA INDONESIA

ON DIGITAL

WISATA ALAM PUHU WARNA

KAPAL SELAM PERTAMA BUATAN INDONESIA

PEMECAHAN REKOR DUNIA WANITA SELAM INDONESIA

VIEW

C&R
INSIDE

REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Previous Year GMS Decision Realization

Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Sebagai perbandingan, berikut disampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tahun sebelumnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 (RUPSLB 2018), Kamis 12 April 2018 (RUPST), dan Kamis tanggal 20 Desember 2018 (RUPSLB) beserta hasil voting dari total kehadiran dan realisasi hasil keputusan RUPST dan RUPSLB 2018 tersebut:

RUPSLB | EGMS
15 Januari 2018 | January 15, 2018

Agenda Pertama

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (5) butir c dan Pasal 21 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Pasal 4 ayat (5) butir c:**
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - Pasal 21 ayat (11):**
Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi

Langsung berlaku setelah diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil voting

Setuju: 2.290.262.873 saham.
Suara Tidak Setuju: 491.739.772 saham.
Suara Abstain: 61.154.471 saham.

Previous Year GMS Decisions Realization

For comparison, here is the decision of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) and Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in the previous year which was held on Monday, January 15, 2018 (EGMS 2018), Thursday, April 12, 2018 (AGMS), and Thursday, December 20, 2018 (EGMS), with the results of voting of the total attendance and the realization of the decision of the AGMS and EGMS 2018:

First Agenda

- Approval to the changes in Article 4 paragraph (5) point c and Article 21 paragraph (11) of the Company's Article of Association as follows:
 - Article 4 paragraph (5) point c:**
The Rights Issue shall be transferable and marketable within the period stipulated under capital market laws and regulations.
 - Article 21 paragraph (11):**
The Company must publish the Balance Sheet and the Income Statement in an Indonesian language newspaper with national circulation in accordance with the procedures set under the capital market laws and regulations.
- Approval for the granting of authority and proxy with the substitution rights to the Board of Directors of the Company to perform all actions related to the changes of the Company's Article of Association, including but not limited to restates the decision in Notarial deed, and further notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the applicable laws and regulations, and to file and sign all requests and or other necessary documents without being excluded in accordance with the applicable laws and regulations.

Realization

Directly applies after the changes of the Article of Association has been received by the Ministry of Law and Human Rights.

Voting results :

Affirmative : 2,290,262,873 shares.
Objection : 491,739,772 shares.
Abstain : 61,154,471 shares.

Agenda Kedua

- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7,1% (tujuh koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 216.028.106 (dua ratus enam belas juta dua puluh delapan ribu seratus enam) saham, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Realisasi

Langsung berlaku.

Hasil voting :

Suara Setuju: 2.782.002.645 saham.
Suara Tidak Setuju: 0 saham.
Suara Abstain: 5.944.700 saham.

Second Agenda

- Approval to the Company's plan to shares buyback of the Company amounting to 7.1% of the issued and paid-up capital of the Company or maximum of 216,028,106 shares, including such other action that may be required in connection with the shares buyback.
- To grant authority and proxy to the Board of Directors and/or Commissioners to perform all actions necessary in connection with the implementation of the shares buyback of the Company.

Realization

Directly applies.

Voting results :

Affirmative: 2,782,002,645 shares.
Objection: 0 share.
Abstain: 5,944,700 shares.

RUPST | AGMS 12 April 2018 | April 12, 2018

Agenda Pertama

- Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
- Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Realisasi

Langsung berlaku.

Hasil voting

Suara Setuju : 2.757.348.041 saham.
Suara Tidak Setuju : 0 saham.
Suara Abstain : 599.900 saham.

First Agenda

- Accept and approve of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the book year ended on December 31, 2017, as well as work plans and the development of the Company.
- Approval on the Annual Accounts consist of the Statement of Financial Position, Income Statement and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows and Notes to the Financial Statements of the Company for the book year ended on December 31, 2017, as well as the approval for full release and repaid in full (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the action and monitoring measures that have been carried out for the book year ended on December 31, 2017, as long as the action are reflected in the annual report and financial statements of the Company.

Realization

Directly applies.

Voting results

Affirmative : 2,757,348,041 shares.
Objection : 0 share.
Abstain : 599,900 shares

Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.007.278.091.447,- (satu triliun tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

1. Menyetujui menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Menyetujui menetapkan pembagian dividen final sebesar Rp503.594.117.093,76 (lima ratus tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu sembilan puluh tiga koma tujuh enam rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp353.600.564.405,76 (tiga ratus lima puluh tiga miliar enam ratus juta lima ratus enam puluh empat ribu ratus lima koma tujuh enam rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp119,64 (seratus sembilan belas koma enam empat rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2018 pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 19 April 2018;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 20 April 2018;
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 24 April 2018;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 25 April 2018.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 15 Mei 2018.

- b. Sebesar Rp149.993.552.688,- (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagai dividen interim, telah dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp50,75 (lima puluh koma tujuh lima rupiah) per saham pada tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: SK-001/LN/XII/17 tanggal 15 Desember 2017.

Second Agenda

Approve to utilize the Current Year Net Profit for the financial year ended December 31, 2017 amounted Rp1,007,278,091,447 (one trillion and seven billion, two hundred seventy eight million and ninety one thousand four hundred forty seven rupiah) as follows:

1. Approve to establish a provision for the reserve fund of the Company in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law amounting to Rp100,000,000,- (one hundred million rupiah).
2. Approve to declare the final dividend amounting to Rp503,594,117,093.76 (five hundred and three billion, five hundred ninety four million one hundred and seventeen thousand ninety three point seven six rupiah), with the following condition:
 - a. Rp353,600,564,405.76 (three hundred and fifty three billion, six hundred million and five hundred sixty four thousand four hundred and five point seven six rupiah), will be distributed to shareholders in the form of cash dividends amounting to Rp119.64 per share, whose name is recorded on the Company's Shareholder Register on April 24, 2018 at 16.15 Western Indonesia Time ("Recording Date"), with due regard to the regulations of the Indonesia Stock Exchange on trading on the Indonesia Stock Exchange, with a note that for the Company's shares are in collective custody, the following provisions shall apply:
 - Cum Dividend at the Regular and Negotiation Market on April 19, 2018;
 - Ex Dividend at the Regular and Negotiation Market on April 20, 2018;
 - Cum Dividend at the Cash Market on April 24, 2018;
 - Ex Dividend at the Cash Market on April 25, 2018.

Payment of cash dividends to the shareholders who are entitled to be held at the latest on May 15, 2018.

- b. Rp149,993,552,688,- (one hundred forty nine billion, nine hundred and ninety three million five hundred fifty two thousand six hundred and eighty eight rupiah) as interim Dividend, has been distributed to shareholders in the form of cash dividends amounting to Rp50.75 per share on January 15, 2018 based on a decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number: SK-001/LN/XII/17 dated December 15, 2017.

3. Menyetujui menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp503.583.974.353,24 (lima ratus tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga ratus sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga koma dua empat rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi

Keputusan mengenai dana cadangan dan laba yang ditahan langsung berlaku. Pembagian dividen dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018.

Hasil voting

Suara Setuju: 2.757.348.041 saham.

Suara Tidak Setuju: 0 saham.

Suara Abstain: 0 saham.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Realisasi

Telah ditindaklanjuti dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan beserta dengan penetapan jumlah honorariumnya sesuai dengan surat Perseroan kepada OJK No. SB-048/CSL-LN/OJK/IV/18 tanggal 26 April 2018.

Hasil voting

Suara Setuju: 2.699.452.663 saham.

Suara Tidak Setuju: 57.895.378 saham.

Suara Abstain: 0 saham.

3. Approve to declare the remainder of the current year's net profit for the financial year ended December 31, 2017 amounting to Rp503,583,974,353.24 (five hundred and three billion, five hundred eighty three million nine hundred and seventy four thousand three hundred fifty three point two four rupiah) be recorded as profit to be retained by the Company or retained earnings.
4. Approve to delegate the authority to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in connection with the dividend distribution in accordance with the applicable laws and regulations.

Realization

Resolution on the reserve fund and retained earnings directly applies. Dividend was distributed on May 15, 2018.

Voting results

Affirmative: 2,757,348,041 shares

Objection: 0 share.

Abstain: 0 share.

Third Agenda

1. Approve to appoint the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner as the public accounting firm registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) to audit the Statement of Financial Position, Income Statement and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows and Notes to the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2018 and authorize the Board of Directors to determine the remuneration of the Public Accounting Firm and other terms of appointment.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint another public accounting firm that will audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2018, in the case of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner can not perform their duties for any reason. The appointment of such other public accounting firm shall comply with the terms and conditions under applicable regulations.

Realization

Has been followed up with the appointment of Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan along with the determination of the remuneration in accordance with the Company's letter to OJK No. SB-048/CSL-LN/OJK/IV/18 dated April 26, 2018.

Voting Results

Affirmative: 2,699,452,663 shares.

Objection: 57,895,378 shares.

Abstain: 0 share.

Agenda Keempat

- Menyetujui mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi**Board of Directors**

Presiden Direktur President Director	Marlo Budiman
Direktur Director	Henry Jani Liando
Direktur Director	Timotius Max Sulaiman
Direktur Director	Henry Riady
Direktur Director	Edward Sanusi
Direktur Director	Sigit Prasetya
Direktur Director	Andy Nugroho Purwohardono
Direktur Independen Independent Director	Surya Tatang

Dewan Komisaris**Board of Commissioners**

Presiden Komisaris President Commissioner	Ali Chendra
Komisaris Commissioner	Edward Daniel Horowitz
Komisaris Commissioner	Lorne Rupert Sommerville
Komisaris Independen Independent Commissioner	Jonathan Limborg Parapak
Komisaris Independen Independent Commissioner	Bintan Regen Saragih

- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Timotius Max Sulaiman dan/atau Bapak Henry Jani Liando untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Realisasi

Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris langsung berlaku dan penetapan jumlah honorarium Direksi dan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti.

Hasil voting

Suara Setuju: 2.265.475.225 saham.

Suara Tidak Setuju: 491.872.816 saham.

Suara Abstain: 48.209.871 saham.

Fourth Agenda

- Approve to appoint the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year 2019 to be held in 2020, so that the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company will be as follows:

Dewan Komisaris**Board of Commissioners**

Presiden Komisaris President Commissioner	Ali Chendra
Komisaris Commissioner	Edward Daniel Horowitz
Komisaris Commissioner	Lorne Rupert Sommerville
Komisaris Independen Independent Commissioner	Jonathan Limborg Parapak
Komisaris Independen Independent Commissioner	Bintan Regen Saragih

- Approve the provision of authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors and/or Mr. Timotius Max Sulaiman and/or Mr. Henry Jani Liando to carry out any action in connection with the establishment's Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to restate the decision in a notarial deed, and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the legislation in force, registering the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and to submit and sign all requests and other documents necessary without being exempted in accordance with the applicable laws and regulations.
- Approve to give authority to the Company's President Commissioner to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company.

Realization

Determination of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' directly applies and determination of the remuneration of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' has been followed up.

Voting results

Affirmative: 2,265,475,225 shares.

Objection: 491,872,816 shares.

Abstain: 48,209,871 shares.

RUPSLB | EGMS

20 Desember 2018 | December 20, 2018

First Agenda

- Menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (saham treasury) sejumlah 130.908.300 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus) saham sehingga untuk selanjutnya modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sejumlah 2.911.741.084 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan puluh empat) saham dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat 2:**

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 36,22% (tiga puluh enam koma dua dua persen) atau sejumlah 2.911.741.084 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 291.174.108.400 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan ribu empat ratus Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi

Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil voting

Suara Setuju: 2.463.493.936 saham.

Suara Tidak Setuju: 74.454.111 saham.

Suara Abstain: 312.900 saham.

- Approving the reduction of issued and paid-up capital of the Company by share withdrawal which derives from the buyback shares of the Company (treasury stock) with an amount of 130,908,300 (one hundred thirty million nine hundred eight thousand and three hundred) shares, therefore the issued and paid-up capital of the Company will become 2,911,741,084 (two billion nine hundred eleven million seven hundred forty one thousand eighty four) shares and approve the change of Article 4 point 2 of the Article of Association of the Company become as follows:

- Article 4 point 2**

From the authorized capital, it has been issued and paid-up for 36.22% (thirty six point two two percent) or with an amount of 2,911,741,084 (two billion nine hundred eleven million seven hundred forty one thousand eighty four) shares with a nominal value of Rp 291,174,108,400 (two hundred ninety one billion one hundred seventy four million one hundred eight thousand four hundred Rupiah) by the shareholders with the details and nominal stated in the section before the end of this deed.

- Giving authority and power of attorney with right of substitution to Board of Directors of the Company and/or Mr. Marlo Budiman and/or Mr. Andy Nugroho Purwohardono to take any necessary action in connection with the abovementioned resolution, including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and request for an approval and notification regarding to the amendment of Article of Association to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws, and to submit as well as sign all the application and or necessary documents without being excluded in accordance with the prevailing laws.

Realization

Effective after obtaining approval from the Ministry of Law and Human Rights.

Voting results

Affirmative: 2,463,493,936 shares.

Objection: 74,454,111 shares.

Abstain: 312,900 shares.

Agenda Kedua

1. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
 - a. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Timotius Max Sulaiman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 Juni 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
 - b. Menyetujui pengunduran diri Bapak Edward Sanusi dan Bapak Sigit Prasetya, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Bapak Surya Tatang dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan, dan Bapak Lorne Rupert Somerville dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
 - c. Menyetujui pengangkatan Bapak Wonbae Lee selaku Direktur Perseroan, Bapak Suvir Varma selaku Direktur Independen Perseroan, dan Bapak Sigit Prasetya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
 - d. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Direksi**Board of Directors**

Presiden Direktur President Director	Marlo Budiman
Direktur Director	Henry Jani Liando
Direktur Director	Henry Riady
Direktur Director	Wonbae Lee
Direktur Director	Andy Nugroho Purwohardono
Direktur Independen Independent Director	Suvir Varma

Dewan Komisaris**Board of Commissioners**

Presiden Komisaris President Commissioner	Ali Chendra
Komisaris Commissioner	Edward Daniel Horowitz
Komisaris Commissioner	Sigit Prasetya
Komisaris Independen Independent Commissioner	Jonathan Limborg Parapak
Komisaris Independen Independent Commissioner	Bintan Regen Saragih

Second Agenda

1. Determination of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
 - a. Approve the resignation of Mr. Timotius Max Sulaiman from his position as Director of the Company effective from June 29, 2018 and release and discharge (*acquit et de charge*) his management in 2018 until his resignation date, as long as it was stated in the financial report of the Company.
 - b. Approve the resignation of Mr. Edward Sanusi and Mr. Sigit Prasetya as Director of the Company, Mr. Surya Tatang as Independent Director of the Company, and Mr. Lorne Rupert Somerville as Commissioner of the Company effectively as of the closing of this Meeting and release and discharge (*acquit et de charge*) their supervision and/or management in 2018 until the closing of this Meeting, as long as it was stated in the financial report of the Company.
 - c. Approve the appointment of Mr. Wonbae Lee as Director of the Company, Mr. Suvir Varma as Independent Director of the Company, and Mr. Sigit Prasetya as Commissioner of the Company starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year of 2019 that would be held on 2020.
 - d. in relation to the resolution stated in point a, b, and c above, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for financial year of 2019 that would be held on 2020 are as follows:

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substansi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi

Langsung berlaku.

Hasil Voting

Suara Setuju: 2.507.687.803 saham.
Suara Tidak Setuju: 30.260.244 saham.
Suara Abstain: 0 saham.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2,58% (dua koma lima delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah dilakukannya pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau maksimum sebanyak 75.146.002 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu dua) saham, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Realisasi

Pembelian kembali saham akan dilaksanakan setelah pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil Voting

Suara Setuju: 2.537.984.047 saham.
Suara Tidak Setuju: 0 saham.
Suara Abstain: 6.815.000 saham.

2. Giving authority and power of attorney with right of substitution to Board of Directors of the Company and/or Mr. Marlo Budiman and/or Mr. Andy Nugroho Purwohardono to take any necessary action in connection with the above mentioned resolution, including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and report to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws, to register the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company Register and to submit as well as sign all the application and or necessary documents without being excluded in accordance with the prevailing laws.

Realization

Directly applies.

Voting Results

Affirmative: 2,507,687,803 shares.
Objection: 30,260,244 shares.
Abstain: 0 share.

Third Agenda

1. Approve the shares buyback of the Company with a maximum amount of 2.58% (two point five eight percent) from the issued and paid-up capital of the Company after the reduction of issued and paid-up capital of the Company by share withdrawal which derives from the buyback shares of the Company or with a maximum amount of 75,146,002 (seventy five million one hundred forty six thousand and two) shares, including the other matters relating to the shares buyback of the Company.
2. Giving authority and power of attorney to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company to take all necessary actions relating to the shares buyback of the Company

Realization

Share buyback will be executed after the reduction of issued and paid-up capital of the Company approved by Ministry of Law and Human Rights.

Voting Results

Affirmative: 2,537,984,047 shares.
Objection: 0 share.
Abstain: 6,815,000 shares



PROUDLY PRESENTS

FIRST SQUAD

BRINGS SOLUTION TO IMPROVE YOUR CONNECTION



WATCH THEIR ACTION ON

FIRST MEDIA INDONESIA
YOUTUBE CHANNELCUSTOMER
SERVICE:

1500 595 (PSTN) OR 021 - 2559 6595 (MOBILE)

www.firstmedia.com[FirstMediaWorld](#) [@FirstMediaWorld](#) [@FirstMediaCares](#) [@FirstMediaWorld](#)

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perseroan dimata masyarakat dan para Pemegang Saham.

Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris Perseroan telah disahkan pada tanggal 1 Juni 2016 (Piagam Dewan Komisaris). Piagam Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Persyaratan formal dan material yang berlaku telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Persyaratan formal bersifat umum dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan.

Persyaratan keanggotaan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :

- tidak pernah dinyatakan pailit;
- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

Board of Commissioners

In accordance to the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners is a company's organ that represent Shareholders to perform the supervisory function on the implementation of the Company's policies and strategies conducted by the Board of Directors and to give directions/suggestions to the Board of Directors regarding the Company's management under a goodwill, carefulness and responsibility as well as to perform a function of strengthening the Company's image to the public and Shareholders.

Board of Commissioners Charter

The Board of Commissioners Charter has adopted on June 1, 2016 (Board of Commissioner Charter). The Board of Commissioners Charter arranged as guidelines and codes of conduct that apply to all members of the Board of Commissioners in order to carry out their duties and responsibilities optimally, transparently and in accordance with the legislation so can be accounted for and be accepted by the interested parties.

Membership and Tenure

Formal and material requirements have been complied by all members of the Board of Commissioners. Formal requirements are general and in accordance with the legislation. While the material requirements are specific, tailored to the needs and nature of the company's business.

The requirements for membership of the Board of Commissioners are as follows:

1. Has good character, morality and integrity;
2. Competent in taking legal actions;
3. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:

- has never been declared bankrupt;
- has never held a position as a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners who are declared guilty of causing a company declared bankrupt;
- has never been sentenced for committing a criminal offense that has caused state financial loss and/or that is related to the financial sector; and
- has never held a position as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who during the tenure :

1. has never convened an annual GMS
2. his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners was rejected by GMS or did not give his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of Board of Commissioners to the GMS; and

3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga sejak pengangkatannya. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2019 terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu: 2 (dua) Komisaris Independen, dan 3 (tiga) Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

3. has caused the company that has obtained a permit, approval, or registration from the OJK did not fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the OJK.
4. Has the commitment to comply with the laws and regulations; and
5. Has the knowledge and/or expertise in the areas required by the Company.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders for the period until the closing of third of the General Meeting of Shareholders since his appointment. The tenure of the Board of Commissioners will end when resigns, no longer meets the requirements, dies, or dismissed by the GMS.

The Composition of the Board of Commissioners

The Company's Board of Commissioners as of December 31, 2019 consists of 5 (five) members, namely: 2 (two) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners with the Composition are as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Pengangkatan Appointment	Berakhir Expiry
Ali Chendra*	Presiden Komisaris President Commissioner	2017	RUPST 2020 AGMS 2020
Jonathan Limbong Parapak	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	2019	RUPST 2020 AGMS 2020
Bintan Regen Saragih	Komisaris Independen Independent Commissioner	2017	RUPST 2020 AGMS 2020
Sigit Prasetya	Komisaris Commissioner	2018	RUPST 2020 AGMS 2020
Suvir Varma	Komisaris Commissioner	2019	RUPST 2020 AGMS 2020
Edward Daniel Horowitz	Komisaris Commissioner	2017	RUPST 2020 AGMS 2020

Catatan Note

* Menjabat sebagai Presiden Komisaris sampai dengan 26 April 2019.
Served as President Commissioner until April 26, 2019.

Seluruh Dewan Komisaris yang diangkat oleh Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan Perseroan telah mendokumentasikan Surat Pernyataan dimaksud.

Independensi Dewan Komisaris

Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta pemegang saham utama Perseroan.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan diantara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan Perseroan dan Pemangku Kepentingan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. Selain memenuhi persyaratan umum keanggotaan Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

All appointed members of-- the Board of Commissioners have signed the Statement Letter regarding to the fulfilment of membership requirements of the Board of Commissioners as mentioned in the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 and such Statement Letters has been documented by the Company.

Board of Commissioner Independence

At least 30% (thirty percent) of the members of the Board of Commissioners should be Independent Commissioners, who hail from a party external to the Company and who are free from the influence of the other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the main Shareholders of the Company.

The Independent Commissioner is tasked to create an objective environment and to uphold fairness among various interests, including the interest of the Company and Stakeholders, as a key principle in the decision-making of the Board of Commissioners. In addition to fulfilling the requirements for membership of the Board of Commissioners, Independent Commissioners shall fulfill the following requirements:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Sejak pengangkatannya, kedua Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen dan telah disampaikan ke Bursa Efek Indonesia. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Dari 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan, Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Jonathan Limbong Parapak dan Bintan Regen Saragih. Perseroan telah memenuhi persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen dan kedua anggota Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan independensi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang dilakukan. Melalui laporan Direksi dan Komite Audit, Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perusahaan, termasuk mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perseroan, peraturan serta undang-undang yang berlaku. Terkait dengan RUPS, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memberikan pendapat dan saran mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, melaporkan segera jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan, menelaah dan menandatangani Laporan Tahunan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

1. is not a person who is working or has an authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the past 6 (six) months, except for a reappointment Independent Commissioner for the next period;
2. Does not have shares either directly or indirectly in the Company;
3. Does not have any affiliation with the Company, member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, or the main Shareholders of the Company; and
4. Does not have a business relationship either directly or indirectly which are related to the Company business activities.

Since their appointment, both Independent Commissioners of the Company have signed a Statement Letter of Eligibility of Independent Commissioner and it has been submitted to the Indonesia Stock Exchange. Independent Commissioners that have served for 2 (two) periods can be reappointed for the subsequent period, provided that they state their claim of independence from the Company before the GMS.

From 5 (five) members of the Company's Board of Commissioners, the Independent Commissioner are 2 (two) peoples, namely Jonathan Limbong Parapak and Bintan Regen Saragih. The Company has fullfilled the requirements for minimum number of Independent Commissioners, two members of the Independent Commissioner of the Company have met all the terms and conditions of independence as defined in the rules of the OJK No. 33/POJK.04/2014.

Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners has an important role in the implementation of GCG principles in accordance to its supervisory function. Through the Board of Directors and Audit Committee reports, the Board of Commissioners monitors and evaluates the implementation of the Company's entire strategic policies, including the effectiveness of the implementation of risks management and internal control.

Besides, the Board of Commissioners is also responsible in supervising the Company's operational management performed by the Directors and giving advises to the Board of Directors if necessary and in accordance to provisions stipulated in the Articles of Association, in the decisions of the Company's GMS, regulations and laws. Related to the GMS, the Board of Commissioners has duties and responsibilities, among others, of giving opinions and suggestions about the Company's annual working plan and budget, reporting immediately any occurrence of a declining trend of the Company's performance, reviewing and signing Annual Reports as well as making a responsibility reports on the implementation of its duties to the GMS.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Melalui rapat bersama antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Melalui rapat dengan *Board of Management*.
3. Melalui pengawasan lapangan lewat kunjungan ke lapangan.
4. Melalui laporan-laporan yang dinilai strategis dan relevan.

Melalui serangkaian pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris sampai kepada kesimpulan bahwa pelaksanaan manajemen di tahun 2019 berlangsung sangat baik. Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan maupun peraturan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan pada waktu lainnya apabila diperlukan. Rapat diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham perusahaan dicatatkan. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) atau lebih anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. Apabila dipandang perlu, Direksi dapat diundang ke dalam Rapat Dewan Komisaris.

Berikut tabel yang memuat informasi tentang jumlah rapat dan persentase kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 :

Dewan Komisaris The Board of Commissioners	Jumlah Rapat Total Meeting	% Kehadiran Rapat % Meeting Attend- ance
Ali Chendra*	6	100
Jonathan Limborg Parapak**	6	100
Bintan Regen Saragih	6	50
Sigit Prasetya	6	100
Edward Daniel Horowitz	6	100
Suvir Varma***	6	100

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dalam mekanisme RUPS Tahunan Perseroan dimana para Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris dari Perseroan berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris yang dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Kriteria yang digunakan adalah laporan pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris yang dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Melalui laporan tersebut Pemegang Saham melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris selama tahun buku berjalan. Pihak yang melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris Perseroan adalah Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan Perseroan.

Implementation of Board of Commissioners' Duties

The supervisory tasks are performed by the Board of Commissioners through a variety of activities as follows:

1. Through a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. Through a meeting with the Board of Management.
3. Through field monitoring by visiting the field.
4. By receiving the reports which are strategic and relevant.

Through a series of supervisory that has been carried out by the Board of Commissioners throughout the year of 2019, the Board of Commissioners came to the conclusion that the implementation of the management in 2019 has run very well. The Board of Commissioners found neither violations of the laws and regulations in the financial sector nor over other regulations related to the Company's business activities performed by the Company's management.

The Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners meeting can be held at least once every 2 (two) months or at any time if it is deemed necessary. Meeting held at the Company's domicile or at the domicile of the stock exchange where the Company's shares are listed. The meeting of the Board of Commissioners is considered valid and allowed to take binding resolutions if 2 (two) or more members of the Board of Commissioners are present and are represented in the meeting. If deemed necessary, the Board of Commissioners may invite the Board of Directors.

The following is the table contains information of the total meeting and percentage attendance of the Board of Commissioners' meetings throughout 2019 :

Catatan

Note

* Menjabat sebagai Presiden Komisaris sampai dengan 26 April 2019.
Served as President Commissioner until April 26, 2019.

** Menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) sejak 26 April 2019
Served as President Commissioner (Independent) since April 26, 2019

*** Menjabat sebagai Komisaris sejak 26 April 2019
Appointed as Commissioner since April 26, 2019

Assesment on the Board of Commissioners Performance

Procedures for implementing the performance assessment of the Board of Commissioners is conducted in the Annual GMS mechanism, where the Shareholders assesses the performance of the Company's Board of Commissioners based on the task implementation report submitted to the Shareholders.

The criteria used in the assessment is based on the task implementation report of the Board of Commissioners which submitted in the Annual GMS of the Company. Based on the report, the Shareholders performance during the current financial year is assessed by the Shareholders. The Company's Board of Commissioners is assessed by the Shareholders through the Annual GMS of the Company.

Penilaian Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite antara lain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Audit Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah membantu Dewan Komisaris dengan memberikan berbagai masukan dan rekomendasi terkait kandidat dan remunerasi, sedangkan Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Sebagai penerapan dari tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan strategi Perseroan. Dalam hal ini Dewan Komisaris mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang berada di bawah Dewan Komisaris. Pemberian rekomendasi dan nasihat selanjutnya disampaikan melalui forum rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2019, beberapa rekomendasi dan nasihat yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain :

1. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik.
2. Berupaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan pasar Perseroan.
3. Memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi sebaik-baiknya agar tepat penggunaannya terkait dengan perkembangan dalam hal efisiensi dan kecepatan pelaksanaan.
4. Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

Pelatihan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris Perseroan tidak mengikuti program pelatihan dan pendidikan.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2019 tidak ada program orientasi/pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru.

The Assessment of Committee under the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by several committees including the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. In 2019, the Nomination and Remuneration Committee and the Audit Committee of the Company has carried out their duties and responsibilities. The Nomination and Remuneration Committee has assisted the Board of Commissioners by providing various inputs and recommendations related to candidates and remuneration, while the Audit Committee has assisted the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee Charter.

Board of Commissioners Recommendation

As the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners continues to give recommendation and advice to the Board of Directors related to the Company's management strategy. In this case the Board of Commissioners considers the recommendations given by the Audit Committees and the Nomination and Remuneration Committees under the Board of Commissioners. The recommendation and advice is conveyed through the joint meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors.

During 2019, some of the recommendation and advice given by the Board of Commissioners to the Board of Directors included:

1. Effective implementation of the Good Corporate Governance Principles.
2. Attempt to seek new opportunities in the expansion of the Company's market.
3. Utilize advances in technology development related to improvements in efficiency and speedy implementation.
4. Always prioritizing customer satisfaction.

Board of Commissioners Training

Throughout 2019, the Board of Commissioners did not attend training programs and education.

Board of Commissioners Orientation Program

In 2019 there no orientation/ introduction program for new members of the Board of Commissioners.

INDONESIA NOW AWARDS 2019
INDONESIA INVESTMENT AWARDS 2019
CONVERGENCE EXCELLENCE EXCELLENCE AWARDS 2019
INTERNATIONAL MARKETING AWARDS INDONESIA 2019

FIRST
MEDIA

CASHBACK HINGGA
Rp 500 Ribu
PEMBELIAN TIKET KERETA & PESAWAT DI
tokopedia

DISKON 25%

MOMEN MUDIK MAKIN ASIK!

Rayakan kecerian Lebaran bersama keluarga dengan
Internet Cepat Tanpa Kuota dan Tayangan HD
Berkualitas Terbaik di rumah Anda.

BAYAR TAGIHAN VIA tokopedia
CASHBACK 15%

BAYAR TAGIHAN VIA OVO
CASHBACK HINGGA 50 RIBU OVO POINT

SCAN QR untuk info lebih lanjut

SALES CENTER: 1500 290 JAKARTA (021) 2559 6688 SURABAYA (031) 2950 777
BANDUNG (022) 8734 6565 MALANG (0341) 330 1030

*family first

DIREKSI

Board of Directors

Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, serta tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap Perusahaan Terbuka dan tetap berpegang pada penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Di samping itu, Direksi bertanggung-jawab melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola karyawan dan melaporkan kinerja Perseroan secara keseluruhan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Piagam Direksi

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi tertanggal 1 Juni 2016 (Piagam Direksi). Piagam Direksi merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Direksi berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan. Persyaratan keanggotaan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

Board of Directors

The Board of Directors is the Company's organ who is fully responsible on the Company's management by always taking notice the interests of the Shareholders and Stakeholders. The Board of Directors represents the Company both in and outside the court in accordance to the Articles of Association, is a subject to the applied regulations towards a public company and adheres to the implementations of the Good Corporate Governance principles. Besides, the Board of Directors is responsible to perform internal supervision effectively and efficiently monitor the risks and manage them, preserves a conducive working climate so that productivity and professionalism improve, manage the employees and report the Company's performance completely to the Shareholders in the General Meeting of Shareholders.

Board of Directors Charter

The Company has the Board of Directors Charter dated June 1, 2016 (Board of Directors Charter). The Board of Directors Charter is a working guidelines and codes of conduct that apply to all members of the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities in a transparent, accountable, responsible, self-sufficient and reasonable in efforts to achieve the objectives of the Company and provide the value expected by the interested parties.

Membership and Tenure

The Board of Directors is under the supervision of the Board of Commissioners. All members of the Company's Board of Directors have met the applied formal and material requirements. The formal requirements are general and in accordance with the laws and regulations while the material requirements are specific and are adjusted to the Company's need and business type. The requirements for membership of the Board of Directors are as follows:

1. Has good character, morality and integrity;
2. Competent in taking legal actions;
3. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:
 - a. has never been declared bankrupt;
 - b. has never held a position as a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners who are declared guilty of causing a company declared bankrupt;

- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - 3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga sejak pengangkatannya dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

Susunan Direksi Perseroan

Direksi Perseroan per 31 Desember 2019 terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu 1 (satu) bertindak sebagai Presiden Direktur, dan 4 (empat) bertindak sebagai Direktur, dengan susunan sebagai berikut:

- c. has never been sentenced for committing a criminal offense that has caused state financial loss and/or that is related to the financial sector; and
- d. has never held a position as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who during the tenure :
 - 1. has never convened an annual GMS;
 - 2. his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners was rejected by GMS or did not give his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS;
 - 3. has caused the company that has obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority did not fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the Financial Services Authority;
 - 4. Has the commitment to comply with the laws and regulations; and
 - 5. Has the knowledge and/or expertise in the areas required by the Company.

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed in the General Meeting of Shareholders for a certain period until the closing of the third General Meeting of Shareholders and can be re-appointed in accordance to decisions made in the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors positions expire when the directors resign, no longer be able to meet requirements as stipulated by the laws, passed away, are dismissed by a decision of the GMS, are declared bankrupt or under clemency based on a court ruling.

The Composition the Board of Directors

As of December 31, 2019, The Company's Board of Directors comprises of 5 (five) members, i.e. 1 (one) serves as the President Director, and 4 (four) as Directors with the composition are as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Pengangkatan Appointment	Berakhir Expiry
Marlo Budiman	Presiden Direktur President Director	2018	RUPST 2020 AGMS 2020
Henry Jani Liando	Direktur Director	2017	RUPST 2020 AGMS 2020
Andy Nugroho Purwohardono	Direktur Director	2017	RUPST 2020 AGMS 2020
Wonbae Lee	Direktur Director	2018	RUPST 2020 AGMS 2020
Poon Sui Meng (Desmond Poon)	Direktur Director	2019	RUPST 2020 AGMS 2020

Seluruh Direksi yang diangkat oleh Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan Perseroan telah mendokumentasikan Surat Pernyataan dimaksud.

All appointed members of the Board of Directors have signed the Statement Letter regarding to the fulfilment of membership requirements of the Board of Commissioners as mentioned in the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 and such Statement Letters has been documented by the Company.



Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh baik secara pribadi maupun bersama (tanggung renteng) atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai.

Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Internal sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Direksi wajib menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan publik. Selain itu, Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembidangan tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan Piagam Direksi, sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Duties and Responsibilities

The Board of Directors is responsible on the management of the Company in a goodwill and responsibility. Every member of the Board of Directors are completely responsible either individually or collectively over the Company's losses if the respective members are found guilty or negligent.

The Board of Directors is responsible over the Company's management through the risks management and the implementation of the Good Corporate Governance in all level of the organization. The Board of Directors responsibilities also cover the implementation of internal control structure, the implementation of internal audit and the decision making of necessary acts based on findings from the Internal Audit in accordance with directions from the Board of Commissioners.

The Board of Directors is obliged to establish business strategies, including work plan and budget as well as the application of accounting and bookkeeping practices in accordance with regulations regarding public companies. Moreover, the Board of Directors is also obliged to hold responsibility its duties to the shareholders in the General Meeting of Shareholders. In the event the General Meeting of Shareholders does not determine the segregation of duties among the Directors, so the segregation will be determined based on the Board of Directors Charter as follows:

1. The Board of Directors shall be fully responsible in carrying out the duties for the interests of the Company in achieving the purpose and objectives of the Company.
2. The Board of Directors shall convene an annual GMS and other GMS as provided for under the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.
3. Each member of the Board of Directors shall, in good faith, with full of responsibility and prudence carrying out his/her duties in observance of the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.
4. The Board of Directors shall implement risk management and principles of Good Corporate Governance in any Company business activities at all levels of the organization.



5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. The division of duties and authorities of each member of Board of Directors are defined by GMS, in the event that it is not defined by GMS, the division of duties and authorities of each member of the Board of Directors shall be determined based on the decision of Meeting of Board of Directors.
6. In the event the Company has an interest contrary to the personal interest of a member of Board of Directors, the Company shall be represented by another member of Board of Directors and in the event the Company has an interest contrary to the interests of all members of Board of Directors, then in this case the Company shall be represented by the Board of Commissioners, in observance with the prevailing laws and regulations.

Direksi dapat menggunakan saran profesional atas biaya perusahaan apabila benar-benar dibutuhkan dan dengan memperhatikan batas-batas efisiensi dan efektivitas, serta tidak terdapat benturan kepentingan.

Pembagian Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertugas secara kolegial. Namun, agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dilakukan pembagian tugas anggota Direksi sesuai bidang dan kompetensinya. Pembagian tugas tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perseroan.

Pembagian tugas kepada Direksi ditetapkan oleh RUPS. Akan tetapi, dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sebagai berikut :

The Board of Directors can use professional advisories at the Company's costs if they are absolutely necessary by considering the efficiency and effectiveness as well as avoiding conflict of interests.

Segregation of Duties of The Board of Directors

In performing the duties and the responsibilities, the Board of Directors are work collegially. However, to be more effective and efficient in performing the duties and the responsibilities, there is segregation of duties of the Board of Directors according to their respective fields and competencies. Allocation of the duties does not eliminate the collegial responsibility of the Board of Directors in managing the Company.

The segregation to the Board of Directors are determined by GMS. However, GMS are not determined the segregation of the duties of the Board of Directors, accordingly the segregation of the duties of the Board of Directors is assigned by the Resolution of the Board of Directors, as follows :

Nama dan Jabatan Name and Title	Pembagian Tugas Segregation of Duties	
Marlo Budiman Presiden Direktur President Director	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan, termasuk membawahi Divisi <i>Media Sales</i> , <i>Corporate Legal</i> dan Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan <i>President Office</i> ; dan mengawasi serta memberikan panduan strategis kepada Divisi sumber daya Perseroan, termasuk Divisi <i>Human Resources</i> , Divisi <i>Corporate Real Estate and Services</i> , dan Divisi <i>Supply Chain Management</i> .	Generally responsible to all of the Company's activities, including the Division of Media Sales, Corporate Legal and Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and President Office; also supervise and give strategic guidelines to the Corporate Resources Division, including Human Resources Division, Corporate Real Estate and Services Division, and Supply Chain Management Division.
Henry Jani Liando Direktur Director	Bertanggung jawab mengawasi serta memberikan panduan strategis kepada Divisi Keuangan, termasuk Divisi <i>Accounting</i> dan <i>Tax</i> , Divisi <i>Cost Management</i> , dan Hubungan Investor.	Responsible to supervise and give strategic guidelines to the Finance Division, including Accounting and Tax Division, Cost Management Division, and Investor Relation.
Andy Nugroho Purwohardono Direktur Director	Bertanggung jawab mengawasi serta memberikan panduan strategis kepada Divisi Pengembanga Jaringan Baru, termasuk Divisi <i>Community Relation</i> , <i>Construction</i> , NRO Strategic Development, NEO, FO Implementation & Ops, dan SITAC & Permit.	Responsible to supervise and give strategic guidelines to the New Roll Out Division, including Community Relation Division, Construction, NRO Strategic Development, NEO, FO Implementation & Ops, and SITAC & Permit.
Wonbae Lee Direktur Director	Bertanggung jawab mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada Divisi Teknologi dan Produk, termasuk diantaranya Divisi <i>Operation Support</i> , Divisi <i>Engineering Support</i> , Divisi <i>Network</i> , Divisi <i>Product Management</i> , (L)IVE, NOC, dan IoE. Divisi Operasional, termasuk diantaranya Divisi <i>Branch Management</i> , Divisi <i>Customer Care and Quality</i> , Divisi <i>Operation Support</i> , Divisi <i>Customer Interaction</i> , Divisi <i>Contact Center</i> , Divisi <i>Network Installation</i> , Divisi <i>Business Support</i> dan Divisi <i>IT & Services</i> .	Responsible to supervise and give strategic guidelines to the Technology and Product, including Operation Support Division, Engineering Support Division, Network Division, Product Management Division, (L)IVE, NOC, and IoE. Operations Division, including Branch Management Division, Customer Care and Quality Division, Operation Support Division, Customer Interaction Division, Contact Center Division, Network Installation Division, Business Support Division and IT & Services Division;
Poon Sui Meng (Desmond Poon) Direktur Director	Bertanggung jawab mengawasi serta memberikan panduan strategis kepada Divisi Penjualan Korporasi, Divisi Penjualan Hunian, termasuk diantaranya; Divisi <i>Telesales and Vertical Marketing</i> , Divisi <i>Sales Operation and Planning</i> , dan Divisi <i>Direct Sales</i> ; mengawasi serta memberikan panduan strategis kepada Divisi Konten dan mengawasi serta memberikan panduan strategis kepada Divisi Pemasaran termasuk diantaranya Divisi <i>Customer Relationship Management</i> , Divisi <i>Marketing Communication</i> , dan Divisi <i>Customer Acquisition Partnership</i> .	Responsible to supervise and give strategic guidelines to the Enterprise Sale Division and Residential Sale Division, including Telesales and Vertical Marketing Division, Sales Operation and Planning Division, and Direct Sales Division; also supervise and give strategic guidelines to the Content Division and also supervise and give strategic guidelines to the Marketing Division, including Customer Relationship Management Division, Marketing Communication Division, and Customer Acquisition Partnership Division.

Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau pada waktu lainnya, dengan lokasi di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham perusahaan dicatatkan. Direksi juga turut dalam Rapat Dewan Komisaris untuk membahas kemajuan Perseroan secara umum. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) atau lebih anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Berikut tabel yang memuat informasi tentang jumlah rapat dan persentase kehadiran Direksi dalam rapat Direksi sepanjang tahun 2019:

The Board of Directors Meeting

The Board of Directors Meeting periodically at least 1 (one) time in every month or whenever needed located at the Company's domicile or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed. The Board of Directors also participate in the Meetings of the Board of Commissioners to discuss the Company's general development. The Meeting of the Board of Directors is considered valid and are allowed to take binding resolutions if 2 (two) or more members of the Board of Directors are present and are represented in the meeting. The following is the table contains information of the total meeting and percentage attendance of the Board of Commissioners' meetings throughout 2019:

Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat bersama dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang persentase kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat:

The Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners should conduct a joint meeting with the Board of Directors at least once in 4 (four) months. Throughout 2019, the Board of Commissioners held 4 (four) joint meetings. The following table contains information of the Board of Commissioners and the Board of Directors attendance in the meeting:

Direksi The Board of Directors	Jumlah Rapat Total Meeting	% Kehadiran Rapat % Meeting Attendance
Marlo Budiman	12	100
Henry Riady****	12	50
Henry Jani Liando	12	100
Andy Nugroho Purwohardono	12	100
Wonbae Lee	12	100
Suvir Varma*****	12	100
Poon Sui Meng (Desmond Poon) *****	12	100

Catatan

Note

- **** Menjabat sebagai Direktur sampai dengan 26 April 2019.
Served as Director until April 26, 2019.
- ***** Menjabat sebagai Direktur Independen sampai dengan 26 April 2019
Served as Independent Director until April 26, 2019
- ***** Menjabat sebagai Direktur sejak 26 April 2019
Appointed as Director since 26 April 2019

Dewan Komisaris & Direksi The Board of Commissioners & Board of Directors	Jumlah Rapat Total Meeting	% Kehadiran Rapat % Meeting Attendance
Ali Chendra*	4	100
Jonathan Limborg Parapak**	4	100
Bintan Regen Saragih	4	50
Edward Daniel Horowitz	4	100
Sigit Prasetya	4	100
Suvir Varma***	4	100
Marlo Budiman	4	100
Henry Jani Liando	4	100
Henry Riady****	4	100
Andy Nugroho Purwohardono	4	100
Wonbae Lee	4	100
Poon Sui Meng ***** (Desmond Poon)	4	100

Catatan

Note

- * Menjabat sebagai Presiden Komisaris sampai dengan 26 April 2019.
Served as President Commissioner until April 26, 2019.
- ** Menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) sejak 26 April 2019
Served as President Commissioner (Independent) since April 26, 2019
- *** Menjabat sebagai Komisaris sejak 26 April 2019
Appointed as Commissioner since April 26, 2019

Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Perseroan sesuai dengan Piagam Direksi menjalankan program peningkatan kompetensi Direksi yang di dapat melalui program orientasi Direksi, sosialisasi, pelatihan, seminar, maupun workshop. Berikut berbagai program kompetensi yang diikuti Direksi pada tahun 2019:

Competence Enhancement Program of The Board of Directors

In carrying out its duties, the Company pursuant to the Board of Directors Charter has run the competence enhancement program of the Board of Directors that can be through the orientation program, socialization, training, seminars, and workshops. The following are competence enhancement program attended by the Board of Directors in 2019:

No	Program Program	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Tanggal Date
1	Digitalisasi dan Strategi Korporasi Digitalization and Corporate Strategy	ICSA	Intiland Tower Jl. Jend Sudirman Kav. 32, Jakarta	23 April 2019 April 23, 2019
2	Seminar "Business Reporting on the Sustainable Development Goals"	BEI dan Global Reporting Initiative (GRI)	Mainhall Bursa Efek Indonesia	25 April 2019 April 25, 2019
3	Seminar POJK 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.	OJK & BEI	Main Hall Bursa Efek Indonesia	24 Juni 2019 June 24, 2019
4	Seminar about POJK 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to POJK Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Addition of Public Companies by Giving Pre-emptive Rights.	ICSA, OJK & BEI	Main Hall Bursa Efek Indonesia	2 Juli 2019 July 2, 2019
5	The Effective of GCG implementation strategy with the duties of Corporate Secretary and POJK Number 21/POJK.04/2014 concerning Implementation of Public Companies Governance Guidelines.	BEI & ICSA	Main Hall Bursa Efek Indonesia	13 Agustus 2019 August 13, 2019
	Seminar mengenai memahami Peraturan Buyback Saham sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka			
	Seminar on Understanding Share Buyback Regulations in accordance with POJK Number 30/POJK.04/2017 concerning Buyback Shares Issued by Public Companies.			

Program Orientasi Direksi

Perseroan belum memiliki program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Namun demikian, jika terdapat pengangkatan anggota Direksi baru, Perseroan memberikan informasi yang cukup terkait kegiatan usaha Perseroan dan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan penilaian atas kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui RUPS tahunan. Kriteria yang digunakan dengan mengacu pada pencapaian *key performance indicator ("KPI")* Direksi berdasarkan laporan pelaksanaan kinerja Direksi yang dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Berdasarkan laporan KPI tersebut, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi selama tahun buku berjalan. Pihak yang melakukan penilaian terhadap Direksi Perseroan adalah Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pemegang Saham.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 Perseroan masing-masing membayar Rp 40,9 miliar, Rp 72 miliar dan Rp 46 miliar kompensasi secara keseluruhan (termasuk bonus) yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Board of Directors Orientation Program

The Company has not conducted any induction programs for newly appointed Board of Director members. However, if there is a new member appointed to the Board of Directors, the Company provides sufficient information regarding the Company's business activities and an explanation of the Board of Directors' duties and responsibilities.

Assesment on the Board of Directors Performance

The assesment of the performance of the Board of Directors is conducted both by the Board of Commissioners and the Annual GMS. The criteria used by referring to the achievement of the key performance indicators ("KPI") of the Directors are based on reports on the performance of the Directors who are accounted at the Annual GMS of the Company.

Based on the KPI report, the Board of Commissioners and Shareholders assess the performance of the Directors during the current financial year. The party evaluating the Company's Directors is the Board of Commissioners, assisted by the Nomination and Remuneration Committee and Shareholders.

The Board of Commissioners' and the Board of Directors Remuneration

In 2017, 2018, and 2019 the Company paid Rp 40.9 billion, Rp 72 billion and Rp 46 billion respectively, in aggregate compensation (including bonuses) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Remunerasi Total Total Remuneration	2019	2018	2017
Kompensasi secara keseluruhan (termasuk bonus) yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Rp 46 miliar	Rp 72 miliar	Rp 40,9 miliar
Compensation (including bonuses) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Rp 46 billion	Rp 72 billion	Rp 40.9 billion

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity on The Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif solusi terhadap suatu masalah yang dihadapi Perseroan dibandingkan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik setelah melihat dari berbagai alternatif keputusan sesuai keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi yang ada.

Pada tahun 2019 komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan Perseroan, termasuk memperhatikan unsur keberagaman sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of The Board of Commissioners and The Board of Directors Composition

Pendidikan Education

Keberagaman berdasarkan latar belakang pendidikan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terlihat dari tingkatan dan bidang pendidikan sebagai berikut:

- Tingkatan kelulusan mulai dari sarjana, magister, sampai dengan gelar doktor
- Bidang pendidikan yang diikuti antara lain adalah Teknik Elektro, Teknik Komputer, Hukum, Fisika, Matematika, Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Administrasi Bisnis.

The diversity of educational backgrounds of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, indicated by a level and areas of education, namely:

- Educational qualification from Bachelor, Master to Doctorate
- Competence areas including Electrical Engineering, Computer Engineering, Law, Physics, Mathematic, Industrial Engineering, Chemical Engineering, and Business Administration.

Pengalaman Experience

Keberagaman berdasarkan pengalaman kerja, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan antara lain berpengalaman di bidang: Teknologi Informatika, Telekomunikasi, Media, Pendidikan, Pemerintahan, Perbankan, dan Keuangan.

The diversity of work experience of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company among others in field: Information Technology, Telecommunication, Media, Education, Government Institution, Banking, and Financial.

Umur Age

Keberagaman berdasarkan umur, Dewan Komisaris dan Direksi ada pada posisi umur yang produktif, antara lain 45-54 tahun 6 orang, 55-64 tahun 1 orang, 65-74 tahun 1 orang, dan 75-84 tahun 2 orang.

The diversity of ages of the Board of Commissioners and the Board of Directors is in the age range is quite productive, i.e. 45-54 years 6 peoples, 55-64 years 1 people, 65-74 years 1 peoples, and 75-84 years 2 people.

Jenis Kelamin Gender

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berjenis kelamin laki-laki.
All of the Board of Commissioners and the Board of Director of the Company are male.

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Affiliated Relations of The Board of Commissioners, the Board of Directors, and Controlling Shareholders

Tidak ada hubungan afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

There is no affiliation between the Members of the Board of Commissioners, Directors and the Controlling Shareholders of the Company.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Affiliated Relations		
		Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Family Relationship with the Board of Directors Members	Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris Family Relationship with the Board of Commissioners Members	Hubungan Kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali Management Relationship with the Controlling Shareholders
Jonathan Limbong Parapak	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	-	-	-
Bintan Regen Saragih	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Edward Daniel Horowitz	Komisaris Commissioner	-	-	-
Sigit Prasetya	Komisaris Commissioner	-	-	-
Suvir Varma	Komisaris Commissioner	-	-	-
Marlo Budiman	Presiden Direktur President Director	-	-	-
Henry Jani Liando	Direktur Director	-	-	-
Andy Nugroho Purwohardono	Direktur Director	-	-	-
Wonbae Lee	Direktur Director	-	-	-
Poon Sui Meng (Desmond Poon)	Direktur Director	-	-	-

FIRST
MEDIA

TV GUIDE

INDONESIA'S PREMIER ENTERTAINMENT
AND TV GUIDE MAGAZINE



04
2019

KIT HARINGTON

PERJALANAN AKHIR
SANG JAGOAN
“GAME OF THRONES”

ON DIGITAL

UNIKNYA NONTON BOLA
ALA FIRST MEDIA

KISAH NOVEL DALAM
FILM INDONESIA

CERITA PARA WANITA
YANG MEMPENGARUHI DUNIA

VIEW

CSR
INSIDE

MANAGEMENT REPORT
Laporan Manajemen

COMPANY PROFILE
Profil Perusahaan

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
Analisa Dan Pembahasan Manajemen

CORPORATE GOVERNANCE
Tata Kelola Perusahaan

CROSS REFERENCES
SEOJK 30-2016
Referensi Sijang
SEOJK 30-2016

PREFACE
Pendahuluan

FINANCIAL & PERFORMANCE HIGHLIGHT
Ikhtisar Kinerja Keuangan & Performa Usaha

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK Nomor 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015"), tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan. Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit Perseroan terdiri dari dua anggota yang merupakan pihak independen (pihak dari luar Perseroan) yang berkemampuan dibidang akuntansi dan keuangan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Piagam Komite Audit

Bersamaan dengan dibentuknya Komite Audit, Perseroan mengeluarkan Piagam Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SK-001/LN/CSL/IV/17 tanggal 21 April 2017 ("Piagam Komite Audit"). Piagam Komite Audit berisi pedoman dan tata tertib yang mengatur kegiatan Komite Audit untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

Keanggotaan dan Masa Jabatan Komite Audit

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penetapan pembentukan Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Komite Audit beranggota 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku.

Susunan Komite Audit Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/LN/CSL/ IV/17 tanggal 21 April 2017 adalah sebagai berikut:

55/POJK.04/2015, dated December 23, 2015 regarding Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee Works ("POJK 55/2015"), the establishment of the Audit Committee aims to ensure the implementation of corporate governance. The main duty of the Audit Committee is to encourage the implementation of good corporate governance, the establishment of proper internal control structure, the improvement of the quality of transparency and financial reports as well as review the public accountant's scope, accuracy, independency and objectivity. The Company's Audit Committee comprises of two members who are independent parties (beyond the Company) having competencies in accounting and finance sector, and is headed by the Independent Commissioner.

Audit Committee Charter

Along with the establishment of the Audit Committee, the Company's Audit Committee Charter issued by the Decree of the Board of Commissioners Number SK-001/LN/CSL/ IV/14 dated April 21, 2017 ("Audit Committee Charter"). The Charter contains guidelines and procedures that govern the activities of the Audit Committee to implement the principles of good corporate governance (GCG), which covers aspects of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, justice and equality.

Membership and Tenure of Audit Committee

The Board of Commissioners has established the Audit Committee, to assist the Board of Commissioners in performing their duties and obligations. The determination of the establishment of the Audit Committee is performed through a Decree Letter by the Board of Commissioners and is headed by one of the Independent Commissioners who are appointed by the Board of Commissioners.

In exercising its authority, the Audit Committee is obliged to cooperate with other parties which are performing the Internal Audit function. The Audit Committee have 3 (three) members, comprising of 1 (one) Chairman who is also serves as the Independent Commissioner, and 2 (two) members who are independent. All members of the Audit Committee have met independence, skills, experiences and integrity criteria as required by the applicable regulations.

The Structure of the Audit Committee of the Company based on a resolution of the Board of Commissioners Number SK-001/LN/CSL/ IV/17 dated April 21, 2017 as follow:

Nama Name	Jabatan Title	Pengangkatan Appointment	Keterangan Remarks
Jonathan Limbong Parapak	Ketua Chairman	Diangkat sejak tanggal 21 April 2017 Appointed as of April 21, 2017	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)
Lim Kwang Tak	Anggota Member	Diangkat sejak tanggal 21 April 2017 Appointed as of April 21, 2017	Pihak Independen Independent Party
Herman Latief	Anggota Member	Diangkat sejak tanggal 21 April 2017 Appointed as of April 21, 2017	Pihak Independen Independent Party

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan sebagaimana dimaksud di atas akan berlaku terhitung sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan mereka setiap saat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk POJK 55/2015.

The appointed of Chairman and Member of the Audit Committee of the Company as above mentioned dated April 21, 2017 until the closing date of the General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2019, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time in accordance with the applicable laws and regulations, including POJK 55/2015

PROFIL KOMITE AUDIT

Audit Committee Profile

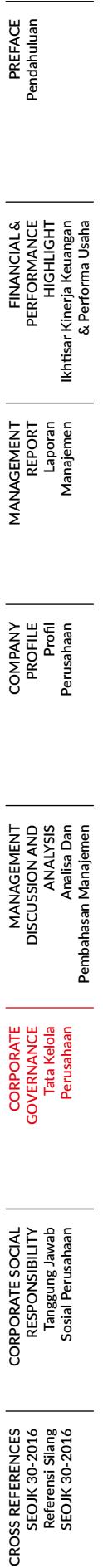


JONATHAN LIMBONG PARAPAK

Ketua
Chairman

Untuk profil lengkapnya silahkan dilihat halaman profil Dewan Komisaris.

For full profile, please see the Board of Commissioners profile page.





LIM KWANG TAK

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun, lahir di Jakarta. Bapak Lim memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014. Memulai karirnya sebagai Konsultan Manajemen di Touche Ross Darmawan & Co (1981-1982) dan Konsultan Manajemen di *Data Impact and Business Advisory* (1983-1985).

An Indonesian citizen, 62 years old, was born in Jakarta. Mr. Lim Kwang Tak earned a Bachelor in Accounting from the Faculty of Economy of the University of Indonesia. He has served as a member of the Company's Audit Committee since 2014. He started his career as a Management Consultant at Touche Ross Darmawan & Co (1981-1982) and a Management Consultant of Data Impact and Business Advisory (1983-1985).

Beliau sebelumnya menjabat beberapa posisi di PT Trimex Sarana Trisula dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1991-1999), di PT Southern Cross Textile Industry dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1991-2012), Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing (1992-2001), menjabat beberapa posisi di PT Trisenta Interior Manufacturing dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris (1992-2006), Komisaris di PT Nusantara Cemerlang (1997-2005), Direktur di PT Trisula Corporation Pte Ltd (2000-2012), menjabat beberapa posisi di PT Trisula Textile Industries dengan sebagai Komisaris (sejak 2005), Komisaris di PT Trisula Garment Manufacturing (2008-2016), Direktur Utama di PT Trisula Insan Tiara (2011-2013). Menjabat Komisaris Utama lalu Direktur Utama dan sekarang sebagai Komisaris di PT Trimas Sarana Garment Industry (sejak 2010). Saat ini memegang posisi sebagai Senior Partner di PT Bina Analisindo Semesta (sejak 1985), Komisaris di PT Mido Indonesia (sejak 2011), Komisaris di PT Trisula International Tbk (sejak 2011), Anggota Komite Audit di PT Multipolar Tbk (sejak 2013), Anggota Komite Audit di PT Lippo Karawaci Tbk (sejak 2017), Senior Advisor di PT Paramount Enterprises (sejak 2013), Komisaris di PT Trisco Apparel Manufacturing (2015-2016), dan menjadi anggota Pengawas Yayasan Rumah Sakit Cikini- PGI (sejak Mei 2016).

He previously held several positions at PT Trimex Sarana Trisula with the latest position of a Commissioner (1991-1999), at PT Southern Cross Textile Industry with the latest occupation as a Commissioner (1991-2012), as the President Commissioner of PT Chitose Indonesia Manufacturing (1992-2001), several positions at PT Trisenta Interior Manufacturing with the latest occupation as the President Commissioner (1992-2006), as a Commissioner of PT Nusantara Cemerlang (1997-2005), a Director of PT Trisula Corporation Pte Ltd (2000-2012), several positions at PT Trisula Textile Industries with the latest occupation as a Commissioner (since 2005), a Commissioner in PT Trisula Garment Manufacturing(2008-2016), a President Director of PT Trisula Insan Tiara (2011-2013). Served as a President Commissioner, President Director, then Commissioner of PT Trimas Sarana Garment Industry (since 2010). He is currently serving as a Senior Consultant at PT Bina Analisindo Semesta (since 1985), the President Director at a Commissioner at PT Mido Indonesia (since 2011), a Commissioner of PT Trisula International Tbk (since 2011), a member of the Audit Committee of PT Multipolar Tbk (since 2013), a member of the Audit Committee of PT LIPPO KARAWACI Tbk (since 2017), a Senior Advisor of PT Paramount Enterprise (since 2013), a Commissioner of PT Trisco Apparel Manufacturing (2015-2016), and became a Supervisor Member of Cikini Hospital Foundation - PGI (since May 2016).



HERMAN LATIEF

**Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee**

Warga Negara Indonesia, umur 72 tahun, lahir di Bukit Tinggi. Bapak Latief memperoleh gelar *Diplom Ingenieur Architect* (Dipl. Ing) dari TFH, Hamburg, Jerman. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014.

An Indonesian citizen, 72 years old, was born in Bukit Tinggi. Mr. Herman Latief earned a Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) from TFH, Hamburg, Germany. He has been serving as a member of the Company's Audit Committee since 2014.

Memulai karirnya sebagai Arsitek di PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), kemudian menjadi Direktur di perusahaan grup Kalbe Farma (1979-1988), memegang beberapa posisi di PT Lippo Cikarang Tbk terakhir sebagai Wakil Presiden Komisaris (1989-2001), Komisaris di PT Lippo Land Development (2001-2004), Komisaris di PT Bukit Sentul Tbk (2004-2005), Direktur di PT East Jakarta Industrial Park (2004-2010), Komite Audit di PT Pacific Utama Tbk (2005-2007), Komite Audit di PT Gowa Makassar (2005-2007), Komite Audit di PT Multipolar Tbk (2007-2009), aktif di Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (1995-2000) dan Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999-2008). Saat ini memegang posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat di Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (sejak 2000), Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kawasan Industri di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (sejak 2008), Komite Audit di PT Star Pacific Tbk (sejak 2010), Komite Audit di PT Lippo General Insurance Tbk (sejak 2012) dan anggota Direksi PT Tjakra Tritunggal Perkasa (SPH Channel TV) sejak 2016.

He started his career as an architect at PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), a Director at a company under the Kalbe Farma group (1979-1988), held several positions at PT Lippo Cikarang Tbk with the latest occupation as the Vice President Commissioner (1989-2001), as a Commissioner at PT Lippo Land Development (2001-2004), a Commissioner at PT Bukit Sentul Tbk (2004-2005), a Director at PT East Jakarta Industrial Park (2004-2010), the Audit Committee at PT Pacific Utama Tbk (2005-2007), the Audit Committee at PT Gowa Makassar (2005-2007), the Audit Committee at PT Multipolar Tbk (2007-2009), actively involved in the Board of Advisors of the Industrial Zone Association (HKI) (1995-2000) and the Vice Chairman of the Real Estate Indonesia (1999-2008). He is currently holding a position as a Vice Chairman of the Board of Advisors of HKI (since 2000), the Vice Chairman of the Committee for Industrial Zone Development of the Indonesia Chambers of Commerce (KADIN) (since 2008), the Audit Committee of PT Star Pacific Tbk (since 2010) and the Audit Committee of PT Lippo General Insurance Tbk (since 2012) and Director Member of PT Tjakra Tritunggal Perkasa (SPH Channel TV) sejak 2016.

Independensi Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit dan POJK 55/2015, Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan independensi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang didokumentasikan oleh Perseroan.

Salah satu dari anggota Komite Audit merupakan pihak yang independen yang berasal dari luar Perseroan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham utama Perseroan.

Keberadaan pihak independen ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan diantara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan Perseroan dan Pemangku Kepentingan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugas-tugas berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan implementasi manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang termasuk dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Wewenang Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Audit Committee Independence

In accordance with Audit Committee Charter and POJK 55/2015, the Audit Committee of the Company acts Independently to perform their duties and responsibilities. All Members of the Company's Audit have fulfilled the independence requirement, as set out under the Statement Letter documented by the Company.

At least 1 (one) person of the members of the Committee Audit shall be an independent party who hail from the outside of the Company and who are independent from the authority of the other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the main Shareholders of the Company.

The existence of the independent party intended to create an objective environment and to uphold fairness among various interests, including the interests of the Company and Stakeholders, as a key principle in the decision-making of the Audit Committee.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners and assist the Board of Commissioners to perform duties below:

1. Performing review on financial information that will be issued by the Company, such as the financial statement, projections and other financial information.
2. Performing review on the Company's compliance on regulations and laws in the Capital Market and other regulations related to the Company's business activities.
3. Performing review on the audit implementation by the Internal Auditor.
4. Reporting to the Board of Commissioners the various risks faced by the Company and the implementation of risks management by the Board of Directors.
5. Performing other duties given by the Board of Commissioners to the extent the duties are in the scope of the Board of Commissioners' duties and responsibilities according to the regulations and laws.

Audit Committee Authority

To perform their duties, the Audit Committee have several authority as follows:

1. Access the documents, data and Company's information concerning to the employees, fund, assets and Company's resource required;
2. Communicate directly with the employees, including but not limited the Board of Directors and other party who runs the internal audit function, risk management and Accountant relating to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. Involve the independent party outside the member of Audit Committee intended to assist its duties (if required);
4. Implement other authorities given by the Board of Commissioners.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Komite Audit.

Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat Komite Audit harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota yang hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah mengadakan rapat Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Komite Audit dalam rapat:

Komite Audit Audit Committee	% Kehadiran Rapat % Meeting Attendance
Jonathan Limborg Parapak	100
Lim Kwang Tak	100
Herman Latief	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris secara independen dengan melaksanakan fungsi pengawasan pelaporan keuangan, penelaahan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pemantauan terhadap proses pelaksanaan audit internal.

Selama tahun 2019, pelaksanaan peran dan tanggung jawab Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Piagam Komite Audit, yaitu:

- Penelaahan Informasi dan Kinerja Keuangan Komite Audit menelaah dan berdiskusi dengan manajemen mengenai Laporan Keuangan audit final Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan informasi keuangan lainnya.
- Penelaahan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Komite Audit melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perseroan pada hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk juga di dalamnya melakukan pemantauan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bidang usaha Perseroan.
- Penelaahan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Audit Internal Komite Audit telah melakukan pertemuan secara berkala dengan tim Audit Internal dan melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Auditor Internal

Audit Committee Meetings

Audit Committee meetings held periodically at least 1 (one) time in 3 (three) months. Audit Committee meetings can be conducted if attended by more than 2/3 of the Audit Committee members.

Decision of the Audit Committee meetings must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of the Audit Committee members who attends the meeting. The results of each meeting of the Audit Committee stated in the minutes of meetings, including if there is a difference of opinion (*dissenting opinions*), which was signed by all members of the Audit Committee were present and submitted to the Board of Commissioners.

Throughout 2019, the Audit Committee has held meeting of the Audit Committee of 4 (four) times. The following table contains information about the attendance of the Audit Committee in the meetings:



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Tertanggal 8 Desember 2014 (“**POJK 34/2014**”). Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah mengeluarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang berisi pedoman dan tata tertib yang mengatur kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi (“**Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi**”). Piagam ini telah dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-002/LN/CSL/IV/17 tanggal 21 April 2017 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keanggotaan dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi
Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-002/LN/CSL/IV/17 tanggal 21 April 2017. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners, based on Indonesian OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Public Company dated on December 8, 2014 (“**POJK 34/2014**”). The establishment of the Nomination and Remuneration Committee is an integral part of the Company’s efforts to implement the principles of Good Corporate Governance, which covers aspects of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, justice and equity.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Company has issued a Nomination and Remuneration Committee’s Charter which contains guidelines and procedures that govern the activities of the Nomination and Remuneration Committee (“**Nomination and Renumeration Committee’s Charter**”). This charter has been drawn up and signed by all members of the Board of Commissioners and is an integral and inseparable part of the Decree of the Board of Commissioners Number SK-002/LN/CSL/IV/17 dated April 21, 2017 on the Establishment of Nomination and Remuneration Committee.

Membership and Tenure of Nomination and Remuneration Committee

By the increasing complexity of the duties and functions of the Board of Commissioners in monitoring the Company, then the Board of Commissioners has established a Nomination and Remuneration Committee based on the decision of the Board of Commissioners of the Company Number SK-002/LN/CSL/IV/17 dated April 21, 2017. The composition of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Pengangkatan Appointment	Keterangan Remarks
Jonathan Limpong Parapak	Ketua Chairman	Diangkat sejak tanggal 21 April 2017 Appointed as of April 21, 2017	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)
Ali Chendra	Anggota Member	Diangkat sejak tanggal 21 April 2017 Appointed as of April 21, 2017	Pihak Independen Independent Party
Ishak Kurniawan	Anggota Member	Diangkat sejak tanggal 21 April 2017 Appointed as of April 21, 2017	Pihak Independen Independent Party

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota berasal dari Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas akan berlaku terhitung sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan mereka setiap saat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk POJK 34/2014.

Based on the Nomination and Remuneration Committee Charter, Nomination and Remuneration Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners meeting. Membership of Nomination and Remuneration Committee consist of at least 3 (three) members, consisting of at least 1 (one) member is the Independent Commissioner, acting as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.

The appointment of Chairman and Member of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as above mentioned dated April 21, 2017 until the closing date of the General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2019, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time in accordance with the applicable laws and regulations, including POJK 34/2014.

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination and Remuneration Committee Profile



JONATHAN LIMBONG PARAPAK

Ketua
Chairman

Untuk profil lengkapnya silahkan dilihat halaman profil Dewan Komisaris.

For full profile, please see the Board of Commissioners profile page.



ALI CHENDRA

Anggota
Member

Bapak Ali Chendra Lahir di Medan, usia 59 tahun. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Meraih gelar Diploma Teknologi Komputer dari Control Data Institute, Toronto. Beliau diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2015.

Mr. Ali Chendra was born in Medan, 59 years old. An Indonesian citizen and domicile in Jakarta-Indonesia. Holds a Diploma degree in Computer Technology from Control Data Institute, Toronto. He was appointed as a member of the Company's Nomination and Remuneration Committee since 2015.

Beliau memulai karirnya sebagai Staf Teknis di PT Metrodata/Wang Komputer (1979-1983), kemudian menjabat sebagai Direktur di PT Total Data (1983- 1993), Direktur PT Telplus Digitalindo dan PT Telepoint Nusantara (1993-1999), menjabat beberapa posisi di MNC Group (2001-2009), Group Managing Director di PT Infracom Telesarana (2009-2012), Presiden Komisaris PT Skybee Tbk (2009-2012), Presiden Direktur PT Indonesia Media Televisi (2012-2015), Komisaris PT Matahari Putra Prima Tbk (2013-2015), dan sebagai Presiden Direktur PT First Media Tbk (2013- 2017). Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Multipolar Technology Tbk (2014-sekarang), dan sebagai Komisaris PT First Media Tbk (2017-sekarang).

He started his career as a Technical Staff member of PT Metrodata/Wang Komputer (1979-1983), then serve as a Director of PT Total Data (1983-1993), a Director of PT Telplus Digitalindo and PT Telepoint Nusantara (1993-1999), held various positions in MNC Group (2001- 2009), a Group Managing Director at PT Infracom Telesarana (2009-2012), a President Commissioner of PT Skybee Tbk (2009-2012), a President Director of PT Indonesia Media Televisi (2012-2015), a Commissioner of PT Matahari Putra Prima Tbk (2013-2015), and as a President Director of PT First Media Tbk (2013-2017). He currently serves as a Vice President Commissioner of PT Multipolar Technology Tbk (2014-present), and as a Commissioner of PT First Media Tbk (2017-present).



ISHAK KURNIAWAN

**Anggota
Member**

Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun, lahir di Samarinda. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Kristen Petra, Surabaya, dan *Master of Business Administration* dari San Diego State University, California. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2015.

An Indonesian citizen, 62 years old, was born in Samarinda. Holds Bachelor of Science in Civil Engineering from Petra Christian University, Surabaya, and Master of Business Administration from San Diego State University, California. He was appointed as a member of the Company's Nomination and Remuneration Committee since 2015.

Bapak Ishak memiliki pengalaman 12 tahun di sektor perbankan. Beliau mengawali karirnya sebagai *Senior Financial Analyst* di *Household Finance Corporation*, Pomona, California, Amerika Serikat (1989-1990). Kemudian pada tahun 1991, beliau ditunjuk sebagai asisten untuk *Customer Service Director*, dan juga pernah menjabat sebagai *Head of Operations Support* di Citibank Indonesia (1991-1993), hingga tahun 2008 beliau menjabat sebagai *Country Human Resources Officer* di Citibank Indonesia. Beliau saat ini memegang posisi *HR Director* di PT Lippo Karawaci Tbk sejak April 2008.

He was appointed as a member of the Company's Nomination and Remuneration Committee since 2015. Mr. Ishak 12 years experience in the banking sector. He started his career as Senior Financial Analyst, Household Finance Corporation, Pomona, California, USA (1989-1990). In 1991, he was appointed as Assistant to the Customer Service Director, and also Head of Operation Support of Citibank Indonesia (1991-1993), until 2008 he served as Country Human Resources Officer of Citibank. He is currently holds the position of HR Director of PT Lippo Karawaci Tbk a position he has held since April 2008.



Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan piagam dan POJK 34/2014, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pihak yang independen yang berasal dari luar Perseroan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta pemegang saham utama Perseroan.

Keberadaan pihak independen ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan diantara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan Perseroan dan Pemangku Kepentingan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selain memenuhi persyaratan umum keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, pihak independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham utama Perseroan;
2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan;
4. Tidak berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
5. Tidak merangkap jabatan sebagai Direksi Perseroan.

Nomination & Remuneration Committee Independence

Based on the Charter and POJK 34/2014, the Nomination and Remuneration Committee shall perform its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party and in accordance with prevailing laws and regulations.

One of the members of the Nomination and Remuneration Committee shall be an independent party who hail from external of the Company and who is independent from the authority of the other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the main Shareholders of the Company.

The existence of the independent party intended to create an objective environment and to uphold fairness among various interests, including the interests of the Company and Stakeholders, as a key principle in the decision-making of the Nomination and Remuneration Committee.

In addition to fulfilling the requirements for membership of the Nomination and Remuneration Committee, the independent party shall meet the following requirements:

1. Not have an affiliate relationship to the Company, the Board of Directors, Board of Commissioners or the Company's main Shareholders;
2. Have an experience with the Nomination and/or Remuneration;
3. Not concurrently position as the other committee member in the Company;
4. Not come from the managerial party under the Board of Directors of the human resources;
5. Not concurrently position as the Company's Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dalam menjalankan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan tetap dan/atau variabel;
 - Kebijakan atas remunerasi;
 - Besaran atas remunerasi;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

In conducting its role, the Nomination and Remuneration Committee shall act independently in performing their duties. Nomination and Remuneration Committee has the duties and responsibilities are as follows:

1. In implementing the Nomination function, Nomination and Remuneration Committee has the duties and responsibilities are as follows:
 - Give recommendations to the Board of Commissioners on :
 1. The membership composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 2. Required policies and criteria for nomination procedures;
 3. Performance evaluation policies for Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - Make recommendations to the Board of Commissioners on programs for developing the capabilities of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
 - Propose to the Board of Commissioners any candidate who might qualify as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners to be submitted to a General Meeting of Shareholders (GMS).
2. In implementing the Remuneration function, Nomination and Remuneration Committee has the duties and responsibilities are as follows :
 1. Give recommendations to the Board of Commissioners on :
 - Remuneration structure may be in form of salary, honorarium, incentives and/or allowances;
 - Policy on remuneration; and
 - Amount of Remuneration.
 2. Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of the Board of Directors and/or Board of Commissioners in accordance with their remunerations.

Prosedur Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Merujuk pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur fungsi nominasi dan remunerasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam menjalankan fungsi remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan publik sejenis dan skala usaha dari perusahaan publik dalam industrinya;
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan publik;
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Nomination and Remuneration Function Procedures

Refer to the Nomination and Remuneration Committee's Charter, the procedure of nomination and remuneration functions of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. In implementing the nomination function, Nomination and Remuneration Committee shall to implement procedure as follows:
 - Composing and nomination process of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - Develop policies and criteria required in the process of nomination of candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - Assist the implementation of the evaluation of the performance of members of the Board of Directors and/or Board Of Commissioners;
 - Develop capacity building programs of Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - Examine and propose candidates who qualify as members of the Board Of Directors and/or Board Of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
2. In implemeting the remuneration function, Nomination and Remuneration Committee shall to implement procedure as follows :
 - Structuring the remuneration of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Develop a policy on remuneration to the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Compiling the amount on remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
3. Preparation of the structure, policies, and the amount of remuneration to be noticed:
 - The Remuneration applicable at the industry accordance with the issuer's business activities or similar public companies and the scale of business of the issuer or public company in its industry;
 - Duties, responsibilities, and authority of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners is associated with the achievement of the objectives and performance of the issuer or public company;
 - Target performance or the performance of individual members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
 - Allowance balance between the fixed and variable nature.
4. Structure, policies, and remuneration should be evaluated by the Nomination and Remuneration Committee at least once in a year.



Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan apabila:

1. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Setiap hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangi oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 3 (tiga) kali. Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019:

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination & Remuneration Committee	% Kehadiran Rapat % Meeting Attendance
Jonathan Limbong Parapak	100
Ali Chendra	100
Ishak Kurniawan	100

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 35/ POJK.04/2014, Perseroan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi dan juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. BOD-006/ CSL-LN/IX/18, tanggal 12 September 2018, Perseroan telah menunjuk Fellianty Widjaja sebagai Sekretaris Perusahaan.

Referring to the OJK Regulation Number 35/ POJK.04/2014, the Company appoints a Corporate Secretary who has duties as a liaison officer between the Company and the Company's Shareholders, OJK, and other stakeholders. The Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and report its execution of duties to the Board of Commissioners.

Based on the Decree of the Board of Directors Number BOD-006/ CSL-LN/IX/18 dated September 12, 2018, the Company has appointed Fellianty Widjaja as Corporate Secretary.



FELLIANTY WIDJAJA*

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun, lahir di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara.
An Indonesian Citizen, 48 years old, was born in Jakarta. Holds a Bachelor of Economics from Tarumanagara University.

Bergabung dengan Perseroan sebagai Deputy Chief Financial Officer sejak tahun 2011, dan diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak September 2018.

Beliau mengawali karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (*a member firm of KPMG International*) dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor (1995-1999). Setelah itu beliau melanjutkan karirnya dengan bergabung pada divisi Financial Advisory di PT Siddharta Consulting (*a member firm of KPMG International*) (1999-2011) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur pada divisi Transaction Services.

*Telah diganti oleh Bapak Johannes per Desember 2019

*Has been replaced by Mr. Johannes per December 2019

Has served the Company as Deputy Chief Financial Officer since 2011 and was appointed as the Company's Corporate Secretary in September 2018.

She started her career as an Auditor at Public Accountant Firm Siddharta Widjaja (*a member firm of KPMG International*) with her last position as supervisor (1995-1999). She continued her career in Financial Advisory division of PT Siddharta Consulting (*a member firm of KPMG International*) (1999-2011), with her last position as Transaction Services Director.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada website Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Main duties of the Corporate Secretary are:

1. Monitoring the development in the Capital Market sector particularly regarding regulations applied in the Capital Market.
2. Providing inputs to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in order to comply with laws and regulations in the Capital Market sector.
3. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of Good Corporate Governance that includes :
 - Disclosure of information to the public, including the availability of information on the website of the Company;
 - Timely Submission of a report to the Financial Services Authority;
 - Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;
 - Organizing and documenting the meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and
 - Organizing corporate orientation programs for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. As liaison between the Company and the Shareholders, OJK, and other Stakeholders.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memandu Perseroan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perseroan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut.
2. Perseroan menerbitkan 4 (empat) laporan keuangan.
3. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI)) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan BAE (Biro Administrasi Efek). Korespondensi yang dilakukan sebagai berikut:
 - Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek sebanyak 12 kali;
 - Penyampaian korespondensi terkait Laporan Keuangan sebanyak 6 kali.
 - Penyampaian Laporan Tahunan sebanyak 1 kali;
 - Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik dan Tanggapan atas pertanyaan Bursa sebanyak 2 kali;
 - Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik dan tanggapan atas permintaan dan atau pertanyaan OJK sebanyak 18 kali;
 - Penyampaian korespondensi terkait dengan RUPS sebanyak 25 kali;
 - Penyampaian korespondensi terkait dengan Paparan Publik sebanyak 3 kali; dan
 - Penyampaian laporan data hutang/kewajiban Perusahaan dalam valuta asing sebanyak 12 kali.
4. Menyampaikan keterbukaan informasi terkait Perseroan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, website, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perseroan.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Paparan Publik (Public Expose).

Corporate Secretary's Activities

The Corporate Secretary's activities throughout 2019 were:

1. Guiding the Company to always comply with the regulations on the capital market and monitoring the development of new regulations to ensure that the Company has implemented the regulations.
2. The Company issued 4 (four) financial reports.
3. Performing correspondences with the capital market regulator (OJK and the Indonesia Stock Exchange (IDX)) and other supporting institutions such as KSEI (the Indonesian Central Securities Depository) and BAE (the Stock Administration Bureau). The correspondences were performed, which are:
 - The submission of Monthly Report of Securities Holder Registration 12 times;
 - The submission of correspondence related Financial Reports 6 times;
 - The submission of Annual Report 1 time;
 - The submission of Public Disclosure and response to the Stock Exchange questions 2 times;
 - The submission of Public Disclosure and response to OJK questions 18 times.
 - The submission of correspondence related to the General meeting of Shareholders 26 times;
 - The submission of correspondence related to the Public Expose 3 times; and
 - The submission of report of company's data debt/liability in foreign exchange 12 times.
4. Delivering the disclosures related to the Company delivered through reports, either regulated or not regulated, such as those taking forms of press release and reports on the website, and serving every request for information related to the Company's situation.
5. Coordinating the Annual General Meeting of Shareholders.
6. Coordinating the implementation of Public Expose.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan menjalankan program peningkatan kompetensi yang didapat melalui program sosialisasi, pelatihan, seminar, maupun workshop. Berikut berbagai program kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan pada tahun 2019:

No	Program Program	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Tanggal Date
1	Yang Perlu Diperhatikan oleh Corporate Secretary dalam Pembentukan Organ Board: Komite, <i>Corporate Secretary</i> dan Internal Audit.	ICSA, OJK, dan BEI	Mainhall Bursa Efek Indonesia	9 April 2019 April 9, 2019
	What is the Corporate Secretary concern in the Formation of the Organ Board: Committee, Corporate Secretary and Internal Audit.			
2	Digitalisasi dan Strategi Korporasi. Digitalization and Corporate Strategy	ICSA	Intiland Tower Jl. Jend Sudirman Kav. 32, Jakarta	23 April 2019 April 23, 2019
3	Seminar mengenai Laporan Bisnis dalam Tujuan Pembangunan Keberlanjutan.	BEI dan Global Reporting Initiative (GRI)	Mainhall Bursa Efek Indonesia	25 April 2019 April 25, 2019
	Seminary about Business Reporting on the Sustainable Development Goals			
4	Sosialisasi Uji Coba Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Antara IDXnet dengan SPE Otoritas Jasa Keuangan.	BEI dan OJK	Mainhall Bursa Efek Indonesia	14 Mei 2019 May 14, 2019
	Socialization of Trial Integrated Electronic Reporting Facilities between IDXnet and the Financial Services Authority.			
5	Seminar POJK 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.	OJK & BEI	Main Hall Bursa Efek Indonesia	24 Juni 2019 June 24, 2019
	Seminar about POJK 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to POJK Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Addition of Public Companies by Giving Pre-emptive Rights.			
6	Strategi Implementasi GCG yang efektif dengan tugas Corporate Secretary dan POJK No 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	ICSA, OJK & BEI	Main Hall Bursa Efek Indonesia	2 Juli 2019 July 2, 2019
	The Effective of GCG implementation strategy with the duties of Corporate Secretary and POJK Number 21/POJK.04/2014 concerning Implementation of Public Companies Governance Guidelines.			
7	Manajemen Risiko Lanjutan Menyambut Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan dalam Industri 4.0	ERMA	Anvaya Hotel, Bali	5 - 6 Desember 2019 December 5 - 6, 2019
	Enterprise Risk Management Next Generation Embracing Governance, Risk, and Compliance in Industry 4.0			

HUBUNGAN INVESTOR

Investor Relation



JOEL PETER ELLIS

Hubungan Investor
Investor Relation

Warga Negara Australia, 36 tahun, lahir di Adelaide, Australia. Memiliki gelar Sarjana International dan Bisnis Internasional dari University of South Australia. Beliau memiliki pengalaman belajar di Normandie Ecole de Commerce di Perancis dengan konsentrasi keuangan.

Selama 10 tahun terakhir, Beliau telah bekerja di bidang keuangan di perusahaan-perusahaan dan lembaga manajemen keuangan di Australia, Hong Kong dan Indonesia. Sebelum menjadi kepala Hubungan Investor di Perseroan, beliau bekerja di Macquarie Securities Group yang mencakup ekuitas di Asia yang berbasiskan di Jakarta dan Hong Kong.

Aktivitas Hubungan Investor

Penerapan prinsip-prinsip Tata kelola yang baik, yang mengutamakan transparansi merupakan tujuan Perseroan dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berkomitmen mengkomunikasikan strategi dan aktivitas bisnisnya secara jelas kepada pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan secara aktif berkomunikasi dengan para investor melalui kegiatan hubungan investor yang tertata dengan baik. Tim Hubungan Investor Perseroan secara proaktif menyebarkan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada komunitas investasi sehingga strategi, kegiatan usaha utama, dan kinerja Perseroan dapat diinformasikan dengan tepat kepada investor. Selain itu, Tim Hubungan Investor juga berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dan para Pemegang Saham atau Pemangku Kepentingan serta komunitas pasar modal.

Tim Hubungan Investor Perseroan bersama dengan manajemen Perseroan aktif menemui investor baik yang diselenggarakan secara langsung oleh Perseroan, maupun melalui kunjungan investor atas dasar permintaan dari perusahaan sekuritas terkemuka, partisipasi dalam konferensi investor, atau roadshow yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri.

An Australian citizen, 36 years old, was born in Adelaide, South Australia. Joel Ellis has a bachelor's degree in both International Studies and International Business from the University of South Australia. His studies included a year studying at Normandie Ecole de Commerce in France concentrating on finance.

He has spent the last 10 years working in finance across wealth management and institutional equities in Australia, Hong Kong and Indonesia. Prior to being head of Investor Relations at the Company he worked at Macquarie Securities Group covering Asian equities in both Jakarta and Hong Kong.

Investor Relations Activities

Proper implementation of governance principles, especially transparency is the Company's main objective to increase shareholder value. To that end, the Company is committed to clearly communicating its strategy and business activities to stakeholders. To achieve this objective, the Company actively communicates with investors and analysts through well planned investor relations' activities. The Company's Investor Relation team proactively disseminates relevant and timely information to the investment community so that investors can follow the Company's progress including its strategy, main business activities, and performance. In addition, the Investor Relation team also serves as liaison between the Company and its shareholders or stakeholders and the capital market community.

The Investor Relation team together with the Company's management actively meets with investor held directly by the Company or by visiting investors at the request of leading securities companies, participating in investor conferences, or roadshows held in Indonesia or abroad.



Perseroan secara proaktif menyebarkan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada komunitas investasi sehingga strategi, kegiatan usaha utama, dan kinerja Perseroan dapat diinformasikan dengan tepat kepada investor.

The Company proactively disseminates relevant and timely information to the investment community so that investors can follow the Company's progress including its strategy, main business activities, and performance

Berikut kegiatan Hubungan Investor Perseroan selama tahun 2019:

The Company's Investor Relation activities during 2019 as follows:

No	Kegiatan Event	Tanggal Date	Location
1	Non Deal Road Show with Morgan Stanley	April 21, 2019	Singapore
2	Non Deal Road Show with Credit Suisse	April 28-29, 2019	Boston & New York City
3	Non Deal Road Show with HSBC	July 4-5, 2019	Singapore & Hong Kong
4	Non Deal Road Show with CIMB	September 11-13, 2019	Kuala Lumpur, Singapore and Bangkok
5	Non Deal Road Show with Mandiri	October 21-23, 2019	London, Copenhagen, Stockholm and Vienna

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information And Data

Masyarakat umum dan para investor dapat mengunjungi website Perseroan untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan, atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui email Sekretaris Perusahaan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Perseroan. Sedangkan untuk informasi dan data saham Perseroan serta peluang investasi, masyarakat dapat menghubungi Investor Relation Perseroan melalui email *Investor Relation*.

Email Sekretaris Perusahaan:
corporate.secretary@linknet.co.id
 Email Investor Relation:
ir@linknet.co.id

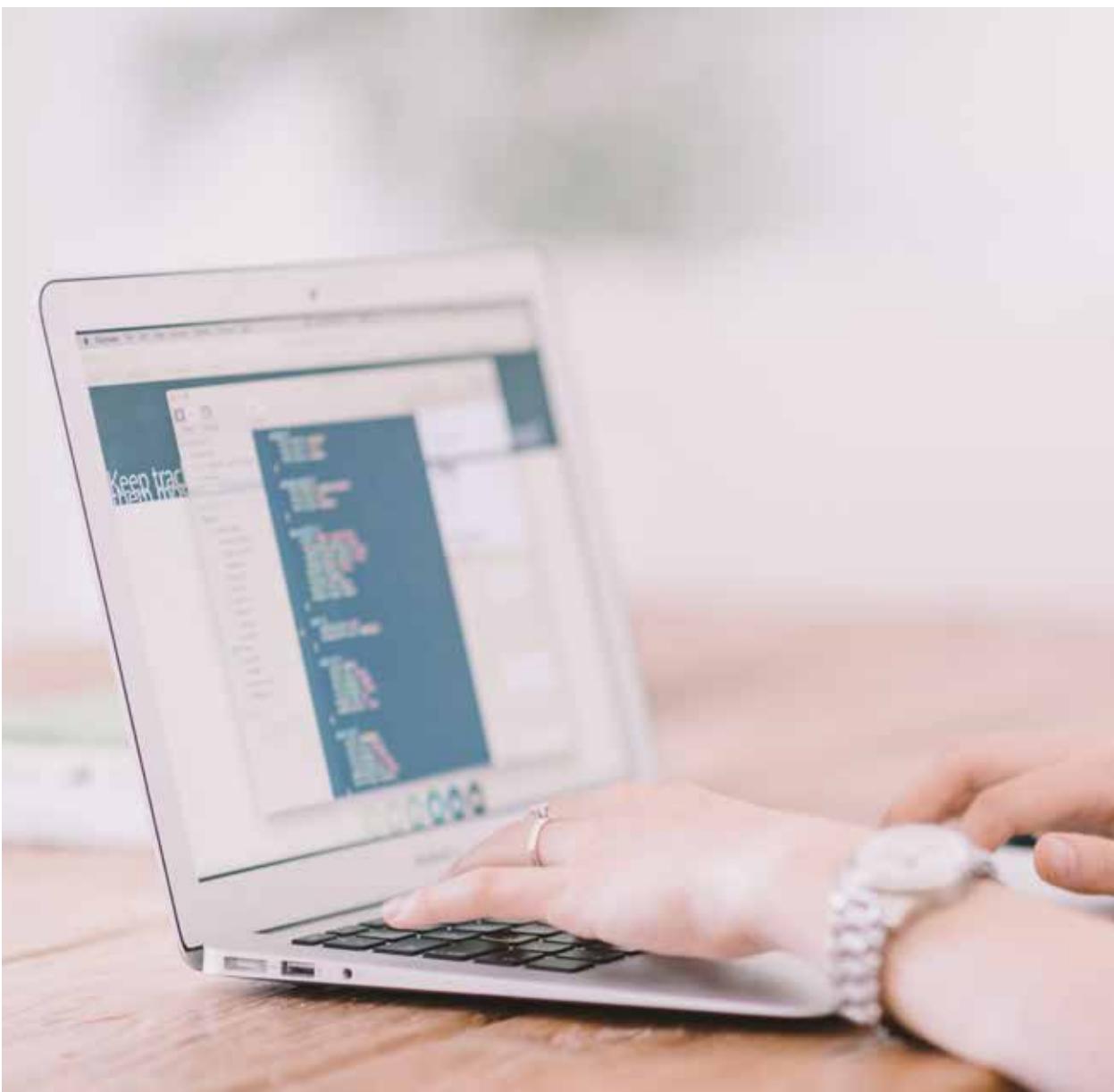
Selama tahun 2019 Perseroan telah mengeluarkan siaran pers serta kinerja hasil usaha Perseroan setiap triwulan baik di media massa, idxNet, dan website Perseroan.

The public and investors may visit the website of the Company to obtain information about the Company's business activities, or can contact the Corporate Secretary by Corporate Secretary's email to obtain further information regarding the Company. As for the information and data as well as the Company's share of investment opportunities, the public may contact the Company's Investor Relations by Investor Relations' email.

Corporate Secretary Email:
corporate.secretary@linknet.co.id
 Investor Relations Email:
ir@linknet.co.id

During 2019 the Company has issued a press release as well as the performance of the Company's quarterly in the mass media, idxNet, and the Company's website.

Bentuk Keterbukaan Form of Disclosure	2019	2018	2017
Iklan Publikasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan Midyear Financial Statement Publication Advertisement	1	1	1
Iklan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Annual Financial Statement Publication Advertisement	1	1	1
Laporan Tahunan Annual Report	1	1	1
Siaran Pers Press Release	12	5	4
Paparan Kinerja Performance Presentation	5	5	4



Website Perseroan

Masyarakat bisa mendapatkan informasi dan data Perseroan dengan mengakses website Perseroan. Informasi yang dapat diakses antara lain Profil Perseroan, Pengurus Perseroan, Unit Usaha Perseroan, Tata Kelola Perusahaan, Berita dan Kegiatan Perseroan, dan Informasi Saham Perseroan. Seluruh informasi tersebut telah tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Website Perseroan dapat diakses di www.linknet.co.id.

Untuk informasi terkait produk dan layanan yang disediakan Perseroan, dapat diakses melalui website www.firstmedia.com. Dengan adanya website tersebut masyarakat dapat mengecek area jangkauan lokasi hunian atau kantor yang ingin berlangganan produk Perseroan. Selain itu masyarakat juga dapat mengetahui produk yang ditawarkan Perseroan dan produk yang akan dirilis, tagihan bulanan dan pembayarannya secara online, serta layanan penjualan maupun keluhan pelanggan.

The Company's Website

The public can obtain information and records of the Company by accessing the Company's website. Information that can be accessed include a profile of the Company, the Management of the Company, the Company's Business Unit, Corporate Governance, News and Events of the Company, and Shares Information of the Company. All such information is already available in Bahasa and English. Company's website can be accessed at www.linknet.co.id.

For information related to the Company's products and services, can be accessed through the website www.firstmedia.com. With such website, public can check the coverage area locations of residential or office who wants to subscribe for the Company's products. In addition, people can also know the products offered by the Company and products to be released, monthly bills and payments online, as well as sales services and customer complaints.

CROSS REFERENCES SEJIK 30-2016 Referensi Sjiang SEOJK 30-2016	CORPORATE GOVERNANCE Tata Kelola Perusahaan	MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS Analisa Dan Pembahasan Manajemen	COMPANY PROFILE Profil Perusahaan	MANAGEMENT REPORT Laporan Manajemen	FINANCIAL & PERFORMANCE HIGHLIGHT Ikhtisar Kinerja Keuangan & Performa Usaha	PREFACE Pendahuluan
--	---	---	---	---	--	------------------------

Media Sosial

Perseroan cukup aktif dalam memanfaatkan Media Sosial untuk menyampaikan informasi kepada dan mendapat informasi masyarakat. Informasi yang disampaikan dapat berupa informasi mengenai produk-produk Perseroan yang telah rilis maupun yang akan dirilis. Selain itu Perseroan juga mengeluarkan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang dapat diakses melalui Media Sosial. Akun Media Sosial untuk Produk dan Layanan Perseroan:

Facebook: FirstMedia.IND

Twitter: @FirstMediaCares | @FirstMediaWorld

Youtube: First Media Indonesia

Instagram: First Media Worlds (@firstmediaworld)

Akun Media Sosial untuk Lowongan Pekerjaan:

Facebook: <https://www.facebook.com/linknetofficial>

Twitter: https://twitter.com/linknet_career

Instagram: @linknet_career

LinkedIN: <https://www.linkedin.com/company/ptlinknettbk>

Iklan Publikasi Pemberitahuan/Pengumuman

Selama tahun 2019, Perseroan telah 11 (sebelas) kali melakukan pemasangan iklan pengumuman di media cetak sebagaimana tabel berikut:

Publikasi Publication	Tanggal Date	Media
Pengumuman Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetorkan Perseroan Announcement of the Reduction of the Issued and Paid-Up Capital of the Company	25 Februari 2019 February 25, 2019	Koran Kontan
Pengumuman RUPST Announcement of AGMS	20 Maret 2019 March 20, 2019	Investor Daily
Iklan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Annual Financial Statement Publication Advertisement	29 Maret 2019 March 29, 2019	Investor Daily
Pemanggilan RUPST Invitation of AGMS	4 April 2019 April 4, 2019	Investor Daily
Ringkasan Risalah RUPST Summary of AGMS	30 April 2019 April 30, 2019	Investor Daily
Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final Schedule of Final Cash Dividend Distribution	30 April 2019 April 30, 2019	Investor Daily
Pengumuman RUPSLB Announcement of EGMS	23 Juli 2019 July 23, 2019	Investor Daily
Pengumuman Rencana Pembelian Kembali Saham Announcement of Share Buyback Plan	23 Juli 2019 July 23, 2019	Investor Daily
Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2019 Midyear Financial Statements as of June 30, 2019	30 Juli 2019 July 30, 2019	Suara Pembaruan
Pemanggilan RUPSLB Invitation of EGMS	7 Agustus 2019 August 7, 2019	Investor Daily
Ringkasan Risalah RUPSLB Summary of EGMS	2 September 2019 September 2, 2019	Investor Daily

Social Media

The Company is quite active in using social media to convey information to and receive information from the public. The information submitted may include information regarding the Company's products that have been released or will be released. The Company also issued information on job vacancies, which are accessible via social Media. Social Media Accounts for the Company's Products and Services:

Facebook: FirstMedia.IND

Twitter: @FirstMediaCares | @FirstMediaWorld

Youtube: First Media Indonesia

Instagram: First Media Worlds (@firstmediaworld)

Social Media Accounts for Career Oportunity:

Facebook: <https://www.facebook.com/linknetofficial>

Twitter: https://twitter.com/linknet_career

Instagram: @linknet_career

LinkedIN: <https://www.linkedin.com/company/ptlinknettbk>

Publication Advertisment of Notice/Announcement

During 2019, the Company has published 11 (eleven) notice advertisements in printed media as follows:

Siaran Pers

Siaran pers merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi dari Perseroan. Selama tahun 2019, Perseroan telah mengeluarkan 12 (dua belas) kali siaran pers yang tersebar di berbagai media elektronik maupun cetak.

Press Release

Press release is one of the form of information disclosure of the Company. During 2019, the Company has published 12 (twelve) press releases through various electronic and printed media.

Siaran Pers Press Release	Tanggal Date	Media
PT Link Net Tbk dengan Merek First Media Optimis Pasar Pay TV dan Fixed Broadband Cable Internet akan Terus Bertumbuh di Tahun 2019	18 Januari 2019	Berbagai media elektronik dan cetak
PT Link Net Tbk with First Media Brand Optimistic about Pay TV Market and Fixed Broadband Cable Internet Will Continue to Grow in 2019	January 18, 2019	Various media electronic and printed media
Terima Penghargaan WOW Brand 2019, Bukti First Media mendapat Tempat di Hati Masyarakat Indonesia	14 Maret 2019	Berbagai media elektronik dan cetak
Obtained WOW Brand 2019 Award, Proof First Media gets Place in the Heart of Indonesian Society.	March 14, 2019	Various media electronic and printed media
Kinerja Perseroan FY 2018 Company Performance FY 2018	28 Maret 2019 March 28, 2019	Berbagai media elektronik dan cetak Various media electronic and printed media
First Media Raih Penghargaan <i>Indonesia Content Marketing Awards (ICMA)</i> untuk <i>The Best Content Marketing Implementation in Industry</i> .	29 Maret 2019	Berbagai media elektronik dan cetak
First Media won the <i>Indonesia Content Marketing Awards (ICMA)</i> Award for <i>The Best Content Marketing Implementation in Industry</i> .	March 29, 2019	Various media electronic and printed media
First Media Kolaborasi dengan Partner dan Pemerintah Kembangkan Ekosistem eSports di Indonesia.	31 Maret 2019	Berbagai media elektronik dan cetak
First Media in Collaboration with Partners and Government to Develop eSports Ecosystems in Indonesia.	March 31, 2019	Various media electronic and printed media
Link Net Menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Pemegang Saham Menyetujui Jumlah Pembayaran Dividen Sebesar Rp674 Miliar Dengan Rasio Pembayaran Dividen Sebesar 60% Dari Laba Bersih Yang Dinormalisasi. Pemegang Saham Menyetujui Pengangkatan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Baru.	26 April 2019	Berbagai media elektronik dan cetak
Link Net Concludes Annual General Meeting Of Shareholders. Shareholders Approve Record Dividend Payment Of Rp674 Billion, A 60% Dividend Payout Ratio Of Normalized Net Earnings. Shareholders Approve Appointment Of New Board of Directors And Board of Commissioners.	April 26, 2019	Various media electronic and printed media
Kinerja Kuartal I 2019 Performance of Q1 2019	29 April 2019 April 29, 2019	Berbagai media elektronik dan cetak Various media electronic and printed media
Kinerja Kuartal II 2019 Performance of Q2 2019	30 Juli 2019 July 30, 2019	Berbagai media elektronik dan cetak Various media electronic and printed media
Kinerja Kuartal III 2019 Performance of Q3 2019	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Berbagai media elektronik dan cetak Various media electronic and printed media

Siaran Pers Press Release	Tanggal Date	Media
Perseroan membuka layanan internet di Batam sebagai bentuk membangun pengembangan ekonomi digital.	14 November 2019	Berbagai media elektronik dan cetak
The Company opens internet services in Batam as a form of digital economic development.	November 14, 2019	Various media electronic and printed media
First Media Dukung Peningkatan Layanan Kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) - Sumbangan 1 (satu) unit kendaraan Ambulans untuk RS. St. Antonius Jopu, Ende.	17 November 2019	Berbagai media elektronik dan cetak
First Media Supports the Improvement of Health Services in East Nusa Tenggara (NTT) - Donation of 1 (one) Ambulance vehicle for the hospital. St. Antonius Jopu, Ende.	November 17, 2019	Various media electronic and printed media
Dalam mendukung Dunia Pendidikan. Perseroan mengandeng Yayasan BenihBaik.com untuk memberikan jaringan akses internet gratis bagi Sekolah-sekolah.	6 Desember 2019	Berbagai media elektronik dan cetak
In supporting of Education. The company cooperates with BenihBaik.com Foundation to provide free internet access for schools.	December 6, 2019	Various media electronic and printed media

PAPARAN KINERJA

Performance Presentation

Perseroan mengadakan acara Paparan Publik di tahun 2019 sebagai bentuk penuhan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E butir V.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Adapun acara Paparan Publik yang diselenggarakan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Paparan Publik Tahunan telah dilaksanakan pada:
 - Hari/ Tanggal : Jumat, 26 April 2019
 - Waktu : Pukul 11:00-12:00 WIB
 - Tempat : Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
2. Manajemen Perseroan yang hadir saat itu:
 - Marlo Budiman : Presiden Direktur/ Chief Executive Officer (CEO)
 - Victor Indajang : Board of Management (Deputy of CEO)
 - Johannes : Board of Management (Chief Financial Officer)
3. Publik yang hadir :
 - Para Pemodal pribadi
 - Wartawan dari berbagai media massa

The Company held a Public Expose in 2019 as a form to meet the Regulation I-E point V.2 Decision of the Board of Director of Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004, dated 19 July 2004, regarding the Obligation to Submit Information. The Public Expose event held by the Company, as follows :

1. Annual Public Expose was held on :
 - Day/date : Friday, April 26, 2019
 - Time : 11.00-12.00
 - Venue : Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
2. The Company's Management were present :
 - Marlo Budiman : President Director/ Chief Executive Officer (CEO)
 - Victor Indajang : Board of Management (Deputy of CEO)
 - Johannes : Board of Management (Chief Financial Officer)
3. Public were present :
 - The private financiers
 - Journalist from various mass media



Paparan kinerja merupakan wadah bagi Perseroan untuk menyampaikan hasil kinerjanya dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk slide presentasi. Pada tahun 2019 Perseroan menyampaikan 9 (sembilan) kali paparan kinerja yang salah satunya dalam bentuk acara Paparan Publik.

The Performance Presentation is a medium for the Company to deliver performance results in a specified period in the form of a slide presentation. In 2019 the Company delivered 9 (nine) performance presentations which one of them in the form of a Public Expose event.

No	Materi Paparan Kinerja Material of Performance Presentation	Tanggal Date	Media
1	Konferensi dan Presentasi Tahun Buku 2018 Full Year 2018 Earning Conference Call and Presentation	28 Maret 2019 March 28, 2019	Presentasi dan Publikasi di situs web Hubungan Investor Presentation & Published to Investor Relation Website
2	Paparan Kinerja Tahun Buku 2018 Performance Presentation Full Year 2018	15 April 2019 April 15, 2019	Publikasi di situs web Hubungan Investor Published to Investor Relation website
3	Kuartal 1 Konferensi dan Presentasi 1st Quarter Earnings Conference Call and Presentation	25 April 2019 April 25, 2019	Presentasi dan Publikasi di situs web Hubungan Investor Presentation & Published to Investor Relation Website
4	Paparan Publik Tahunan Annual Public Expose	26 April 2019 April 26, 2019	Investor & Wartawan Investors & Journalists
5	Paparan Kinerja Kuartal 1 Performance Presentation 1st Quarter	13 Mei 2019 May 13, 2019	Publikasi di situs web Hubungan Investor Published to Investor Relation website
6	Kuartal 2 Konferensi dan Presentasi 2nd Quarter Earnings Conference Call and Presentation	30 Juli 2019 July 30, 2019	Presentasi dan Publikasi di situs web Hubungan Investor Presentation & Published to Investor Relation Website
7	Paparan Kinerja Kuartal 2 Performance Presentation 2nd Quarter	3 Agustus 2019 August 3, 2019	Publikasi di situs web Hubungan Investor Published to Investor Relation website
8	Kuartal 3 Konferensi dan Presentasi 3rd Quarter Earnings Conference Call and Presentation	31 Oktober 2019 October 31, 2019	Presentasi dan Publikasi di situs web Hubungan Investor Presentation & Published to Investor Relation Website
9	Paparan Kinerja Kuartal 3 Performance Presentation 3rd Quarter	12 November 2019 November 12, 2019	Publikasi di situs web Hubungan Investor Published to Investor Relation website

UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK 56/2015**”). Unit Audit Internal bertugas antara lain untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal akan selalu bekerjasama dengan Komite Audit dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan dalam menciptakan tata kelola yang baik dan efisien.

Piagam Audit Internal

Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Nomor SK-003/LN/CSL/IX/18 mengenai Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal pada tanggal 12 September 2018 (“**Piagam Audit Internal**”). Piagam Audit Internal ini berisi struktur, persyaratan, kode etik, tugas dan tanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan, wewenang, dan kemandirian fungsional.

Ruang Lingkup Kegiatan

Audit Internal merupakan suatu fungsi atau kegiatan dalam Perseroan yang memberikan jasa pemeriksaan dan konsultasi (apabila diperlukan) secara independen dan obyektif untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga aktiva, memperbaiki efisiensi operasional, pengelolaan resiko dan sistem pengendalian internal. Ruang lingkup utama kegiatan Audit Internal adalah untuk menetukan apakah pengelolaan resiko, kontrol dan proses tata kelola telah mencukupi dan dapat berfungsi untuk memastikan bahwa:

1. Risiko-risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat;
2. Informasi keuangan dan operasional yang signifikan telah disajikan secara akurat, dapat diandalkan dan tepat waktu;
3. Sumber daya telah diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dijaga secara memadai;
4. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan, standar dan prosedur, serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ruang lingkup kegiatan Audit Internal juga termasuk melakukan tugas khusus yang diminta oleh Komite Audit atau Dewan Komisaris atau Direksi.

The establishment and guidelines for preparation of Charter of the Internal Audit Unit refers to OJK Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding the establishment and guidelines on the arrangement of the certificates for the internal audit unit (“**POJK 56/2015**”). The internal Audit Unit has tasks, among others, to test and evaluate the implementation of internal control and risks management system in accordance with the company's policies as well as performing examination and judgment over the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operational, human resources, marketing, information technology and other activities. In performing the duties, the Internal Audit Unit will always in cooperation with the Audit Committee and is responsible to the President Director. The establishment of the Internal Audit Unit is a realization of the company's commitment to create the good and efficient corporate governance.

Internal Audit Charter

The Board of Directors of the Company have established the Internal Audit Charter and have been approved by the Board of Commissioners through Decree Number SK-003/LN/CSL/IX/18 regarding the appointment of the Chairman of the Internal Audit Unit on September 12, 2018 (“**Internal Audit Charter**”). The Internal Audit Charter provides the structure, requirements, code of ethics, duties and responsibilities, accountability and reporting forms, authority, and functional independence.

Scope of Activities

Internal Audit is a function or activity in the Company that provides services for examination and consultation (if required) in an independent and objective manner to enhance the added value, maintain assets, improve operational efficiency, risk management and internal control system. The main scope of internal Audit activities is to determine whether risk management, control and governance process is sufficient and can function to ensure that :

1. Significant risks have been identified and managed appropriately;
2. Significant financial and operational information have been presented accurately, reliable and timely accurate;
3. Resources have been obtained economically, used efficiently and maintained adequately;
4. Implementation of activities are in accordance with the policy, standards and procedures, and in accordance with the applicable regulations and laws.

The scope of Internal Audit activities shall also include carrying out a special duty as requested by the the Audit Committee or the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Internal Audit Unit Structure and Position



Persyaratan dan Keanggotaan Audit Internal

Untuk menjalankan fungsinya, Audit Internal harus memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Piagam Audit Internal sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan kompetensi dibidangnya baik teknis audit, perundangan-undangan yang terkait, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko dan semangat kerja sama dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya serta mampu berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
2. Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan mematuhi kode etik Audit Internal;
3. Mampu menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
4. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Dengan merujuk pada persyaratan tersebut, Direksi Perseroan bersamaan dengan penetapan Piagam Audit Internal, menunjuk **Bapak Andreas Tanuwidjaja** sebagai Kepala Unit Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Nomor SK-003/LN/CSL/IX/18 pada tanggal 12 September 2018.

Kepala Audit Internal dapat membentuk tim auditor yang profesional dengan kecukupan akan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan kualifikasi professional. Auditor yang duduk dalam Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Audit Internal. Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2019, unit Audit Internal memiliki personil sejumlah 6 (enam) orang.

Requirements and Membership of Internal Audit

In performing its function, Internal Audit should meet the requirements as set forth in the Internal Audit Charter as follows:

1. Has integrity and competency in its field either audit techniques, related laws and regulations, good corporate governance and risk management and the spirit of cooperation and behavior which is professional, independent, honest, and objective in carrying out the duties and is able to interact and communicate well both orally and in writing effectively;
2. Meet the professional standard issued by the Internal Audit Association and comply with the Internal Audit code of ethics;
3. Is able to keep information and/or Company data confidential related to the implementation of duties and responsibilities unless such disclosure is required by the laws and regulations or the court stipulation/decision;
4. Is prepared to enhance the knowledge, expertise and professional capability continuously;

Refer to such requirements, the Board of Directors of the Company together with the establishment of Internal Audit Charter, has appointed Mr. Andreas Tanuwidjaja as the Head of Internal Audit Unit and it has been approved by the Board of Commissioners by the Decree Letter Number SK-003/LN/CSL/IX/18 on September 12, 2018.

The Head of Internal Audit may form a team of professional auditors with adequate knowledge, capability, experience and professional qualification. The auditor sitting in the Internal Audit shall be directly responsible to the Head of Internal Audit. The Internal Audit is prohibited to concurrently carry out duties and at the same time hold a position implementing Company operational activities. Until the end of 2019, the Internal Audit unit has 6 (six) personnels.

PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Head of Internal Audit Profile



ANDREAS TANUWIDJAJA

Kepala Unit Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun, lahir di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Beliau menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan sejak September 2018. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dalam fungsi audit dan fungsi non audit (*finance & accounting, human resources, corporate & office management, procurement & logistic*).

Mengawali karirnya sebagai Internal Auditor di PT Bank Central Asia, selanjutnya beliau melanjutkan karir di berbagai bank dan grup perusahaan, seperti PT Bank Unibank Tbk (RGM Group), PT Optik Tunggal Sempurna, ISS Indonesia (ISS World), PT MNC Investama Tbk (MNC Group), dan PT Smartfren Telecom Tbk. (Sinar Mas Group). Posisi terakhir beliau sebelum bergabung dengan Perseroan adalah sebagai *Head of Internal Audit* di PT REA Kaltim Plantations (REA Group).

An Indonesian citizen, 51 years old, was born in Jakarta. He earned a Bachelor of Economics, majoring in Accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia.

He served as Head of Internal Audit Unit of the Company since September 2018. He has more than 25 (twenty-five) years of experience in audit function and non-audit function (*finance & accounting, human resources, corporate & office management, procurement & logistic*).

Started his career as an Internal Auditor in PT Bank Central Asia, he continued his career in a number of banks and large corporate groups, e.g. PT Bank Unibank Tbk (RGM Group), PT Optik Tunggal Sempurna, ISS Indonesia (ISS World), PT MNC Investama Tbk (MNC Group), and PT Smartfren Telecom Tbk. (Sinar Mas Group). His last position before joining in the Company was as Head of Internal Audit in PT REA Kaltim Plantations (REA Group).

Menjadi anggota *The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia)* dan mengikuti berbagai pelatihan *auditing, internal control, dan finance* seperti *Internal Audit Training ISO/IEC 20000-1:2011 Information Technology Management System (ITMS); Internal Audit Training ISO 14001:2015 Environmental Management System (EMS); Awareness Training ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS); Awareness Training ISO/IEC 20000-1:2011 Information Technology Management System (ITMS); Awareness Training ISO 14001:2015 Environmental Management System (EMS); Internal Control, Good Corporate Governance and Bribery Act Workshop; Certified Internal Auditor Review; Principles of Customer Introduction and Money Laundering Crime in Indonesia workshop; ISS Asia Pacific Finance Training, Thailand.*

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu manajemen Perseroan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan resiko, pengendalian internal dan proses Tata Kelola Perseroan, serta memberikan saran/rekomendasi kepada senior manajemen dalam bidang tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Anggaran Aktivitas Audit Internal Tahunan berdasarkan prioritas resiko sesuai dengan tujuan perusahaan;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan perusahaan;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit;
5. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
6. Bekerjasama dan berkomunikasi langsung dengan Komite Audit;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Become a member of *The Institute of Internal Auditors Indonesia* and following various auditing, internal control and finance training e.g. Internal Audit Training ISO/IEC 20000-1:2011 Information Technology Management System (ITMS); Internal Audit Training ISO 14001:2015 Environmental Management System (EMS); Awareness Training ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS); Awareness Training ISO/IEC 20000-1:2011 Information Technology Management System (ITMS); Awareness Training ISO 14001:2015 Environmental Management System (EMS); Internal Control, Good Corporate Governance and Bribery Act Workshop; Certified Internal Auditor Review; Principles of Customer Introduction and Money Laundering Crime in Indonesia workshop; ISS Asia Pacific Finance Training, Thailand.

Duties and Responsibilities of Internal Audit

The purpose of Internal Audit is to help the management of the Company to achieve the goals set with a systematic approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control and the processes of Corporate Governance of the Company, along with provide suggestions/recommendations to senior management in the field. To achieve these objectives, the Internal Audit Unit has duties and responsibilities as follows:

1. Composing and implementing the Activities Plan and Budget of the Annual Internal Audit based on the risks priority in accordance with the Company's goals;
2. Performing examination and judgment over the efficiency and effectiveness of all of the Company's business activities;
3. Testing and evaluating the implementation of the internal control and risks management system in accordance with the Company's policies;
4. Giving advises for improvement and objective information regarding activities that are examined in all management level and formulating written report on the audit results every month and delivering the reports to the President Director and the Board of Commissioners copied to the Audit Committee;
5. Monitorize, analyze and report the implementation of follow up of the suggested improvement advises;
6. Cooperate and Communicate directly with the Audit Committee;
7. Composing programs to evaluate the quality of performed internal audit activities;
8. Performing special examination if necessary.

Kegiatan Audit Internal

Sepanjang tahun 2019, Audit Internal melakukan audit yang terdiri dari audit reguler, pemantauan, dan audit khusus. Audit dilakukan dengan menggunakan Metode Audit Berbasis Risiko. Audit Internal juga melakukan *audit monitoring* untuk menindaklanjuti status rekomendasi audit sebelumnya dan memastikan bahwa rencana aksi yang disepakati telah benar dan tepat waktu dilakukan oleh Pemilik Proses Bisnis dan Senior Manajemen yang terkait.

Pada tahun 2019 Perseroan telah melaksanakan audit dan konsultasi sebagai berikut:

Internal Audit Activity

Throughout 2019, the Internal Audit conducted an audit consisting of regular auditing, monitoring, and special audit. Audit is conducted by using a Risk Based Audit Method. Internal Audit also conducts audit monitoring to follow up the status of previous audit recommendations and ensure that the agreed action plan has been properly and timely conducted by the Business Process Owner and related Senior Management.

In 2019 the Company has been conducting an audit and consulting as follows:

Sub Unit	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Direct Sales, Churn, Billing & Collection, Home Passed Creation – Jabodetabek (Cideng, Karawaci, Cibubur Bekasi)	1				1
Direct Sales, Churn, Billing & Collection, Home Passed Creation – Surabaya	1				1
SMK3 (Occupational Health and Safety Management System).	1				1
Surveillance Audit of ISO 9001:2015		1			
Vendor CME (Civil, Mechanical, Engineering) in Hub Jonggol Construction - SCM Division, CREWS Division, EMES Division, NEO Division Head Office		1			
Purchase Order – SCM Division Head Office		1			1
Procure To Pay Process (Material & Technology Sourcing) – SCM Division Head Office		1			1
Procure To Pay Process (Material & Technology Sourcing) - Surabaya		1			1
IT Asset Management – IT & Services Division			1		1
IT Asset Management – Surabaya			1		1
Development of ISO 27001:2013 (Information Security Management System) – IT & Services Division			1		
Stock Opname & Warehouse - Surabaya			1		1
Surveillance Audit of ISO 20000-1:2011 (IT Service Management System) – IT & Services Division				1	
Surveillance Audit of ISO 14001:2015 (Environmental Management System) – CREWS Division				1	
Stock Opname & Warehouse - Batam				1	1
Surveillance Audit of ISO 9001:2015				1	
Stock Opname & Warehouse - Bandung				1	1
Stock Opname & Warehouse - Medan				1	1
Total	3	5	4	6	18



Pelatihan dan Pendidikan yang diikuti Karyawan Unit Audit Internal

Untuk meningkatkan kompetensinya, selama tahun 2019 Unit Audit Internal telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan. Kegiatan tersebut dilakukan baik dalam internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Pelatihan dan pendidikan yang dilakukan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Program	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Tanggal Date
1	Course on Interpretation and Introduction of Occupational Health and Safety Management System based on ISO 45001:2018 & PP No. 50/2012	PT Qyusi Global Indonesia (Qyusi Consulting)	Best Western Premier The Hive (East Jakarta)	16 Maret 2019 March 16, 2019
2	Awareness Training 27001:2013	PT Praba Sinergi Utama	Gedung Link Net (Tangerang) Link Net Building (Tangerang)	31 Juli 2019 July 31, 2019
3	Stepping Up	HR – LD Division	Gedung Link Net (Tangerang) Link Net Building (Tangerang)	11-12 November 2019 November 11-12, 2019

Internal Audit Unit Employees Training and Education

To improve its competence, during 2019 the Internal Audit Unit has attended various training and education activities. These activities are conducted both within the company's internal and external companies. Training and education conducted during 2019 are as follows:

COMPANY PROFILE Profil Perusahaan	MANAGEMENT REPORT Laporan Manajemen	FINANCIAL & PERFORMANCE HIGHLIGHT Ikhtisar Kinerja Keuangan & Performa Usaha	PREFACE Pendahuluan
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS Analisa Dan Pembahasan Manajemen	COMPANY PROFILE Profil Perusahaan	MANAGEMENT REPORT Laporan Manajemen	MANAGEMENT REPORT Laporan Manajemen
CORPORATE GOVERNANCE Tata Kelola Perusahaan	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	CROSS REFERENCES SEOJK 30-2016 Referensi Sijang SEOJK 30-2016	CROSS REFERENCES SEOJK 30-2016 Referensi Sijang SEOJK 30-2016



AJAK TEMAN **DAPAT GRATISAN!**



**DAPAT 2 BULAN BEBAS TAGIHAN
SETIAP AJAK 1 TEMAN BERLANGGANAN FIRST MEDIA**



**LOGIN
FIRST MEDIA SELFCARE**
Akses my.firstmedia.com dan login menggunakan firstid

>>



**ISI DATA/
BAGIKAN LINK**

Isi data referral pada kolom yang tersedia atau bagikan link melalui Social Media

>>



REWARD

Reward akan diberikan setelah layanan First Media dari referral kamu aktif



1500 595

A JOURNEY OF
TOGETHERNESS

AKUNTAN PUBLIK DAN AUDITOR EKSTERNAL

Public Accountant and External Auditor

Akuntan Publik dan Auditor Eksternal

Sesuai prosedur yang berlaku dan dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor independen, RUPST Perseroan tanggal 26 April 2019 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, termasuk meliputi penelaahan atas sistem akuntansi dan pengendalian internal Perseroan. Biaya jasa untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun buku 2019 disetujui sebesar Rp 635 juta (tidak termasuk PPN).

Tahun 2019, Kantor Akuntan Publik Perseroan adalah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2019 adalah Jul Edy Siahaan.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.13/2017 (sebelumnya peraturan Bapepam dan LK No.VIII.A.2. mengenai Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal) disebutkan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis tahunan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 6-(enam) tahun buku berturut-turut dan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Berikut adalah KAP dan Akuntan Publik yang telah melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir :

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Biaya* Fee*
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Jul Edy Siahaan	635
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Tjun Tjun	585
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Tjun Tjun	425
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Tjun Tjun	520
2015	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Didik Wahyudiyanto	480

*Dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah

Jasa Lain Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Pada periode tahun buku 2019, tidak ada jasa lain yang diberikan oleh Akuntan Publik Tjun Tjun atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selain jasa audit laporan keuangan tahunan kepada Perseroan.

Public Accountant and External Auditor

In line with existing procedures and taking into consideration the independence and qualifications of independent auditors, at our AGMS on April 26, 2019 we appointed Public Accountant Firm ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan a registered KAP with OJK, to perform the audit on our Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019, including review of the accounting and internal control systems of the Company. The fee for the audit on the Consolidated Financial Statements for fiscal year 2019 was agreed at Rp 635 million (excluding VAT).

In 2019, the Company's Public Accountant Firm is Amir Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Public Accountant who signed the Independent Auditors' Report for Fiscal Year 2019 is Jul Edy Siahaan.

Based on OJK Regulation No. 13/POJK.13/2017 (previously Bapepam-LK regulation No.VIII.A.2. on the Independence of Accountant Providing Audit Services in Capital Markets) noted that the provision of services of general audit of the client's financial statements can only be done by a Public Accountant Firm for as long as 6 (six) financial years in a row and by an accountant no later than 3 (three) fiscal years in a row.

Public Accountant Firm and Public Accountant that have provided audit service of Financial Statement of the Company fot the last 5 (five) years, as follows :

Other Services Provided By The Public Accountant Firm

For fiscal year 2019, no other services were provided by the Public Accountant Tjun Tjun or the public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan other than the audit of the Company's annual financial statements.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Perseroan menyadari bahwa bisnis akan berhadapan dengan ketidakpastian yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal, seperti perubahan regulasi, nilai tukar, persaingan usaha, dan lain-lain. Kemampuan Perseroan untuk mengelola ketidakpastian dengan melakukan analisa potensi risiko dan peluang, serta penerapan praktik tata kelola risiko yang baik, dengan membangun sistem risiko manajemen yang berjalan disetiap fungsi akan menjadi kunci keberlanjutan usaha.

Untuk mendukung sistem risiko manajemen yang baik tersebut, Manajemen telah menetapkan kebijakan manajemen risiko yang relevan dengan sifat dasar bisnis, dan sesuai dengan konteks strategi dan tujuan organisasi. Komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari Manajemen untuk menjalankan sistem pengelolaan risiko. Melalui pendekatan yang terpadu, yang menghubungkan antara Prinsip, Kerangka Kerja, dan Proses Pengelolaan Risiko, kebijakan manajemen risiko dapat dimengerti dan diimplementasikan disetiap tingkatan Perseroan.

Prinsip Manajemen Risiko

1. Menciptakan nilai tambah

Penerapan manajemen risiko akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja Perseroan.

2. Menjadi bagian integral proses di dalam Perseroan

Manajemen risiko bukan merupakan aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan dijalankan disetiap aktivitas utama dan proses di dalam Perseroan.

3. Menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan

Manajemen risiko dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan memadai.

4. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu

Hanya dengan pendekatan sistematis, tepat waktu, dan terstruktur, maka manajemen risiko akan berkontribusi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja.

5. Sesuai kebutuhan

Manajemen risiko harus selaras dengan konteks eksternal dan internal serta profil risiko Perseroan untuk mencapai hasil optimal.

6. Memperhitungkan kapasitas dan kapabilitas

Sistem dan penerapan Manajemen Risiko harus selalu memperhitungkan kapasitas dan kapabilitas Perseroan.

7. Dinamis dan responsif terhadap perubahan

Manajemen risiko terus menerus dipantau dan tanggap terhadap perubahan.

8. Perbaikan dan pengembangan berkelanjutan

Komunikasi dan konsultasi dengan Manajemen untuk tindak lanjut, perbaikan (improvement) dan pengembangan sistem manajemen risiko.

The Company realizes that the business will be faced with uncertainties originating from the external and internal environment, such as regulatory changes, exchange rates, business competition, and so on. The Company's ability to manage uncertainty by analyzing potential risks and opportunities, as well as applying good risk management practices, by establishing a risk management system running in every function will be key to business sustainability.

To support such a good risk management system, Management has established risk management policies that are relevant to the nature of the business, and in accordance with the context of the organization's strategy and objectives. Strong Management Commitment and Responsibility to run a risk management system. Through an integrated approach, linking Principles, Frameworks, and Risk Management Processes, risk management policies can be understood and implemented at every level of the Company.

Principles Of Risk Management

1. Creates value

Implementation of risk management will contribute to the achievement of the objectives and performance improvement of the Company.

2. Be an integral part of the process within the Company

Risk management is not a stand-alone activity, but is run in every major activity and process within the Company.

3. Be part of decision making process

Risk management can assist management in decision making by providing relevant and adequate information.

4. Systematic, structured, and timely

Only with a systematic, timely, and structured approach, then risk management will contribute to the efficiency and effectiveness of performance.

5. Be tailored

Risk management must be aligned with the external and internal context and the Company's risk profile to achieve optimal results.

6. Take into account capacity and capability

The system and application of Risk Management must always take into account the capacity and capabilities of the Company.

7. Dynamic and responsive to change

Risk management is continuously monitored and responsive to change.

8. Continuous improvement and enhancement

Communication and consultation with Management for follow-up, improvement and development of risk management system.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

1. Mandat dan Komitmen

Manajemen berkomitmen pada penerapan kebijakan manajemen risiko, dan memberikan mandat kepada unit pelaksana terkait untuk menentukan akuntabilitas, kewenangan dan kapabilitas dari pelaku manajemen risiko

2. Perancangan pola kerja manajemen risiko

Mencakup pemahaman sifat dasar bisnis dan konteks strategi dalam penetapan kebijakan dan akuntabilitas manajemen risiko yang dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis, alokasi sumber daya, dan penetapan mekanisme komunikasi internal dan eksternal.

3. Penerapan manajemen risiko

Kerangka kerja sebagai pedoman dalam implementasi manajemen risiko yang efektif. Pemastian bahwa informasi mengenai pengelolaan risiko yang dihasilkan dari proses pengelolaan risiko telah cukup dilaporkan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

4. Pemantauan dan tinjauan terhadap Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan terus dipantau dan ditinjau ulang untuk memastikan bahwa risiko manajemen telah berjalan sesuai dengan perencanaan, dan dapat diperbarui agar tetap relevan dan mencerminkan situasi saat ini.

5. Perbaikan berkelanjutan Kerangka Manajemen Risiko

Perbaikan berkelanjutan pada kerangka manajemen risiko berdasarkan hasil pemantauan dan tinjauan Manajemen.

Pengelolaan Risiko

- Penetapan tujuan, kebijakan dan ruang lingkup manajemen risiko.
- Identifikasi risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.
- Analisis dan evaluasi risiko untuk menentukan skala prioritas bagi Manajemen dengan mempertimbangkan tingkatan peluang terjadinya dan dampak jika risiko terjadi.
- Pengendalian risiko untuk menurunkan derajat peluang dan dampak dari risiko.
- Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan.
- Komunikasi dan konsultasi dengan pengambil keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan.

Risk Management Framework

1. Mandate and Commitment

Management is committed to the implementation of risk management policies, and mandates the relevant implementing units to determine the accountability, authority and capabilities of risk management actors.

2. Design of framework for managing risk

Includes an understanding of the nature of the business and the strategic context in determining risk management policies and accountabilities that can be integrated into business processes, resource allocation, and the establishment of internal and external communication mechanisms

3. Implementing risk management

Framework as a guide in effective risk management implementation. Assurance that information on risk management resulting from the risk management process has been adequately reported and used as a basis for decision making.

4. Monitoring and review of the Risk Management Framework

The Company's Risk Management framework continues to be monitored and reviewed to ensure that management risks are in line with planning, and can be updated to remain relevant and reflect the current situation.

5. Continual Improvement of the Risk Management Framework

Continuous improvement in the risk management framework based on Management's monitoring and review results.

Risk Management Process

- Determining the objectives, policies and scope of risk management.
- Identify risk by considering internal and external factors.
- Risk analysis and evaluation to determine the priority scale for the Management by considering the extent of probability of occurrence and impact if risk occurs.
- Risk control to reduce the degree of opportunity and impact of risk.
- Monitor and review the results of the risk management system undertaken and identify any changes that need to be made.
- Communication and consultation with internal and external decision makers for follow-up of the results of risk management undertaken.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Sistem manajemen risiko membantu Perseroan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang signifikan bagi keberlanjutan usaha. Perseroan telah mengidentifikasi risiko-risiko di Indonesia secara spesifik, yaitu risiko sosial dan politik, makro ekonomi, bencana, dan risiko lainnya. Kemudian untuk risiko-risiko bisnis, Perseroan telah mengidentifikasi risiko operasional, keuangan, hukum dan kepatuhan regulasi.

Types of Risks and Management

Risk management system helps the Company to identify significant risks for the business sustainability. The Company has identified the risks in Indonesia specifically, namely social and political risk, macro economic risk, disaster risk and other risks. Further for the business risks, the Company has identified operational risk, financial risk, legal and regulatory compliance risk.

Jenis Risiko Type of Risk	Risk Dihadapi Risk Encounter	Dampak ke Perseroan Implication to Company	Mitigasi Mitigation
Risiko-risiko di Indonesia Risk In Indonesia			
Risiko Sosial dan Politik	Gejolak sosial atas isu-isu spesifik dan gangguan stabilitas politik.	Berdampak negatif bagi bisnis, operasi, keadaan keuangan, hasil usaha, dan prospek serta harga pasar surat berharga.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pengaruh gejolak sosial politik terhadap gangguan operasional / layanan. • Pemeliharaan kewaspadaan melalui peningkatan fungsi <i>safety & security</i>.
Social and Political Risk	Social turmoil on specific issues and disruption of political stability.	Negative impact on business, operations, financial condition, results of operations, prospects and market price of securities.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring the effect of social political turmoil on operational / service disruptions. • Maintaining vigilance through improved safety & security functions.
Risiko Makro Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan aktivitas ekonomi global, regional ataupun di Indonesia • Fluktuasi nilai tukar Rupiah. • Peningkatan suku bunga pinjaman. 	Berpengaruh pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha maupun prospek usaha.	Monitoring pengaruh makro ekonomi terhadap potensi peningkatan beban melalui program <i>cost leadership</i> .
Macro Economic Risk	<ul style="list-style-type: none"> • Changes in global, regional or regional economic activity in Indonesia. • Rupiah exchange rate fluctuations. • Increased loan interest rates. 	Influencing business, financial condition, results of operations and business prospects.	Monitoring the effect of macroeconomics on the potential for increased burden through the cost leadership program.
Risiko Bencana	Banjir, petir, angin ribut, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, wabah, kebakaran, kekeringan, pemadaman listrik, dan peristiwa lain yang berada di luar kendali Perseroan.	Mengganggu operasional bisnis dan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan keuntungan, prospek usaha serta harga pasar surat berharga.	Tindakan preventif & korektif melalui persiapan rencana pemulihan bencana dan tim manajemen krisis.
Disaster Risk	Floods, lightning, hurricanes, earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, outbreaks, fires, droughts, power outages, and other events that are beyond the control of Perseroan.	Disrupt business operations and have a negative impact on financial performance and profits, business prospects and market prices of securities.	Preventive & corrective action through disaster recovery plan and crisis management team.

Jenis Risiko Type of Risk	Risk Dihadapi Risk Encounter	Dampak ke Perseroan Implication to Company	Mitigasi Mitigation
Risiko Lain	Standar keterbukaan informasi korporat Indonesia berbeda signifikan dengan yang diterapkan di negara-negara lain.	Mengganggu operasional bisnis dan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan keuntungan, prospek usaha serta harga pasar surat berharga.	Penggunaan konsultan yang kompeten dan berpengalaman dengan Negara lain.
Other Risk	Indonesian corporate information disclosure standards differ significantly from those applied in other countries.	Disrupt business operations and have a negative impact on financial performance and profits, business prospects and market prices of securities.	Use of competent and experienced consultants with other countries.
Risiko-Risiko Terkait Bisnis Business Related Risk			
Risiko Operasional	Pelanggan menghentikan langganan layanan.	Churn	<ul style="list-style-type: none"> Retensi pelanggan: tindakan seperti <i>welcome calls</i>, memprioritaskan layanan <i>hotline contact center</i>, penyediaan pengelolaan akun secara <i>online</i> dan fleksibilitas dalam metode dan persyaratan pembayaran. Secara proaktif melakukan <i>upsells</i> kepada pelanggan <i>existing</i>, sebagai contoh, <i>value added services</i>, paket konten <i>add-on</i>, dan tambahan <i>set-top-box</i>. Analisis dan riset data aktif dengan melakukan survei bulanan terhadap pelanggan yang melakukan <i>churn</i> pada bulan tersebut dan menggunakan hasil ini untuk mengidentifikasi penyebab <i>churn</i>.

Jenis Risiko Type of Risk	Risk Dihadapi Risk Encounter	Dampak ke Perseroan Implication to Company	Mitigasi Mitigation
Risiko-Risiko Terkait Bisnis Business Related Risk			
Operational Risk	The customer unsubscribed from service.	Churn	<ul style="list-style-type: none"> Customer retention: actions such as welcome calls, prioritizing contact center hotline services, providing online account management and flexibility in payment methods and requirements. Proactively do upsells to existing customers, for example, value added services, add-on content packages, and additional set top boxes. Analysis and research of active data by conducting monthly surveys of customers who churn that month and use these results to identify the cause of churn.
	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan Instalasi Installation Delays 	<p>Keluhan Pelanggan</p> <p>Customer complain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga performa jadwal instalasi bersama pihak ketiga. Securing schedule installation performance with third party.
	<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan barang yang digunakan pada saat proses instalasi. Damage to items used during the installation process. 	<p>Keluhan Pelanggan</p> <p>Customer complain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengetatan proses QC pada saat penyerahan barang ke pihak ketiga. Tightening the QC process when delivering goods to the third party.
	<p>Kendaraan operasional yang digunakan untuk kunjungan ke tempat Pelanggan mengalami kerusakan.</p> <p>The operational vehicle that was used for the visit to the customer's place was damaged.</p>	<p>Keluhan Pelanggan</p> <p>Customer complain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga performa kendaraan operasional bersama pihak ketiga. Securing operational vehicle's performance with third party.
	<p>Kemungkinan terjadinya serangan <i>malware</i> yang berdampak terhadap produktivitas server.</p> <p>Probability of malware attacks which impacts on server productivity.</p>	<p>Fungsi operasional sistem layanan teknologi informasi terganggu.</p> <p>The operational function of the information technology service system is disrupted.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Monitoring update antimalware dan firewall system.</i> Pengadaan <i>antimalware</i>. Antimalware and firewall system update monitoring. Antimalware procurement.

FIRST
MEDIA

TV GUIDE

INDONESIA'S PREMIER ENTERTAINMENT
AND TV GUIDE MAGAZINE



07

2019



VIEW

TOM HOLLAND

KARIRNYA SEBAGAI PAHLAWAN SUPER DIMULAI DARI PENARI

ON DIGITAL

FIRST MEDIA MASUK DALAM 100 TOP BRAND INDONESIA

PULAU ROMANTIS DI KOREA SELATAN

MENGAGUMI KARYA ANIMASI BUATAN DALAM NEGERI

CROSS REFERENCES
SEOJK 30-2016
Referensi Sijang
SEOJK 30-2016

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
Analisa Dan Pembahasan Manajemen

COMPANY PROFILE
Profil Perusahaan

MANAGEMENT REPORT
Laporan Manajemen

FINANCIAL & PERFORMANCE HIGHLIGHT
Ikhtisar Kinerja Keuangan & Performa Usaha

PREFACE
Pendahuluan

Jenis Risiko Type of Risk	Risk Dihadapi Risk Encounter	Dampak ke Perseroan Implication to Company	Mitigasi Mitigation
Risiko-Risiko Terkait Bisnis Business Related Risk			
Risiko Keuangan	Risiko suku bunga.	Berakibat buruk pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional.	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan suku bunga tetap atas tenor pinjaman tertentu.
Financial Risk	Interest rate risk.	Adverse effects on business, financial condition and operational results.	<ul style="list-style-type: none"> Use of fixed interest rates for certain loan tenors.
	Risiko nilai tukar mata uang asing. Foreign exchange risk.	Berdampak negatif pada kondisi keuangan atau hasil operasi. Negative impact on financial condition or results of operations.	<ul style="list-style-type: none"> Penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk menutup risiko fluktuasi mata uang asing. Placement of time deposits and hedges to cover the risk of fluctuations in foreign currencies.
	Pelanggan tidak membayar kewajiban. Customers do not pay obligations.	Pendapatan dan EBITDA turun. Revenue and EBITDA decreased.	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur <i>collection</i> yang bertanggung jawab untuk mengingatkan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan yang tertunggak, melalui telepon, pesan teks dan surat. Pilihan pembayaran tagihan melalui transfer bank, kartu kredit, toko ritel, e-commerce, dan aplikasi uang elektronik. Collection procedures that are responsible for reminding customers to make payments in arrears, over the telephone, text messages and notification letters and payment requests. Choice of bill payment via bank transfer, credit card, retail store, e-commerce and electronic money application.

Jenis Risiko Type of Risk	Risk Dihadapi Risk Encounter	Dampak ke Perseroan Implication to Company	Mitigasi Mitigation
Risiko-Risiko Terkait Bisnis Business Related Risk			
Risiko Regulasi	Perubahan regulasi Indonesia.	Berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Analisa dampak rencana regulasi terhadap industri secara umum dan Perseroan secara khusus. Memberikan masukan agar peraturan yang akan ditetapkan memberi manfaat positif bagi Perseroan dan industri.
Regulatory Risk	Changes to Indonesia regulation.	Impacts on business, financial condition, operational performance and business prospects.	<ul style="list-style-type: none"> Analyze the impact of planned regulations on the industry in general and the Company in particular. Provide input so that the regulations to be established provide positive benefits for the Company and industries.
Risiko terkait dengan Bisnis Telekomunikasi	Persaingan layanan internet dan televisi berbayar.	Berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan persepsi dan kualitas Link Net. Percepatan penggelaran infrastruktur layanan internet dan televisi berbayar. Meningkatkan kualitas layanan.
Risks related to the Telecommunications Business	Competition in internet services and pay television.	Negative impact on business, financial condition, operational performance and business prospects.	<ul style="list-style-type: none"> Strengthening the perception and quality of Link Net. Accelerating the deployment of internet service infrastructure and pay television. Improve quality services.

FIRST
MEDIA
TV GUIDE

INDONESIA'S PREMIER ENTERTAINMENT
AND TV GUIDE MAGAZINE



view



ANGELINA JOLIE ON DIGITAL
KOMPETISI E-SPORTS PERTAMA DI INDONESIA
54TH GOLDEN BELL AWARDS 2019
DESAIN WAJAH IBUKOTA BARU INDONESIA

TOTALITASNYA DALAM BERPERAN MENJADI SOSOK INSPIRATIF DUNIA

Sistem Manajemen Mutu

Perseroan telah memperoleh sertifikasi *International Standard Operation* untuk ISO 9001:2015 pada tahun 2018 dari *United Registrar of System Ltd (URS)* sebagai pengakuan Sistem Manajemen Mutu terkait aktivitas jasa TV Kabel dan Data Internet.

ISO 9001:2015 merupakan standar praktik untuk sistem manajemen mutu yang menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk baik barang maupun jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu yang ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.

Sistem Manajemen Lingkungan

Perseroan telah memperoleh sertifikasi *International Standard Operation* untuk ISO 14001:2015 pada tahun 2018 dari PT British Standards Institution (BSI) Group Indonesia sebagai pengakuan Sistem Manajemen Lingkungan terkait aktivitas Perkantoran, Pemeliharaan Gedung dan Manajemen Material dalam tanggung jawab Divisi Corporate Real Estate dan Warehouse.

ISO 14001:2015 merupakan standar praktik untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pilar lingkungan keberlanjutan yang memberikan manfaat bagi lingkungan, bagi organisasi itu sendiri dan pihak berkepentingan meliputi peningkatan kinerja lingkungan, memenuhi kewajiban penaatan dan mencapai tujuan lingkungan.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi

ISO/ IEC 27001:2013 merupakan standar praktik untuk Sistem Keamanan Informasi yang bertujuan agar dapat menjamin terpenuhinya keamanan informasi terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu yang ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.

Perseroan telah memperoleh sertifikasi International Standard Operation untuk ISO/ IEC 27001:2013 pada tahun 2019 dari PT British Standards Institution (BSI) Group Indonesia sebagai pengakuan Sistem Manajemen Keamanan Informasi terkait aktivitas penerapan keamanan informasi *data center* dalam pengelolaan *IT & Service Division*

Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Perseroan telah memperoleh sertifikasi *International Standard Operation* untuk ISO/ IEC 20000-1:2011 pada tahun 2018 dari PT British Standards Institution (BSI) Group Indonesia sebagai pengakuan Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi terkait aktivitas Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi dari Divisi *IT & Service* dalam pendistribusian Layanan Teknologi Informasi ke seluruh unit kerja dan karyawan .

ISO/ IEC 20000-1:2011 merupakan standar praktik untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi agar dapat menjamin kesesuaian dari suatu proses atas layanan teknologi informasi terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu yang ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.

Quality Management System

The Company has obtained International Standard Operation certification for ISO 9001:2015 in 2018 from the United Registrar of System Ltd (URS) as recognition of the Quality Management System related to the activities of Cable TV and Internet Data Services.

ISO 9001: 2015 is a practice standard for a quality management system that guarantees the suitability of a process and product both goods and services to certain needs or requirements that determined or specified by customers and organizations.

Environmental Management System

The Company has obtained International Standard Operation certification for ISO 14001:2015 in 2018 from PT British Standards Institution (BSI) Group Indonesia as recognition of Environmental Management Systems related to the provision of Office Operation, Building Maintenance and Material Management under Corporate Real Estate and Warehouse Division.

ISO 14001: 2015 is a practice standard for implementing environmental management systems with the aim of contributing to environmental sustainability pillars that provide benefits to the environment, for the organization itself and interested parties including improving environmental performance, fulfilling compliance obligations and achieving environmental objectives.

Information Security Management System

ISO / IEC 27001:2013 is a practice standard for Information Security Systems that aims to ensure the fulfillment of information security against certain needs or requirements that are determined or specified by customers and organizations.

The Company has obtained the International Standard Operation certification for ISO / IEC 27001:2013 in 2019 from PT British Standards Institution (BSI) Group Indonesia in recognition of the Information Security Management System related to the activities of implementing data center information security in the management of *IT & Service Division*.

Information Technology Services Management System

The Company has obtained International Standard Operation certification for ISO / IEC 20000-1:2011 in 2018 from PT British Standards Institution (BSI) Group Indonesia as recognition of Information Technology Services Management Systems related to the Service Management System of *IT & Service Division* in delivering IT services to all working unit and employees.

ISO / IEC 20000-1: 2011 is a practice standard for Information Technology Service Management Systems in order to ensure the suitability of a process for information technology services to certain needs or requirements that determined or specified by customers and organizations.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal

Komitmen Perseroan pada penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diwujudkan dengan pembentukan Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal dirancang dengan menyusun kerangka pengendalian internal yang komprehensif untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan operasional berjalan efektif dan efisiensi, pelaporan keuangan akurat dan dapat diandalkan, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Serangkaian kebijakan dan prosedur pengendalian ditetapkan oleh Manajemen untuk menunjang Komite Audit, Internal Audit dan Audit Eksternal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan aktivitas dan pengelolaan.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Kerangka sistem pengendalian internal yang ditetapkan Perseroan mengacu pada kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Menurut COSO, sistem pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan personil yang diberi mandat oleh Manajemen, dengan memanfaatkan sumber daya yang terkendali agar tujuan dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai dari sistem pengendalian internal tersebut adalah:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan
3. Kepatuhan pada peraturan dan hukum yang berlaku

Lingkup pengendalian internal tersebut merupakan serangkaian tindakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dari keseluruhan proses bisnis Perseroan. Komponen sistem pengendalian internal yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO adalah:

1. Lingkungan pengendalian internal (*control environment*), yang mencakup tindakan, kebijakan dan prosedur serta nilai etik, yang merefleksikan keseluruhan sikap Pemilik Entitas dan Manajemen dalam mengorganisasikan dan mengembangkan bisnis perusahaan.
2. Penilaian risiko (*risk assessment*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dari aktivitas bisnis Perseroan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*), yang mencakup kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Manajemen untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Perseroan tercapai.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), yang memungkinkan penyajian informasi yang relevan dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana arus informasi dikomunikasikan sesuai konteks kebutuhan dan otoritas dalam operasional Perseroan.
5. Pemantauan (*monitoring*), yang bertujuan untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal secara terus menerus dan dievaluasi secara terpisah atau kombinasi dari keduanya.

Internal Control System

The Company's commitment to the implementation of Good Corporate Governance principles is manifested by the establishment of an Internal Control System. The Internal Control System is designed by developing a comprehensive internal control framework to provide reasonable assurance that effective and efficient implementation of operational activities, accurate and reliable financial reporting, and compliance with applicable rules. A series of control policies and procedures are established by Management to support the Audit, Internal Audit and External Audit Committees in the implementation of the activity and management oversight function.

Internal Control System Framework

The framework of the internal control system established by the Company refers to an internationally recognized framework, the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Based on COSO, the internal control system is a process that involves the Board of Commissioners, the Board of Directors, and personnel mandated by the Management, utilizing the controlled resources in order to achieve the objectives and targets. The objectives to be achieved from the internal control system are:

1. Effectiveness and efficiency of operation
2. Accuracy and reliability of financial reporting
3. Compliance with applicable laws and regulations

The scope of internal control is a series of actions that include planning, implementation and monitoring of the entire Company business process. The components of the internal control system that support the effectiveness of internal controls system based on COSO framework are:

1. The internal control environment, which includes actions, policies and procedures and ethical values, reflecting the overall attitude of the Entity Owners and Board of Management in organizing and developing the company's business.
2. Risk assessment, which aims to identify, analyze and manage the risks of the Company's business activities.
3. Control activities, which include policies and procedures established by Management to ensure that the Company's objectives and targets are met.
4. Information and communication, which allows the presentation of relevant and quality information, as required, and how information flows are communicated within the Company context of needs and authorities in the operations.
5. Monitoring, which aims to assess the quality of performance of internal controls continuously and evaluated separately or in combination of both.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan fungsi pengendalian internal memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemilik Entitas sesuai Visi, Misi, Nilai dan Target Perseroan. Aktivitas pengendalian melibatkan unit internal audit dan risk management dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan pada kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta aturan yang berlaku. Setiap tindakan pengawasan dan pemeriksaan mempertimbangkan aspek risiko aktivitas dan bisnis agar hasil yang dicapai tepat sasaran.

Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan dikomunikasikan kepada unit pelaksana terkait untuk mencapai solusi perbaikan (*improvement*) yang dapat memperkuat fungsi pengendalian internal. Selanjutnya laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan diterbitkan dan dipaparkan secara periodik kepada Komite Audit dan Manajemen sehingga diperoleh keputusan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan proses dan sistem pengendalian internal.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian

Perseroan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan efektivitas pengendalian internal pada tingkat bisnis dan operasional secara periodik dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian intern dilakukan baik pada tingkat Komite Audit, Manajemen, Pimpinan unit pelaksana.
2. Dengan merealisasikan pelaksanaan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan yang menitikberatkan pada tujuan Perseroan dan risiko bisnis, diperoleh peningkatan hasil pengawasan dan rekomendasi strategis perbaikan (*improvement*) pada proses bisnis.
3. Komunikasi yang efektif terhadap kebijakan Perseroan disampaikan melalui *banner*, *web intranet*, tertulis, sosialisasi langsung kepada unit pelaksana, serta pada *induction training*. Komunikasi bagi pihak eksternal seperti pengaduan dan lainnya melalui *Contact Center*, *web*, *Email*, atau secara langsung di konter-konter yang disediakan Perseroan.
4. Meningkatnya kontribusi unit pelaksana dalam fungsi pengawasan pada proses masing-masing, dan pada proses di unit pelaksana lain yang terkait dengan unitnya.
5. Penggunaan sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi untuk menunjang kegiatan operasional yang efektif dan efisien bagi Perseroan.
6. Perseroan telah menjalankan sistem keterbukaan informasi kepada pelanggan maupun karyawan di antaranya melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System (WBS)*) dan pelaporan Gratifikasi.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan operasional Perseroan sepanjang tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah dilakukan sudah berjalan dengan baik, memadai dan konsisten, dan terbuka peluang untuk perbaikan dan penyempurnaan ditahun yang akan datang.

Implementation of Internal Control System

Implementation of internal control functions shall take into account the interests of the Company and Entity Owners in accordance with the Company's Vision, Mission, Values and Targets. Control activities involve internal audit and risk management units in monitoring and inspection functions on compliance with applicable policies and procedures and rules. Every supervision and examination action considers aspects of activity and business risks for more accurate results.

Supervision and inspection activities are communicated to the relevant implementing unit to achieve improvement solutions that can strengthen internal control functions. Furthermore, supervision and inspection reports are published and presented periodically to the Audit Committee and Management to obtain strategic decisions and recommendations for improvement of internal control processes and systems.

Internal Control System Effectiveness Evaluation

The Company evaluates the effectiveness of internal control at business and operational level periodically with the following explanation:

1. Monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of internal controls shall be conducted either at the level of the Audit Committee, Management, Head of the operational unit.
2. By realizing the implementation of supervisory and inspection activities that focus on the Company's objectives and business risks, improved results of supervision and strategic improvement recommendations on business processes
3. Effective communication of Company policy is delivered through banner, web intranet, written, direct socialization to the operation unit, as well as induction training. Communication for external parties such as complaints and others through Contact Center, web, Email, or directly at counter provided by the Company.
4. Increased contribution of implementing units in supervisory functions in their respective processes, and on processes of other process owners related to their units.
5. The use of integrated Information Technology system to support the effectiveness and efficiency's of the Company operational activities.
6. The Company has implemented a system of disclosure of information to customers and employees through the Whistleblowing System (WBS) and Gratification reporting.

Based on the results of supervision and examination of the Company's operational activities throughout 2019, it can be summarize that the Company's internal control system has been carried out properly, adequately and consistently, and open opportunities for improvement and improvement in the coming year.



PERKARA HUKUM PENTING

Important Legal Cases

Perkara Hukum Penting

Perseroan selalu berusaha mengambil tindakan terbaik untuk menghindari kemungkinan terkena sanksi yang dapat menimbulkan akibat material terhadap Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan. Selama tahun 2019 Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi tidak menghadapi permasalahan hukum yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

Important Legal Cases

The Company has always tried to take the best course of action to avoid possible sanctions that could cause materially due to both the Company and Shareholders. During 2019 the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors did not face any material legal issues which may affect the Company's operational activities.

KODE ETIK

Code of Conduct

Komitmen Perseroan sebagai perusahaan terbuka untuk memperoleh kesinambungan usaha jangka panjangnya tidak hanya tercermin dari kepatuhan Perseroan terhadap aturan yang bersifat mengikat. Perseroan juga senantiasa menerapkan suatu standar kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai salah satu tolok ukur dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan operasional usaha Perseroan. Selain Perseroan yang berkewajiban memenuhi persyaratan dari semua perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan standar kode etik dan tanggung jawab profesional tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap publik, para pelanggan, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

The Company's commitment as a public company to obtain long term business sustainability is not only reflected on the Company's compliance to binding regulations. The Company always implements a standard ethics and professional responsibilities as one of benchmarks in its efforts to achieve balance in business. Besides obligation to comply with the regulations and laws, the Company also implements the standard ethics and professional responsibilities as part of its responsibilities to the public, customers, Shareholders and Stakeholders in doing its business.



COMPANY PROFILE Profil Perusahaan	MANAGEMENT REPORT Laporan Manajemen	FINANCIAL & PERFORMANCE HIGHLIGHT Ikhtisar Kinerja Keuangan & Performa Usaha	PREFACE Pendahuluan
-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

CORPORATE GOVERNANCE Tata Kelola Perusahaan	MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS Analisa Dan Pembahasan Manajemen
---	---

CROSS REFERENCES SEOJK 30-2016 Referensi Sijang SEOJK 30-2016	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
---	--

Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara fundamental, penting bagi Perseroan untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional ("Kode Etik") yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-021/LN/HR/VII/15 tanggal 30 Juli 2015. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami standar kode etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan Perseroan, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan wajib menandatangani standar kode etik tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali.

Penanganan terhadap penyimpangan atas Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari dengan fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan. Melalui pertimbangan yang cermat dan obyektif, Direksi memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hierarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk PHK, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ijin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Under the guidance of the international standard, commitment to always obey the regulations, the implementation of good corporate governance, it is fundamentally important for the Company to determine the Standard Ethics and Professional Responsibilities ("Code of Ethics") that have been approved under a Resolution of the Board of Directors Number SK-021/LN/HR/VII/15 dated July 30, 2015. All management and employees are obliged to understand the Code of Ethics as the basis of implementation and behavior that regulate the relations between employees and the Company, among employees, customers, suppliers, shareholders, stakeholders, the government and the society. All management and employees are obliged to sign the standard code of ethics every 2 (two) years.

Treatment on misappropriation towards the Company Regulations as well as the Code of Ethics and Professional Responsibilities is performed in a thorough investigation, which is based on facts, while the decision is made and issued based on the impacts of the actions, the level of consciousness and motives of the actions. Through a meticulous and objective consideration, the Board of Directors will decide on sanctions in accordance with the level of irregularities and the organizational hierarchy (the employees' ranks or positions). Sanctions to employees include verbal reprimand, warning letters (I, II, III) as well as repudiation on wage increase, rank or bonuses, to the termination of employment. Specific on the termination of employment, an approval from the Directors need to be followed up by a request to the Manpower Department in line with regulations under the Law on Manpower of the Republic of Indonesia.



KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN
PELANGGARANINI DIBERLAKUKAN BAGI
MANAJEMEN DAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN
PERSEROAN.

THE POLICIES ON THE WHISTLEBLOWING
SYSTEM IS APPLIED TO MANAGEMENT AND
EMPLOYEES OF THE COMPANY

SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN Whistleblowing System

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran dimaksudkan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari *Stakeholders* untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai. Tujuan akhirnya adalah sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan Kode Etik yang berlaku di Perseroan.

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini diberlakukan bagi manajemen dan karyawan di lingkungan Perseroan dan seluruh unit usahanya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Policies On The Management Of Irregularities Complaints

The Policies on the Management of Irregularities Complaints is a system that can be a tool for witnesses to deliver information regarding irregularities. Complaints that are obtained from the whistleblowing mechanism needs further attention and follow up, including on the proper punishment that can give a deterrent effect to the perpetrators and to those who are planning to.

The Policies on the Management of Irregularities Complaints is aimed to be the basis or guidance on the implementation of the management of Irregularities Complaints from the Stakeholders to ensure the implementation of an effective settlement mechanism in an appropriate period. The final goal is an effort for the disclosure of various problems in the Company which are not in line with the Code of Ethics applied in the Company.

The Policies on the Management of Irregularities Complaints is applied to management and employees of the Company and its entire business units in the implementation of daily duties that are in line with the Good Corporate Governance.

Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran

Perseroan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran, baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.

Perseroan menyediakan dua saluran pengelolaan pengaduan, yaitu melalui jalur Direksi apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh karyawan, dan jalur Dewan Komisaris apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja sesuai dengan tingkat pelaku pelanggaran.

1. Proses Penanganan Pengaduan

- Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
- Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
- Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
- Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum Karyawan yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi.
- Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Dewan Komisaris untuk diinvestigasi.
- Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh karyawan, maka dapat ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh karyawan yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau yang diberi kuasa untuk itu sebagai pejabat yang menangani perkara.
- Seluruh proses pengaduan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

General Provisions on the Handling of Irregularities Complaints

The Company is obliged to accept irregularities complaints both from internal or external parties. The Company is obliged to accept and settle the irregularities complaints either when the informers' identities are revealed or when they are unspecified.

The Company provides two irregularities management process, which are through the Board of Directors if irregularities are allegedly performed by employees and through the Board of Commissioners if irregularities are allegedly conducted by the Board of Directors, the Board of Commissioners, supporting organs for the Board of Commissioners and the head of Business Units.

1. The Process of Complaints Management

- The Management Team for Irregularities Complaints performs verifications over incoming reports. The team will decide the need for an investigation towards the complaints within 30 working days, which can be extended by another 30 working days.
- If the verification results in incorrect complaints and no evidences to support the complaints, the process won't be continued.
- If the verification results in indication of irregularities with sufficient evidences, the complaint will be processed to the investigation stage.
- Regarding irregularities complaints involving employees that need investigation, the management Team for Irregularities Complaints at the Directors stage is obliged to follow up for investigations.
- Regarding irregularities complaints involving the Board of Directors, Board of Commissioners, the supporting organs for the Board of Commissioners and the Head of Business Units that need investigation, the Management Team for Irregularities Complaints at the Board of Commissioners stage is obliged to follow up for investigations.
- The actor of irregularities, who are proven guilty based on the investigations, will be processed in accordance to the regulations.
- If investigations result in indiscipline irregularities by employees, a disciplinary trial can be held in accordance with the regulations.
- If the investigations result in criminal irregularities by employees, a legal process will be conducted by law enforcement agencies and the Board of Directors or other authorized person as officials in charge of the case.
- All process of irregularities complaints are administered properly by the Management Team for Irregularities Complaints.

2. Pemantauan Tindak Lanjut

- Pemantauan tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
- Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus menginformasikan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran & Tindak Lanjut

Selama tahun 2019, Perseroan menerima 13 (tiga belas) pengaduan yang masuk. Namun setelah dilakukan kajian oleh tim, 6 (enam) diantara pengaduan tersebut termasuk dalam kriteria pengaduan yang perlu ditindaklanjuti.

Program Program	Jumlah Amount
Jumlah Pengaduan Numbers of Complaints	13
Memenuhi Syarat Qualify	6

Perlindungan dan Apresiasi

Perseroan bertekad untuk memberikan perlindungan bagi pelapor dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor dan begitu juga dengan terlapor sebelum ada pembuktian lebih lanjut. Selain itu Perseroan juga dapat memberikan apresiasi terhadap pelapor. Untuk itu Perseroan memiliki ketentuan perlindungan dan apresiasi sebagai berikut:

1. Perlindungan Pelapor dan Terlapor

- Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor yang dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
- Perlindungan pelapor meliputi:
 - Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
 - Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
 - Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya.
- Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai status terperiksa berubah.

2. Penghargaan Kepada Pelapor

- Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan.
- Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.

2. Monitoring on Follow Up

- The monitoring on the follow up of the irregularities complaints is performed by the Management Team for Irregularities Complaints.
- The Management Team for Irregularities Complaints has to inform the incoming irregularities complaints, the investigated complaints and the complaints that are considered to have been solved to the Board of Directors or the Board of Commissioners in any time needed.

Number of Complaints Violation and Respond

During 2019, the Company respond 13 (thirteen) complaints received. However, after a review by team, 6 (six) among the complaints included in the criteria of complaints that need to be followed up.

Protection and Apreciation

The Company is committed to providing protection for whistleblowers while maintaining the confidentiality of the informant and the reported party as well as before any further verification. The Company was also able to provide an appreciation to the informant. Therefore, the Company has the provision of protection and appreciation as follows:

1. Protection for the Informer and the Perpetrator

- The Company is obliged to protect the informant. This is aimed to support courage to file reports on irregularities.
- Protection for the informants cover :
 - Guarantee on the secrecy of the informants and the contents of the report.
 - Guarantee of security of the informants or their family.
 - Guarantee over any adverse treatments.
- The Company guarantees the secrecy of informants' identities until a change in the status of the people under investigation.

2. Apreciation to the Informers

- The Company could give appreciation to informant for proven irregularities so that the Company's assets/finance can be secured.
- Appreciation is given based on the Board of Directors policies.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pelapor dilindungi dari
Ancaman dan Intimadasi



Suruhan untuk memproses pengaduan sehubungan dengan adanya perbuatan atau tindakan kecurangan, pelanggaran, dan fraud baik terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan kode etik.

Bila anda Mengetahui, Melihat dan Mendengar adanya kecurangan, segera laporkan!!

021 - 2953 6853
(Whatsapp Text dan Call)



E-Mail :
pengaduan@linknet.co.id

PT Link Net Tbk

LinkNet